



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN



# LAPORAN KINERJA Triwulan III 2024

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PADANG  
2024



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSRé, BSSN

## Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya hingga Laporan Kinerja (LKj) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi mengenai capaian kinerja BPSPL Padang selama periode triwulan III melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama dengan hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Laporan ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja BPSPL Padang kepada para pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama triwulan III 2024.

Di samping itu, laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Kritik, masukan, dan saran sangat kami harapkan untuk memperbaiki kekurangan laporan ini. Atas perhatian dan dukungan semua pihak diucapkan terima kasih.

Padang, 18 Oktober 2024  
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya  
Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

Fajar Kurniawan, S.T., M.AP., M.MG.

## Ringkasan Eksekutif

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSPL Padang secara proposional dan profesional berupaya mencapai hasil yang baik dengan mengutamakan transparansi dan keterbukaan pada setiap kegiatan dengan cara melaporkan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) yang disusun setiap triwulan. LKj Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Triwulan III 2024 merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban atas pencapaian dari tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan selama periode tersebut, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam instruksi Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebagai upaya dalam mendukung visi, misi, dan *grand strategy* KKP dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL), BPSPL Padang menguraikan penjabaran visi misi yang dituangkan dalam kegiatan dan Indikator Kinerja (IK). Oleh karena itu, pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menjadi kewenangan BPSPL Padang berpedoman pada sasaran strategis yang di turunkan pada IK sebagai target yang akan dicapai selama periode tahun anggaran 2024. Pada tahun 2024, terdapat sebelas sasaran strategis dan 22 Indikator Kinerja (IK) di lingkup BPSPL Padang dengan jangka waktu target bersifat triwulanan, semesteran, dan tahunan.

Lebih lanjut, dilakukan pengukuran capaian kinerja yang dilakukan setiap triwulannya untuk memperoleh gambaran konkret terkait aspek ketercapaian kinerja secara kuantitatif. Adapun pengukuran kinerja ini dilakukan dengan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) melalui laman <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh BPSPL Padang periode triwulan III 2024 adalah **117,50 (kategori istimewa)**. Berikut disampaikan capaian masing-masing indikator kinerja BPSPL Padang triwulan III 2024:

1. Nilai PNBP BPSPL Padang dengan target Rp650.000,000 belum diukur capaiannya karena memiliki periode pengukuran tahunan,
2. Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 320 Orang belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
3. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 3 Dokumen belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
4. Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 3 Daerah belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
5. Kerja Sama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 1 Kesepakatan belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
6. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target tahunan 3 Kelompok dan target pada triwulan III 2 Kelompok; telah tercapai 3 Kelompok pada triwulan III.
7. Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Padang yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru dengan target 1 Kelompok belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
8. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 8 jenis tidak dilakukan pengukuran pada triwulan III karena memiliki periode pengukuran tahunan.
9. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 5 jenis tidak dilakukan pengukuran pada triwulan III karena memiliki periode pengukuran tahunan.

10. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 1 Dokumen belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
11. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 4 Kawasan belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
12. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Padang dengan target tahunan 93,76 tidak diukur capaiannya pada triwulan III.
13. Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Padang dengan target 86 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
14. Nilai Unit Kerja Berpredikat menuju WBK di BPSPL Padang dengan target 75 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
15. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPSPL Padang dengan target tahunan 88 tidak diukur capaiannya pada triwulan III.
16. Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Padang dengan target 81 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
17. Laporan SPIP yang Disusun lingkup BPSPL Padang telah mencapai 3 dokumen dari target tahunan 4 dokumen; capaian sesuai dengan target triwulannya.
18. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Padang yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar telah mencapai 133,33% dari target 94%.
19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Padang yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan telah mencapai 100% dari target 80%.
20. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Padang dengan target 100% belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Padang dengan target 80 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
22. Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Padang dengan target 65 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.

Berdasarkan uraian capaian tersebut, BPSPL Padang telah mencapai seluruh indikator kinerja yang dijadwalkan pada triwulan III 2024 dengan persentase  $\geq 100\%$ . Pencapaian tersebut juga didukung dengan adanya alokasi **pagu anggaran sejumlah Rp16.904.860.000,00** (Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Dari total anggaran tersebut, 87,64% bersumber dari Rupiah Murni sementara 12,36% bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam perkembangannya, seluruh pagu anggaran yang sempat terdampak blokir telah dibuka pada tanggal 20 Juni 2024. **Hingga triwulan III 2024, realisasi anggaran mencapai Rp12.932.031.783,00**, (Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) **dengan persentase 76,50%**. Adapun efisiensi terhadap penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target tersebut belum menunjukkan nilai akhir karena periode pengukurannya yang berlangsung tahunan.

Upaya tindak lanjut dari rekomendasi triwulan sebelumnya telah diwujudkan melalui reviu Rencana Aksi. Dalam upaya tindak lanjutnya, BPSPL Padang melakukan penyesuaian Rencana Aksi pasca pembukaan blokir pada beberapa komponen. Sementara itu, untuk optimalisasi pencapaian target kinerja tahun 2024, langkah yang dapat dilakukan adalah melaksanakan pendampingan pengusulan penetapan Kawasan Konservasi di Provinsi Aceh.



## Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif .....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Gambar .....	xi
Daftar Tabel.....	xiii
I. Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi .....	1
1.3 Perkembangan Lingkungan Kerja Strategis.....	4
1.4 Sistematika Penyajian Laporan .....	8
II. Perencanaan Kinerja.....	9
2.1. Ikhtisar Perjanjian Kinerja.....	9
2.2 Postur Anggaran 2024 .....	11
III. Akuntabilitas Kinerja.....	13
3.1. Capaian Kinerja .....	13
IKU. 1. Nilai PNBSPSPL Padang (Rp.000) .....	16
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan.....	16
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya .....	16
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Berjalan dengan target Tahunan..	16
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	16
E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	17
F. Realisasi Anggaran.....	18
IKU. 2. Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Orang).....	18
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan.....	18
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya .....	18
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan.	19
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	19
E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	19
F. Realisasi Anggaran.....	19
IKU. 3. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen) .....	20



A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulanan Berjalan .....	20
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya .....	20
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan .	20
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	21
E.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	21
F.	Realisasi Anggaran.....	26
<b>IKU. 4. Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Daerah).....</b>		
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan.....	26
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya .....	27
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan .	27
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	27
E.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	27
F.	Realisasi Anggaran.....	39
<b>IKU. 5. Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kesepakatan) .....</b>		
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan.....	40
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya .....	40
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan.	40
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	41
E.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	41
F.	Realisasi Anggaran.....	42
<b>IKU. 6. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kelompok) .....</b>		
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan.....	43
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya .....	44
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan .	44
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	45
E.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	45
F.	Realisasi Anggaran.....	48



IKU. 7. Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Padang yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok) .....	48
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan .....	48
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya .....	48
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan .	48
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	49
E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	49
F. Realisasi Anggaran.....	49
IKU. 8. Jenis Ikan Terancam Puna yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis) .....	50
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan .....	50
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya .....	50
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan .	50
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	51
E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	51
F. Realisasi Anggaran.....	64
IKU. 9. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis) .....	64
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan .....	65
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya .....	65
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan .	65
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	65
E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	66
F. Realisasi Anggaran.....	69
IKU. 10. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen) 70	
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan .....	70
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya .....	70
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan .	70
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	70



E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	71
F. Realisasi Anggaran.....	72
IKU. 11. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kawasan).....	72
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan.....	73
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya .....	73
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan.....	73
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	73
E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	74
F. Realisasi Anggaran.....	75
IKM. 12. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Padang (Nilai) .....	76
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan.....	76
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya .....	76
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan .	76
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	77
E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	77
F. Realisasi Anggaran.....	77
IKM. 13. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Padang (Nilai).....	77
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan.....	77
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya .....	78
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan .	78
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	78
E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	79
F. Realisasi Anggaran.....	79
IKM. 14. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Nilai) .....	79
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan.....	79
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya .....	80
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan .	80



D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	80
E.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	80
F.	Realisasi Anggaran.....	82
IKM. 15.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Padang (Indeks).....	82
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan.....	82
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya .....	83
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan .83	
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	83
E.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	83
F.	Realisasi Anggaran.....	84
IKM. 16.	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Padang .....	84
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan.....	84
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya .....	84
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan .84	
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	85
E.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	85
F.	Realisasi Anggaran.....	86
IKM. 17.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Padang (Dokumen).....	86
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan.....	86
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya .....	87
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan .87	
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	87
E.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	88
F.	Realisasi Anggaran.....	88
IKM. 18.	Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Padang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%) .....	88
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan.....	88
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya .....	89
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan .89	



D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	89
E.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	89
F.	Realisasi Anggaran.....	89
IKM. 19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Padang yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%).....	90
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan.....	90
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya.....	91
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan.....	91
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	92
E.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	92
F.	Realisasi Anggaran.....	92
IKM. 20.	Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Padang (%).....	92
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan.....	93
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya.....	93
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan.....	93
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	93
E.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	94
F.	Realisasi Anggaran.....	94
IKM. 21.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Padang (%).....	94
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan.....	95
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya.....	95
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan.....	95
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	95
E.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	96
F.	Realisasi Anggaran.....	97
IKM. 22.	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Padang (Nilai).....	97
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan.....	98
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya.....	98
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan.....	98



D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	98
E.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	99
F.	Realisasi Anggaran.....	99
3.2.	Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Sejenis .....	100
3.3.	Realisasi Anggaran.....	101
IV.	Penutup .....	104
4.1.	Kesimpulan.....	104
4.2.	Rekomendasi.....	105
A.	Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan II 2024 .....	105
B.	Rekomendasi Triwulan IV 2024.....	105
LAMPIRAN	.....	106

## Daftar Gambar

Gambar 1. Wilayah Kerja BPSPL Padang Tahun 2024.....	2
Gambar 2. Komposisi SDM BPSPL Padang.....	2
Gambar 3. Struktur Organisasi BPSPL Padang.....	3
Gambar 4. Analisis SWOT Lingkungan Strategis BPSPL Padang.....	8
Gambar 5. Komposisi Pagu Anggaran BPSPL Padang Tahun 2024.....	11
Gambar 6. NKO BPSPL Padang Triwulan III 2024.....	13
Gambar 7. Realisasi Pendapatan PNB BPSPL Padang Triwulan III 2024.....	17
Gambar 8. Realisasi Penggunaan Dana PNB Hingga Triwulan III 2024 Lingkup BPSPL Padang.....	17
Gambar 9. Pelaksanaan Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPSPL Padang.....	22
Gambar 10. Rekapitulasi Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Hingga Triwulan III 2024.....	22
Gambar 11. Rekapitulasi Penilaian Teknis Perizinan Kesesuaian Ruang Laut Hingga Triwulan III 2024.....	23
Gambar 12. Pendampingan Pengusulan Penetapan KKPD oleh BPSPL Padang.....	28
Gambar 13. Dokumentasi Rapat Pokja Zonasi KK Bintan Tambelan.....	29
Gambar 14. Dokumentasi Lokakarya Persiapan Perancangan Zonasi KK di Perairan Bintan Tambelan.....	29
Gambar 15. Rapat Konsultasi Teknis Penetapan Kawasan Konservasi Bintan Tambelan.....	30
Gambar 16. Konsultasi Publik Penetapan Kawasan Konservasi Bintan Tambelan.....	32
Gambar 17. Dokumentasi Rapat Pokja Evaluasi Hasil Konsultasi Publik I Perencanaan Zonasi Kawasan Konservasi Bintan Tambelan.....	33
Gambar 18. Dokumentasi Penyampaian serta Penyerahan Dokumen Zonasi Final Penetapan Kawasan Konservasi Bintan Tambelan.....	34
Gambar 19. Dokumentasi FGD Pembentukan Pokja Kawasan Konservasi Rupa Utara.....	35
Gambar 20. Dokumentasi Survei dan Konsultasi Publik I Usulan Penetapan KK Rupa Utara.....	35
Gambar 21. Dokumentasi Rapat Pembahasan Awal Penetapan Pulau Maspari sebagai Kawasan Konservasi.....	36
Gambar 22. Dokumentasi Rapat Pembahasan Dokumen Awal Penetapan Pulau Maspari sebagai Kawasan Konservasi ke-2.....	37
Gambar 23. Dokumentasi FGD Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Provinsi Jambi.....	38
Gambar 24. Survei Biofisik, Bioekologi dan Sosial Ekonomi Kawasan Konservasi Perairan Sirombu.....	39
Gambar 25. Dokumentasi Pembahasan Draft PKS Bersama FKP USK.....	41
Gambar 26. Dokumentasi Pembahasan Draft PKS Bersama Tim Sekretariat DJPKRL.....	42
Gambar 27. Dokumentasi Penandatanganan PKS dengan FKP USK.....	42
Gambar 28. Dokumentasi Verifikasi Usulan Bantuan Konservasi Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang.....	46
Gambar 29. Dokumentasi Serah Terima Bantuan Konservasi kepada Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang.....	46
Gambar 30. Dokumentasi Serah Terima Bantuan Konservasi kepada Kelompok Kawasan Mandeh Blue Diving.....	47
Gambar 31. Dokumentasi Serah Terima Bantuan Konservasi kepada Kelompok LEPA.....	47
Gambar 32. Dokumentasi Supervisi Pendataan Sidat di Kabupaten Aceh Jaya.....	52
Gambar 33. Dokumentasi Pendataan Sidat di Kabupaten Aceh Besar.....	52
Gambar 34. Dokumentasi Pendataan Teripang di Pulau Sipora, Kabupaten Kep. Mentawai.....	53
Gambar 35. Dokumentasi Pendataan Penyu di Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	53
Gambar 36. Dokumentasi Pendataan Penyu di Pulau Salaut Besar.....	54
Gambar 37. Dokumentasi Pendataan dan Monitoring Terumbu Karang di Aceh Barat Daya.....	54
Gambar 38. Dokumentasi Pendataan dan Monitoring Terumbu Karang di Aceh Besar.....	54
Gambar 39. Dokumentasi Pendataan dan Monitoring Terumbu Karang di Pesisir Selatan.....	55
Gambar 40. Dokumentasi Survei Identifikasi Lokasi Rehabilitasi Terumbu Karang di Pasaman Barat.....	55
Gambar 41. Dokumentasi Survei Identifikasi Lokasi Rehabilitasi Terumbu Karang di Bintan.....	56
Gambar 42. Dokumentasi Rehabilitasi Karang di Pesisir Selatan.....	56
Gambar 43. Dokumentasi Rehabilitasi Karang di Bintan.....	57
Gambar 44. Dokumentasi Supervisi Pendataan Belida di Kabupaten Tebo.....	57
Gambar 45. Dokumentasi Supervisi Pendataan Belida di Kabupaten Muara Enim.....	57



Gambar 46. Dokumentasi Survei Sebaran Belida di Kabupaten Ogan Ilir .....	58
Gambar 47. Dokumentasi Survei Sebaran Belida di Kota Prabumulih.....	58
Gambar 48. Dokumentasi Survei Sebaran Belida di Kabupaten Bungo .....	58
Gambar 49. Status Eksploitasi Perikanan Berdasarkan Nilai SPR .....	59
Gambar 50. Dokumentasi Supervisi Pendataan Terubuk di Labuhan Batu .....	59
Gambar 51. Dokumentasi Supervisi Pendataan Terubuk di Kabupaten Bengkulu .....	59
Gambar 52. Dokumentasi Supervisi Pendataan Ikan Bilih di Danau Singkarak .....	59
Gambar 53. Dokumentasi Survei Potensi Pendataan Arwana di Kab. Sarolangun .....	60
Gambar 54. Dokumentasi Survei Pendataan Arwana di Kab. Ogan Ilir .....	61
Gambar 55. Dokumentasi Survei Potensi Pendataan Arwana di Kab. Muara Enim .....	61
Gambar 56. Dokumentasi Survei Potensi Pendataan Arwana di Kab. Rokan Hulu.....	62
Gambar 57. Dokumentasi Penanganan Jenis Ikan Terdampar .....	63
Gambar 58. Dokumentasi Sosialisasi Jenis Ikan Dilindungi di Kab. Muaro Jambi .....	63
Gambar 59. Dokumentasi Sosialisasi Jenis Ikan Dilindungi di Kab. Ogan Ilir .....	63
Gambar 60. Dokumentasi Sosialisasi Perlindungan Penyu di Kab. Bintang .....	64
Gambar 61. Dokumentasi Supervisi Pendataan Hiu dan Pari di PPS Lampulo, Kota Banda Aceh .....	67
Gambar 62. Dokumentasi Supervisi Pendataan Hiu dan Pari di Pelabuhan Labuhan Haji, Aceh Selatan .....	67
Gambar 63. Dokumentasi Supervisi Pendataan Hiu dan Pari di Pelabuhan Ujong Serangga, Aceh Barat Daya .....	67
Gambar 64. Dokumentasi Supervisi Pendataan Hiu dan Pari di PPN Sibolga .....	67
Gambar 65. Dokumentasi Pendataan Hiu dan Pari di Kabupaten Bengkulu .....	68
Gambar 66. Dokumentasi Pendataan Hiu dan Pari di Kabupaten Kepulauan Meranti .....	68
Gambar 67. Dokumentasi Pendataan Kuda Laut.....	68
Gambar 68. Dokumentasi Pendataan Napoleon di Natuna .....	69
Gambar 69. Dokumentasi Pendataan Pemanfaatan Sidat di Kabupaten Agam.....	69
Gambar 70. Dokumentasi Sosialisasi dan Identifikasi Pelaku Usaha Pemanfaatan ALSE di Kota Dumai .....	71
Gambar 71. Dokumentasi Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi .....	72
Gambar 72. Rekapitulasi Sampah pada Gernas Bulan Cinta Laut di Wilker BPSPL Padang .....	74
Gambar 73. Dokumentasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Padang .....	75
Gambar 74. Dokumentasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Batam .....	75
Gambar 75. Dokumentasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Tanjungpinang .....	75
Gambar 76. Dokumentasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kab. Deli Serdang .....	75
Gambar 77. Status Tindak Lanjut Hasil Pemantauan terhadap BPSPL Padang .....	91
Gambar 78. Dokumentasi Pemantauan terhadap Kelompok Banyu Biru .....	96
Gambar 79. Dokumentasi Pemantauan terhadap Pokmaswas Hiu Macan.....	96
Gambar 80. Dokumentasi Pemantauan terhadap Kelompok Poseidon Diver Mentawai .....	97



## Daftar Tabel

Tabel 1. Perjanjian Kinerja BPSPL Padang .....	9
Tabel 2. Penambahan Indikator Kinerja Tahun 2024 .....	10
Tabel 3. Rincian Klasifikasi Rincian Output yang Sempat Terdampak Blokir .....	11
Tabel 4. Rincian Capaian Kinerja BPSPL Padang pada Triwulan III 2024 .....	13
Tabel 5. Perbandingan Target dan Capaian IKU 1 .....	16
Tabel 6. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 1 .....	18
Tabel 7. Perbandingan Target dan Capaian IKU 2 .....	18
Tabel 8. Rincian Nelayan yang Terlibat dalam Gemas Bulan Cinta Laut .....	19
Tabel 9. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 2 .....	20
Tabel 10. Perbandingan Target dan Capaian IKU 3 .....	20
Tabel 11. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 3 BPSPL Padang .....	21
Tabel 12. Verifikasi Lapangan KKPRL di Wilayah Kerja BPSPL Padang Triwulan III 2024 .....	23
Tabel 13. Hasil Penilaian Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut .....	24
Tabel 14. Realisasi Anggaran Rincian Output Pendukung IKU 3 .....	26
Tabel 15. Perbandingan Target dan Capaian IKU 4 .....	26
Tabel 16. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 4 BPSPL Padang .....	27
Tabel 17. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 4 .....	39
Tabel 18. Perbandingan Target dan Capaian IKU 5 .....	40
Tabel 19. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 5 BPSPL Padang .....	40
Tabel 20. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 5 .....	42
Tabel 21. Perbandingan Target dan Capaian IKU 6 .....	43
Tabel 22. Penerima Bantuan Konservasi Hingga Triwulan III 2024 .....	43
Tabel 23. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 6 BPSPL Padang .....	45
Tabel 24. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 6 .....	48
Tabel 25. Perbandingan Target dan Capaian IKU 7 .....	48
Tabel 26. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 6 BPSPL Padang .....	49
Tabel 27. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 7 .....	49
Tabel 28. Perbandingan Target dan Capaian IKU 8 .....	50
Tabel 29. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 8 BPSPL Padang .....	51
Tabel 30. Hasil Survei Sebaran Teripang di Pulau Sipora .....	53
Tabel 31. Rekapitulasi Respon Cepat Penanganan Jenis Ikan Dilindungi .....	62
Tabel 32. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 8 .....	64
Tabel 33. Perbandingan Target dan Capaian IKU 9 .....	65
Tabel 34. Rincian Target dalam RPJMN yang Berkaitan dengan IKU 9 BPSPL Padang .....	65
Tabel 35. Rekapitulasi Pelayanan Jenis Triwulan III 2024 .....	66
Tabel 36. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 9 .....	69
Tabel 37. Perbandingan Target dan Capaian IKU 10 .....	70
Tabel 38. Realisasi Rincian Output Pendukung IKU 10 .....	72
Tabel 39. Perbandingan Target dan Capaian IKU 11 .....	73
Tabel 40. Rincian Target dalam RPJMN yang Berkaitan dengan IKU 11 BPSPL Padang .....	73
Tabel 41. Rincian Nelayan Gemas Bulan Cinta Laut yang Terverifikasi dan Tervalidasi .....	74
Tabel 42. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 11 .....	75
Tabel 43. Perbandingan Target dan Capaian IKM 12 .....	76
Tabel 44. Indikator Kinerja KKP Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 12 BPSPL Padang .....	77
Tabel 45. Perbandingan Target dan Capaian IKM 13 .....	78
Tabel 46. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 13 BPSPL Padang .....	78
Tabel 47. Perbandingan Target dan Capaian IKM 14 .....	79
Tabel 48. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 14 BPSPL Padang .....	80
Tabel 49. Hasil Penilaian Pemantauan Pembangunan Zona Integritas pada BPSPL Padang .....	81



Tabel 50. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKM 14 .....	82
Tabel 51. Perbandingan Target dan Capaian IKM 15 .....	82
Tabel 52. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 15 BPSPL Padang .....	83
Tabel 53. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKM 15 .....	84
Tabel 54. Perbandingan Target dan Capaian IKM 16 .....	84
Tabel 55. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 16 BPSPL Padang .....	85
Tabel 56. Nilai AKIP BPSPL Padang 2024 .....	85
Tabel 57. Realisasi Anggaran Rincian Output Pendukung IKM 16 .....	86
Tabel 58. Perbandingan Target dan Capaian IKM 17 .....	86
Tabel 59. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 17 BPSPL Padang .....	87
Tabel 60. Perbandingan Target dan Capaian IKM 18 .....	88
Tabel 61. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 18 BPSPL Padang .....	89
Tabel 62. Perbandingan Target dan Capaian IKM 19 .....	90
Tabel 63. Status Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Hingga Triwulan III 2024 .....	90
Tabel 64. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 19 BPSPL Padang .....	92
Tabel 65. Perbandingan Target dan Capaian IKM 20 .....	93
Tabel 66. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 20 BPSPL Padang .....	93
Tabel 67. Perbandingan Target dan Capaian IKM 21 .....	95
Tabel 68. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKM 21 .....	97
Tabel 69. Kriteria Nilai Pengawasan Kearsipan Internal .....	98
Tabel 70. Perbandingan Capaian BPSPL Padang dengan Unit Kerja Sejenis .....	100
Tabel 71. Realisasi Anggaran BPSPL Padang Hingga Triwulan III 2024 .....	101

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSPL Padang secara proposional dan profesional berupaya mencapai hasil yang baik dengan mengutamakan transparansi dan keterbukaan pada setiap kegiatan dengan cara melaporkan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) yang disusun setiap triwulan. LKj Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Triwulan III 2024 merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban atas pencapaian dari tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan selama periode tersebut, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam instruksi Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam penyajiannya, laporan ini dilengkapi dengan hasil capaian target dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan BPSPL Padang yang berpedoman pada sasaran strategis yang diturunkan dalam bentuk Indikator Kinerja (IK). Adapun hasil capaian kinerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana, prasarana, dan anggaran pendukung kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangan BPSPL Padang.

### 1.2 Tugas dan Fungsi

BPSPL Padang sebagai salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bawah naungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan, memiliki peran dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) yang berorientasi menyukseskan rencana pembangunan nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang termaktub dalam prioritas nasional yaitu lingkungan hidup, penanggulangan bencana yang dilaksanakan melalui konservasi dan pemanfaatan lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil disertai penguasaan dan pengelolaan risiko. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir adalah:

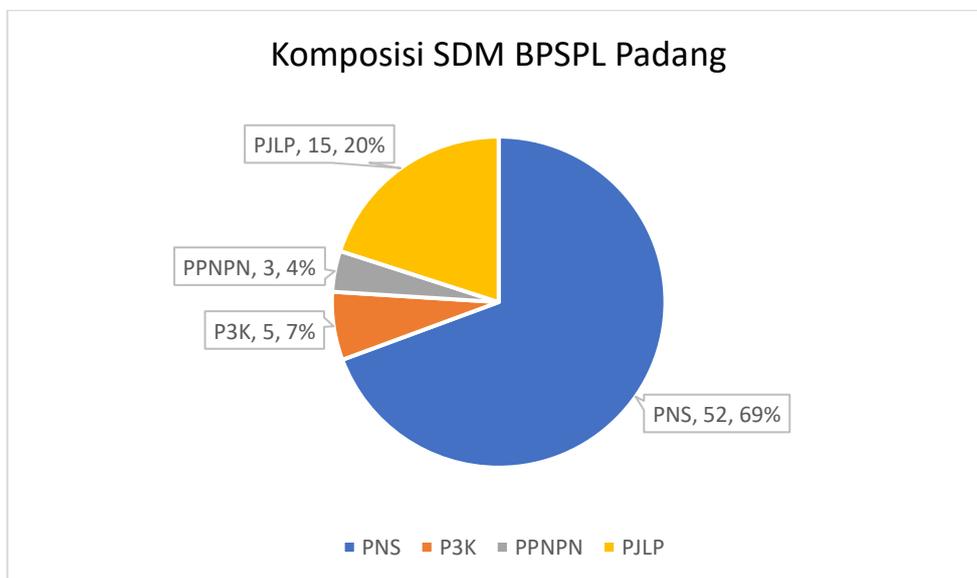
1. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
2. pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
3. pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
4. pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetic ikan;
5. pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
6. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
7. fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
8. pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
9. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

BPSPL Padang memiliki wilayah kerja meliputi tujuh (7) Provinsi se-Sumatera yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan yang mencakup 60 Kabupaten/Kota Pesisir se-Sumatera. Selain itu, BPSPL Padang juga memiliki kantor wilayah kerja/satuan kerja (Satker) dan gerai pelayanan di Medan, Tanjungpinang, Pekanbaru, Banda Aceh, Jambi, Palembang, dan Batam.



Gambar 1. Wilayah Kerja BPSPL Padang Tahun 2024

Total Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki BPSPL Padang hingga triwulan III 2024 dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi adalah 73 orang, yang terdiri dari 52 orang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 5 orang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), 3 orang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan 15 orang berstatus sebagai Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP). Lebih lanjut, mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tim Kerja lingkup BPSPL Padang terdiri dari empat tim, meliputi Perlindungan dan Pelestarian, Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut, dan Dukungan Manajemen.



Gambar 2. Komposisi SDM BPSPL Padang



Gambar 3. Struktur Organisasi BPSPL Padang

### 1.3 Perkembangan Lingkungan Kerja Strategis

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecilnya yang sangat potensial. Indonesia memiliki *megabiodiversity*, yang mencakup keanekaragaman genetic, spesies, dan ekosistem. Kondisi tersebut memberikan beragam manfaat melalui penyediaan jasa ekosistem, baik penyediaan makanan dan obat-obatan, sebagai penyangga kehidupan ekosistem, serta memberikan beragam manfaat ekonomi jika dikelola secara bijak. Pengelolaan yang bertanggung jawab memberikan *multiplier effect* yang akan mengantarkan pada kondisi lingkungan pesisir dan pulau kecil yang optimal sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang berketahanan pangan, berketahanan iklim dan meningkatkan kesejahteraan.

Wilayah kerja BPSPL Padang memiliki karakteristik perairan yang khas. Di bagian barat, khas dengan ekosistem pesisir yang dipengaruhi oleh dinamika perairan Samudera Hindia, sedangkan di bagian timur, khas dengan beragam tipe ekosistem yang dipengaruhi oleh kondisi perairan Selat Malaka. Kondisi tersebut memberikan beragam potensi keanekaragaman hayati yang melimpah. Berikut adalah beberapa potensi sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di wilayah kerja BPSPL Padang:

- 1) Perencanaan Ruang Laut  
Terdapat 5 RZWP3K yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur dari total 7 provinsi di wilayah kerja BPSPL Padang.
- 2) Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati Laut
  - a. Terdapat luas kawasan konservasi perairan daerah sebesar 3.004.683,25 Ha di wilayah kerja BPSPL Padang yang perlu didorong pengelolannya secara optimum;
  - b. Letak Indonesia yang berada di kawasan segitiga terumbu karang dunia (*coral triangle*), menjadikan Indonesia dipertimbangkan sebagai pusat keanekaragaman terumbu karang dunia. Sebanyak sekitar 569 jenis karang yang termasuk dalam 82 genus karang dijumpai di Indonesia. Berdasarkan kebijakan satu peta (*one map policy*) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011, dirilis bahwa luas terumbu karang di Indonesia berdasar analisis dari citra satelit adalah sekitar 2.517.858 Ha, dimana 19% atau sekitar 478.587 Ha diantaranya berada di Perairan Sumatera;
  - c. Terdapat 13 target kehati prioritas pengelolaan KKP di wilayah kerja BPSPL Padang meliputi: Penyu, Kuda Laut, Napoleon, Sidat, Teripang, Lola, Kima, Terubuk, Hiu, Pari dan mamalia laut (Paus, Dugong) serta Karang;
  - d. Keanekaragaman hayati endemik yang hanya dijumpai di selat Malaka, yaitu terubuk jenis *Tenualosa iliisha* yang salah satu habitat pentingnya ada di Labuhan Batu, dan jenis *Tenualosa macrura* yang ada di selat Bengkalis;
  - e. Keberadaan Penyu Belimbing di Betumonga yang merupakan salah satu jenis penyu langka di Wilayah Kerja BPSPL Padang;
  - f. Telah dilakukan upaya monitoring secara berkesinambungan melalui pendataan penyu belimbing di site betumonga (sejak tahun 2019), pendaratan Hiu dan Pari di Sibolga dan Aceh Selatan (sejak tahun 2019) serta Kuda Laut di Bintan (sejak tahun 2018);
  - g. Terdapat potensi kelompok penggerak konservasi dengan kegiatan berupa perlindungan jenis, kawasan dan ekosistem pesisir di wilayah kerja BPSPL Padang sejumlah 40 kelompok.
  - h. Pangsa pasar internasional produk hiu pari non appendiks CITES meliputi beberapa negara antara lain Singapura, Malaysia, Thailand, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, China, Italia. Spanyol, hingga Meksiko.
- 3) Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  - a. Potensi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) sejumlah 39 PPKT di wilayah kerja BPSPL Padang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017;

- b. Potensi luasan ekosistem mangrove di wilayah kerja BPSPL Padang sejumlah 810.171 Ha. Berdasarkan data yang dikeluarkan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, KLHK, tahun 2020, Indonesia memiliki areal seluas 3.329.219 Ha. 16,43% luasan mangrove nasional tersebut berada di wilayah kerja BPSPL Padang, atau seluas 547,022 Ha, yang tersebar di Provinsi Aceh (32.824 Ha), Provinsi Sumatera Utara (57.898 Ha), Provinsi Sumatera Barat (18.084 Ha), Provinsi Sumatera Selatan (158.845 Ha), Provinsi Jambi (10.082 Ha), Provinsi Riau (212.857 Ha), dan Kepulauan Riau (56.432 Ha). Provinsi Riau merupakan Provinsi yang memiliki luasan mangrove terluas di wilayah kerja BPSPL Padang, yaitu 38,91%, sedangkan Provinsi terendah luasannya adalah Provinsi Jambi yang hanya sebesar 1,84%.
  - c. Terdapat potensi kelompok pegiat mangrove di pesisir wilayah kerja BPSPL Padang sejumlah 49 Kelompok.
- 4) Pemanfaatan Jasa Kelautan
- a. Potensi petambak garam tradisional di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bireun Provinsi Aceh;
  - b. Potensi distributor dan pengolah garam di Kab. Bireun yang telah berstandar nasional dengan jangkauan pasar regional;
  - c. Terdapat potensi jenis biota yang dapat dimanfaatkan sebagai produk biofarmakologi berupa rumput laut, kuda laut dan teripang;
  - d. Kawasan pesisir di Sibolga termasuk dala Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Sibolga dan sekitarnya yang dapat didukung pengembangannya melalui Desa Wisata

Seiring dengan perkembangannya, potensi yang dimiliki tersebut dapat menghasilkan tantangan dan permasalahan dalam pengelolaannya. Pada saat ini, BPSPL Padang memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui berbagai program dan kegiatan. Sebagian tantangan tersebut adalah program dan kegiatan yang belum diselesaikan pada periode sebelumnya dan sebagiannya lagi adalah tantangan terhadap dinamika kebijakan program pembangunan yang semakin kompleks. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

- 1) Banyaknya kepentingan yang memanfaatkan ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga terjadi tumpang tindih pemanfaatan sumberdaya di dalamnya. Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan yang kurang memperhatikan daya tampung dan daya dukungnya. Tarik menarik antar beragam kepentingan terhadap ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil menyebabkan beberapa provinsi di wilayah kerja BPSPL Padang, menjadi terkendala dalam upaya pengesahan ranperda RZWP3K nya, yang diharapkan mampu menjadi alat pengendalian pemanfaatan potensi sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Dalam rentang waktu 2015–2020, dari 7 Provinsi di wilayah kerja BPSPL Padang, 2 di antaranya masih belum dapat disahkan menjadi produk hukum sehingga perlu program akselerasi dan pendampingan yang lebih intensif, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, tantangan secara lebih spesifik, adalah penyelesaian potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang laut diselesaikan melalui Penyusunan rencana zonasi antara kawasan (RZ KAW), rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu (RZ-KSNT);
- 2) Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebabkan perubahan tata Kelola terkait pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Salah satunya adalah amanat untuk mengintegrasikan RTRW dan RZWP3K menjadi satu produk hukum tata ruang sebagai rujukan pemanfaatan ruang dan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Proses integrasi tersebut menjadi tantangan untuk dapat diselesaikan melalui program dan kegiatan akselerasi dan pendampingan penyusunannya. Proses integrasi tersebut merupakan suatu terobosan penting dalam melihat ruang perairan dan darat dalam satu persepektif integratif dan holistik. Namun demikian ada banyak penyesuaian substansi dan administrasi sehingga menghasilkan suatu produk hukum yang berkualitas, memenuhi kaidah keberlanjutan dan partisipasi masyarakat;

- 3) Pemanfaatan ruang laut dan potensi sumber daya di dalamnya perlu dikelola melalui mekanisme pengendalian dan pengawasan sehingga pemanfaatannya dapat dipastikan mengikuti koridor keberlanjutan dan kesesuaian dengan rencana tata ruang laut yang disusun. Pengendalian dan pengawasan tersebut dilakukan dengan program dan kegiatan operasionalisasi permohonan kesesuaian pemanfaatan ruang laut yang diwujudkan melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL);
- 4) Dalam rangka memenuhi Aichi Target yang memandatkan perlunya melakukan konservasi seluas 10% dari luas perairan, pesisir dan pulau kecil atau sekitar 32,5 juta Ha. Di wilayah kerja BPSPL Padang, kawasan konservasi perairan ada di semua Provinsi namun pengelolaannya belum efektif termasuk di dalamnya adalah upaya peningkatan status perlindungan kawasan konservasi yang baru pada status pencadangan dan belum ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana luasan kawasan konservasi yang akan dicapai dapat berjalan beriringan dengan efektivitas pengelolaannya sehingga keberadaan kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan sumber daya laut dan peningkatan kesejahteraan serta nilai ekonomi kawasan. Salah satu program dan kegiatan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yaitu mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- 5) Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES belum optimal. KKP sebagai Otoritas Manajemen CITES perlu dilakukan penguatan dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*. Dalam implementasinya, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dalam pelayanan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk appendiks CITES termasuk di dalamnya pengembangan ilmu dan teknologi. Tantangan selanjutnya adalah terkait adanya rencana pelimpahan kewenangan/management authorities untuk jenis ikan bersirip (pisces) dari KLHK kepada KKP. Terkait hal itu, maka UPT diharapkan mampu menyelenggarakan issue perdagangan jenis ikan yang sebelumnya dikelola oleh KLHK, dimana di dalamnya mencakup perijinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Salah satu dari jenis ikan tersebut adalah ikan Arwana, dimana komoditas tersebut termasuk banyak diperdagangkan di Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Selatan;
- 6) Wilayah kerja BPSPL Padang, memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi, meliputi kuda laut, teripang, lola, kima, hiu-pari, mamalia laut, napoleon, dugong, penyu, sidat, terumbu karang, terubuk, ikan purba, dan beragam jenis kehati lainnya. Keberadaannya semakin terancam akibat semakin meningkatnya tekanan habitat di alam oleh aktivitas antropogenik meliputi over-eksploitasi, *bycatch*, *spesies invasive*, kerusakan habitat, dan lain sebagainya. Permasalahan ini mendorong perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengelolaan kehati agar dapat terjaga habitat dan keanekaragaman hayati di dalamnya sesuai dengan kerangka rencana aksi dari masing-masing keanekaragaman hayati prioritas pengelolaan. Kondisi tersebut diperparah dengan asih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian biota laut yang dilindungi. Hal ini terus dilakukan kegiatan sosialisasi jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk dalam appendiks CITES kepada masyarakat;
- 7) Meningkatnya dampak negatif adanya fenomena perubahan iklim menyebabkan permasalahan ketahanan pesisir, diantaranya adalah ancaman abrasi pantai yang dapat merusak ekosistem pesisir serta kerusakan ekosistem terumbu karang akibat adanya *coral bleaching*. Hal ini dilakukan melalui rehabilitasi pesisir dengan program dan kegiatan penanaman mangrove dan pembangunan pelindung pantai serta

penguatan ketahanan sosial masyarakat pesisir melalui peningkatan nilai ekonomi kawasan ekosistem mangrove. Program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi upaya mitigasi dan adaptasi terhadap adanya fenomena perubahan iklim di pesisir dan pulau-pulau kecil;

- 8) Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, merupakan salah satu jalur transportasi laut yang cukup padat. Kondisi tersebut membawa dampak terjadinya peningkatan pencemaran pesisir dan laut dengan meningkatnya intensitas kejadian tumpahan minyak. Kondisi tersebut mengancam keberlanjutan keanekaragaman hayati dan habitatnya. Sehingga perlu adanya program dan kegiatan yang dapat menjawab tantangan dari permasalahan tersebut;
- 9) Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan, dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem untuk penguatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem. BPSPL Padang telah diberikan mandat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam penatakelolaan dan pendayagunaan PPKT agar menjadi objek dan asset pembangunan yang bernilai strategis untuk meningkatkan daya guna lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan negara. Dari 111 PPKT, 39 PPKT berada di wilayah kerja BPSPL Padang, yaitu 7 PPKT di Provinsi Aceh, 3 PPKT di Provinsi Sumatera Utara, 3 PPKT di Provinsi Sumatera Barat, 22 PPKT di Provinsi Kepri, dan 4 PPKT di Provinsi Riau.
- 10) pemanfaatan ekonomi kelautan seperti pengelolaan produksi garam yang belum optimal. Sehingga perlu dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur yang lebih memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu pemanfaatan ekonomi kelautan lainnya seperti biofarmakologi laut dan wisata bahari perlu ditingkatkan kualitas pengelolaannya serta jasa kelautan terkait lainnya

Lebih lanjut, pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil tidak dapat dilepaskan dari perkembangan lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal, yang tercantum dalam analisis *strength, weakness, opportunities, threat* (SWOT) berikut ini.



Gambar 4. Analisis SWOT Lingkungan Strategis BPSPL Padang

## 1.4 Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Kinerja ini bertujuan untuk menginformasikan capaian kinerja triwulan III pada tahun 2024. Adapun capaian kinerja triwulan III 2024 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum terkait BPSPL Padang beserta perkembangan lingkungan kerja strategis.
2. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menyajikan uraian rencana strategis berisi visi dan misi organisasi serta perjanjian kinerja BPSPL Padang tahun 2024.
3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja organisasi beserta analisis- analisis pendukungnya.
4. **Bab IV Penutup**, menyajikan simpulan umum serta langkah-langkah strategis pada masa mendatang.
5. **Lampiran**, melampirkan data-data pendukung laporan.

## II. Perencanaan Kinerja

### 2.1. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Dalam upaya mendukung visi, misi, dan *grand strategy* KKP dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL), BPSPL Padang memiliki tugas-tugas yang dituangkan dalam kegiatan dan Indikator Kinerja (IK). Oleh karena itu, pelaksanaan Tugas dan kegiatan yang menjadi kewenangan BPSPL Padang berpedoman pada sasaran kegiatan yang diturunkan pada IK sebagai target yang akan dicapai selama periode tahun anggaran. Dalam perkembangannya, pada tahun 2024 ini terdapat sebelas (11) sasaran kegiatan dan 22 indikator kinerja yang dimandatkan kepada BPSPL Padang. Adapun sasaran kegiatan dan IK tersebut termuat dalam Perjanjian Kinerja BPSPL Padang 2024 yang disajikan dalam tabel berikut (secara lengkap ditampilkan dalam Lampiran 1).

Tabel 1. Perjanjian Kinerja BPSPL Padang

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya nilai PNBP BPSPL Padang	1	Nilai PNBP BPSPL Padang (Rp.000)	650.000
2	Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang	2	Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang (Orang)	320
3	Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Padang	3	Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	3
4	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan Kawasan konservasi di tingkat daerah di wilayah kerja BPSPL Padang	4	Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Daerah)	3
5	Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerja sama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di wilayah kerja BPSPL Padang	5	Kerjasama konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)	1
6	Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang	6	Bantuan pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja BPSPL Padang (Kelompok)	3
		7	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Padang yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencarian Baru (Kelompok)	1
7	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Padang	8	Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Padang (Jenis)	8
8	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Padang	9	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	5
9	Terfasilitasinya pemanfaatan Air Laut Selain Energi di wilayah kerja BPSPL Padang	10	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Padang	1
10	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran	11	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di wilayah kerja BPSPL Padang (Kawasan)	4
11	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Padang	12	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Padang (nilai)	93,76
		13	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Padang (nilai)	86

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		14 Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Padang (Nilai)	75
		15 Indeks profesionalitas ASN lingkup BPSPL Padang (indeks)	88
		16 Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Padang (nilai)	81
		17 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Padang (Dokumen)	4
		18 Persentase unit kerja lingkup BPSPL Padang yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		19 Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Padang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		20 Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup BPSPL Padang (%)	100
		21 Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup BPSPL Padang (%)	80
		22 Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Padang (Nilai)	65

Dalam perkembangannya, terdapat arahan untuk revisi Perjanjian Kinerja tentang Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran. Mengacu pada Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 3250/SJ.2/TU.210/IX/2024 tanggal 12 September 2024 hal Revisi Target dan Manual IKU NKA KKP TA. 2024, terdapat perubahan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran beserta targetnya, yaitu menjadi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan target 71. Adapun revisi Perjanjian Kinerja yang mengakomodir arahan tersebut sedang dalam proses.

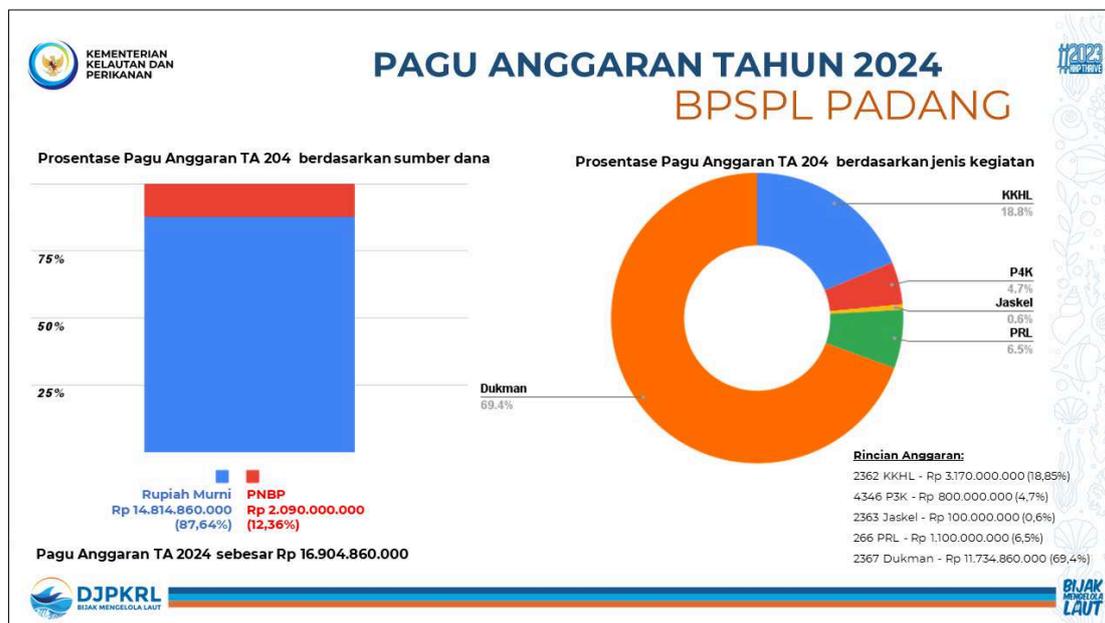
Lebih lanjut, pada tahun 2023 lalu, setelah melalui dinamika revisi Perjanjian Kinerja, terdapat enam belas indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja tahun 2023. Ditinjau dari komposisinya, pada tahun 2024 ini terdapat penambahan beberapa indikator kinerja baru. Penambahan indikator kinerja tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Penambahan Indikator Kinerja Tahun 2024

Nomor	Indikator Kinerja	Keterangan
1	Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang (Orang)	Indikator Kinerja baru yang tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2023
2	Kerjasama konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)	Indikator Kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 namun tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2023
3	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Padang yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)	Indikator Kinerja yang sempat terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 namun berakhir tidak diukur pada periode tersebut karena anggaran pendukungnya terblokir hingga akhir tahun
4	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Padang	Indikator Kinerja baru yang tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2023
5	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di wilayah kerja BPSPL Padang (Kawasan)	Indikator Kinerja yang sempat terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 namun berakhir tidak diukur pada periode tersebut karena anggaran pendukungnya terblokir hingga akhir tahun
6	Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Padang (Nilai)	Indikator Kinerja baru yang tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2023

## 2.2 Postur Anggaran 2024

Dalam rangka mendukung pencapaian target-target kinerja, pada tahun 2024 ini BPSPL Padang didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP-DIPA 032.07.2.499346/2024 sebesar **Rp16.904.860.000,00** (Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Dari total anggaran tersebut, 87,64% bersumber dari Rupiah Murni sementara 12,36% bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).



Gambar 5. Komposisi Pagu Anggaran BPSPL Padang Tahun 2024

Saat pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024 tanggal 24 November 2023, terdapat blokir anggaran senilai Rp659.800.000,00 pada tiga Klasifikasi Rincian Output (KRO). Dalam perkembangannya, telah dibuka blokir pada KRO [2367.CAN] Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi senilai Rp172.800.000,00 yang bersumber dari PNBP dalam pengesahan Rincian Kerja dan Anggaran Revisi ke-4 tanggal 28 Maret 2024. Perkembangan tersebut menyisakan blokir pada dua KRO, yaitu [2362.REA] Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem dan [2362.REB] Konservasi Jenis/Spesies karena memerlukan persetujuan Bappenas dan Kementerian Keuangan. Lebih lanjut, dilaksanakan penelaahan usulan revisi buka blokir BPSPL Padang yang mengacu pada Surat a.n Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kepala Subdirektorat Anggaran Bidang Pertanian, Kelautan, dan Kehutanan Nomor UND-83/AG.3/AG.31/2024 tanggal 19 Juni 2024. Hasil penelaahan tersebut menghasilkan disetujuinya usulan pembukaan blokir kedua KRO yang terdampak blokir dalam Rincian Kerja dan Anggaran revisi ke-7 tanggal 20 Juni 2024.

Tabel 3. Rincian Klasifikasi Rincian Output yang Sempat Terdampak Blokir

No	Klasifikasi Rincian Output	Total Blokir		Status
		Sumber Dana Rupiah Murni (Rp)	Sumber Dana PNBP (Rp)	
1	[2362.REA] Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	100.000.000,00	100.000.000,00	Buka blokir yang disahkan dalam Rincian Kerja dan Anggaran Revisi ke-7 tanggal 20 Juni 2024 dengan perubahan Klasifikasi Rincian Output menjadi [2362.SCC] Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan



No	Klasifikasi Rincian Output	Total Blokir		Status
		Sumber Dana Rupiah Murni (Rp)	Sumber Dana PNBP (Rp)	
2	[2362.REB] Konservasi Jenis/Spesies	-	172.800.000,00	Buka blokir yang disahkan dalam Rincian Kerja dan Anggaran Revisi ke-7 tanggal 20 Juni 2024 dengan perubahan Klasifikasi Rincian Output [2362.RAL] Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
3	[2367.CAN] Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	287.000.000,00	Buka blokir yang disahkan dalam Rincian Kerja dan Anggaran Revisi ke-4 tanggal 28 Maret 2024

### III. Akuntabilitas Kinerja

#### 3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Padang dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dari masing-masing indikator kinerja. Adapun pengukuran kinerja ini dilakukan dengan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) melalui laman <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh BPSPL Padang periode triwulan III 2024 adalah **117,50 (kategori istimewa)**.



Gambar 6. NKO BPSPL Padang Triwulan III 2024

Pada tahun 2023 ini, Perjanjian Kinerja BPSPL Padang terdiri dari sebelas (11) sasaran strategis dan 22 indikator kinerja dengan periode capaian triwulanan, semesteran, dan tahunan. Sementara itu, rincian target dan capaian kinerja BPSPL Padang pada triwulan III 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. Rincian Capaian Kinerja BPSPL Padang pada Triwulan III 2024

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERIODE PENGUKURAN	TARGET TW III 2024	CAPAIAN TW III 2024	PERSENTASE CAPAIAN
1	Meningkatnya nilai PNBP BPSPL Padang	1 Nilai PNBP BPSPL Padang (Rp.000)	Tahunan	-	-	-
2	Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang	2 Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang (Orang)	Tahunan	-	-	-
3	Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Padang	3 Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	Tahunan	-	-	-
4	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan Kawasan konservasi di tingkat	4 Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di wilayah	Tahunan	-	-	-



No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERIODE PENGUKURAN	TARGET TW III 2024	CAPAIAN TW III 2024	PERSENTASE CAPAIAN
	daerah di wilayah kerja BPSPL Padang	kerja BPSPL Padang (Daerah)				
5	Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerja sama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di wilayah kerja BPSPL Padang	5 Kerjasama konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)	Tahunan	-	-	-
6	Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang	6 Bantuan pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja BPSPL Padang (Kelompok)	Triwulanan	2	3	200 atau 120 berdasarkan aplikasi Kinerjaaku
		7 Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Padang yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)	Tahunan	-	-	-
7	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Padang	8 Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Padang (Jenis)	Tahunan	-	-	-
8	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Padang	9 Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	Tahunan	-	-	-
9	Terfasilitasinya pemanfaatan Air Laut Selain Energi di wilayah kerja BPSPL Padang	10 Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Padang	Tahunan	-	-	-
10	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran	11 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di wilayah kerja BPSPL Padang (Kawasan)	Tahunan	-	-	-



No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERIODE PENGUKURAN	TARGET TW III 2024	CAPAIAN TW III 2024	PERSENTASE CAPAIAN	
11	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Padang	12	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Padang (nilai)	Semesteran	-	-	-
		13	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Padang (nilai)	Tahunan	-	-	-
		14	Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Padang (Nilai)	Tahunan	-	-	-
		15	Indeks profesionalitas ASN lingkup BPSPL Padang (indeks)	Semesteran	-	-	-
		16	Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Padang (nilai)	Tahunan	-	-	-
		17	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Padang (Dokumen)	Triwulanan	3	3	100
		18	Persentase unit kerja lingkup BPSPL Padang yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	Triwulanan	94	133,33	141,84 atau 120 berdasarkan aplikasi Kinerjaaku
		19	Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Padang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	Triwulanan	80	100	125 atau 120 berdasarkan aplikasi Kinerjaaku
		20	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup BPSPL Padang (%)	Tahunan	-	-	-
		21	Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup BPSPL Padang (%)	Tahunan	-	-	-
		22	Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Padang (Nilai)	Tahunan	-	-	-

## IKU. 1. Nilai PNBP BPSPL Padang (Rp.000)

Penerimaan Negara Bukan Pajak BPSPL Padang adalah seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa kegiatan pengelolaan ruang laut, meliputi Pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya, pengelolaan BMN, denda dan lain-lain.

$$PNBP_{BPSPL\ Padang} = PNBP_{Layanan} + PNBP_{BMN} + PNBP_{Lainnya}$$

PNBP<sub>Layanan</sub> : Nilai PNBP yang berasal dari Pendapatan Perizinan Lainnya dan Jasa Kelautan dan Perikanan.

PNBP<sub>BMN</sub> : Nilai PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

PNBP<sub>Lainnya</sub> : Nilai PNBP yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi dan Denda yang tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi.

### A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Rincian target IKU 1 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. Perbandingan Target dan Capaian IKU 1

IKU 1. Nilai PNBP BPSPL Padang (Rp.000)				
Realisasi	Triwulan III 2024			
Triwulan III 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	-	-	-	-

Pada periode triwulan III 2024, belum terdapat capaian terhadap IKU ini karena ditargetkan dengan periode tahunan. Capaian IKU ini didukung oleh perolehan PNBP yang berasal dari pendapatan perizinan, pengelolaan Barang Milik Negara, dan Tuntutan Ganti Rugi dan Denda yang tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi.

### B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya

Pada tahun 2023 dan 2024, IKU ini memiliki target tahunan sehingga tidak terdapat perbandingan capaian pada triwulan III.

### C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Berjalan dengan target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan III 2024 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Dalam hal ini, indikator nilai PNBP tidak terdapat pada Rencana Strategis DJPRL 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan.

Ditinjau dari standar nasional, Indikator kinerja Nilai PNBP juga tidak termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024. Maka dari itu, tidak terdapat capaian kinerja yang dapat dibandingkan dengan standar nasional.

### D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKU ini didukung dengan penggunaan aplikasi dan kompetensi tim pengelola PNBP. Aplikasi yang digunakan dalam PNBP layanan, yaitu e-SAJI dan SIMPONI, dapat mempermudah proses pemungutan PNBP dan mempersingkat waktu pelayanan. Namun, ada kalanya aplikasi-aplikasi tersebut mengalami gangguan atau *maintenance*. Maka dari itu, menghadapi kemungkinan tersebut, tim pelayanan dan pengelola PNBP BPSPL

Padang mengantisipasi risiko tersebut dengan menyiapkan format pencatatan dan penghitungan PNBP secara manual.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi yang didukung oleh penggunaan aplikasi e-SAJI, e-Sultan's, dan SIMPONI. Aplikasi e-SAJI merupakan aplikasi untuk memproses layanan perizinan rekomendasi dan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) untuk jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES. Sementara itu, e-Sultan's merupakan platform yang dikelola oleh BPSPL Padang untuk optimalisasi layanan yang belum terakomodir pada aplikasi e-SAJI, yaitu permohonan Berita Acara Verifikasi Lapang (BAVL) Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI), permohonan pemeriksaan keberangkatan/kedatangan SAJI, permohonan Berita Acara Pemeriksaan Stok, dan permohonan Berita Acara Kematian Ikan Arwana. Terakhir, aplikasi SIMPONI juga mendukung proses layanan dalam penerbitan billing PNBP. Adanya aplikasi tersebut dapat menunjang pelaksanaan layanan hingga pemungutan PNBP secara tersistem.

### E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

#### 1. Perolehan PNBP hingga Triwulan III 2024

Realisasi pendapatan PNBP Triwulan III 2024 disajikan pada gambar berikut.

NO	Kode Akun  Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	411121   Pendapatan PPh Pasal 21	0	0	0	0	0	0	0
2	425131   Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	325,215	0	0	3,273,830	0	3,599,045
3	425259   Pendapatan Perizinan Lainnya	0	206,010,000	0	0	0	0	206,010,000
4	425912   Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	425,500	0	0	0	0	425,500
5	425122   Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	187,832,107	0	0	0	0	187,832,107
6	425629   Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	499,856,241	0	0	0	0	499,856,241
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>894,449,063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,273,830</b>	<b>0</b>	<b>897,722,893</b>

Gambar 7. Realisasi Pendapatan PNBP BPSPL Padang Triwulan III 2024  
 Sumber: Aplikasi OM-SPAN, Oktober 2024

#### 2. Penggunaan Dana PNBP di BPSPL Padang

Pada tahun 2024, terdapat proporsi pagu anggaran BPSPL Padang yang bersumber dari PNBP sebesar Rp2.090.000.000,00 atau 12,36% dari keseluruhan pagu anggaran. Berikut adalah rincian anggaran yang bersumber dari PNBP beserta realisasinya. Realisasi anggaran yang bersumber dari PNBP hingga triwulan III telah mencapai 62,62%.

NO	(Kode) Sumber Dana	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	(A) RUPIAH MURNI	PAGU REALISASI	7.230.000.000 (80,65%)	7.204.110.000 (75,12%)	360.750.000 (99,79%)	0	0	0	0	0	0	14.814.860.000 (78,46%)
		SISA	1.398.817.326	1.792.063.989	794.007	0	0	0	0	0	0	3.191.675.322
2	(D) PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PAGU REALISASI	0	1.917.200.000 (68,90%)	172.800.000 (93,96%)	0	0	0	0	0	0	2.090.000.000 (82,62%)
		SISA	0	770.708.155	10.444.740	0	0	0	0	0	0	781.152.895
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>PAGU REALISASI</b>	<b>7.230.000.000 (80,65%)</b>	<b>9.121.310.000 (71,90%)</b>	<b>553.550.000 (87,37%)</b>	<b>0 (0,00%)</b>	<b>0 (0,00%)</b>	<b>0 (0,00%)</b>	<b>0 (0,00%)</b>	<b>0 (0,00%)</b>	<b>0 (0,00%)</b>	<b>16.904.860.000 (12,932,031,783 (76,50%))</b>
		<b>SISA</b>	<b>1.398.817.326</b>	<b>2.562.772.144</b>	<b>11.238.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.972.828.217</b>

Gambar 8. Realisasi Penggunaan Dana PNBP Hingga Triwulan III 2024 Lingkup BPSPL Padang

## F. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU 1 didukung dengan kegiatan pelayanan peredaran jenis yang memiliki alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.REB] Konservasi Jenis/Spesies dengan Rincian Output (RO) [2362.REB.002] Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dikelola Pemanfaatannya secara Berkelanjutan. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 6. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 1

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2362.REB.002.052] Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan Appendiks CITES	864.850.000,00	604.219.588,00	69,86
<b>Total</b>		<b>864.850.000,00</b>	<b>604.219.588,00</b>	<b>69,86</b>

Realisasi anggaran komponen [2362.REB.002.052] adalah 69,86% yang digunakan untuk perjalanan pemeriksaan, verifikasi lapangan, dan sosialisasi kepada pelaku usaha pemanfaat jenis ikan.

## IKU. 2. Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat di Balai pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa, yang menerima manfaat, dan/atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun nonfisik. Tenaga kerja berasal dari perhitungan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut oleh Balai pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang.

$$TK_{BPSPL \text{ Padang}} = TK_{Lokasi \ 1} + TK_{Lokasi \ 2} + TK_{Lokasi \ 3} + TK_{Lokasi \ 4}$$

Keterangan:

$TK_{BPSPL \text{ Padang}}$  = Jumlah tenaga kerja BPSPL Padang

$TK_{Lokasi \ 1}$  = Jumlah tenaga kerja dalam Gerakan nasional bulan cinta laut di Lokasi 1.

$TK_{Lokasi \ 2}$  = Jumlah tenaga kerja dalam Gerakan nasional bulan cinta laut di Lokasi 2.

$TK_{Lokasi \ 3}$  = Jumlah tenaga kerja dalam Gerakan nasional bulan cinta laut di Lokasi 3.

$TK_{Lokasi \ 4}$  = Jumlah tenaga kerja dalam Gerakan nasional bulan cinta laut di Lokasi 4.

### A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Rincian target IKU 2 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7. Perbandingan Target dan Capaian IKU 2

IKU. 2. Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Orang)				
Realisasi Triwulan III 2023	Triwulan III 2024			
	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	-	-	-	-

Pada periode triwulan III 2024, belum terdapat capaian terhadap IKU ini karena ditargetkan dengan periode tahunan. Capaian IKU ini didukung oleh keterlibatan nelayan dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut.

### B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya

IKU ini tidak terdapat pada tahun 2023 sehingga tidak terdapat perbandingan capaian antara triwulan III 2023 dan triwulan III 2024.

### C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan III 2024 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Dalam hal ini, indikator Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut tidak terdapat pada Rencana Strategis DJPRL tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan.

Ditinjau dari standar nasional, Indikator kinerja Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut juga tidak termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024. Maka dari itu, tidak terdapat capaian kinerja yang dapat dibandingkan dengan standar nasional.

### D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil analisis, pencapaian IKU ini didukung oleh partisipasi aktif nelayan dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut. Pada tahun 2024, Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut dilaksanakan di empat lokasi wilayah kerja BPSPL Padang, yaitu Kota Padang, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Deli Serdang. Hingga triwulan III, rangkaian kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut meliputi sosialisasi, penimbangan sampah, dan bimbingan teknis telah dilaksanakan.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada pelibatan tim dari wilayah kerja terdekat selama pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut. Selain itu, efisiensi sumber daya juga terdapat pada pelibatan mitra stakeholder terkait selama penyelenggaraan kegiatan.

### E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya pencapaian IKU ini didukung oleh pelaksanaan rangkaian Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang. Berdasarkan hasil identifikasi calon lokasi, disepakati bahwa lokasi pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang adalah Kota Batam, Kota Padang, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Deli Serdang. Berikut adalah rincian jumlah nelayan yang terlibat di masing-masing lokasi.

Tabel 8. Rincian Nelayan yang Terlibat dalam Gernas Bulan Cinta Laut

No	Lokasi	Jumlah Nelayan yang Terlibat (Orang)
1	Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	93
2	Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat	87
3	Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	73
4	Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara	70
<b>Total</b>		<b>323</b>

### F. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU 2 didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [4346.QDD] Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat dengan Rincian Output (RO) [4346.QDD.001] Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 9. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 2

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[4346.QDD.001.051] Aksi Penanggulangan Dampak Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	800.000.000,00	655.929.037,00	81,99
<b>Total</b>		<b>800.000.000,00</b>	<b>655.929.037,00</b>	<b>81,99</b>

### IKU. 3. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)

Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan melalui kegiatan identifikasi/verifikasi, sosialisasi dan monitoring pemanfaatan ruang laut. Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan ini meliputi:

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 35, bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui: (a) ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; (b) pemberian insentif dan disinsentif; dan (c) pengenaan sanksi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut melalui: 1) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), (2) Persetujuan KKPR;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Pasal 113 (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian ruang laut wajib memiliki KKPR.

IKU ini tercapai dengan menginventarisasi dan menjumlahkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kegiatan sosialisasi, monitoring/identifikasi pemanfaatan ruang laut yang eksisting, dan/ atau Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPSPL Padang yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

#### A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Rincian target IKU 3 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 10. Perbandingan Target dan Capaian IKU 3

IKU 3. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)				
Realisasi Triwulan III 2023	Triwulan III 2024			
	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	-	-	-	-

Pada periode triwulan III 2024, belum terdapat capaian terhadap IKU ini. IKU ini merupakan indikator kinerja yang ditargetkan dengan periode tahunan. Capaian IKU ini didukung oleh kegiatan identifikasi/verifikasi, sosialisasi perizinan pemanfaatan ruang laut, penilaian teknis, penilaian lapangan, dan monitoring perizinan pemanfaatan ruang laut.

#### B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya

Pada tahun 2023 dan 2024, IKU ini memiliki target tahunan sehingga tidak terdapat perbandingan capaian pada triwulan III.

#### C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan III 2024 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Tidak terdapat indikator kinerja pada Rencana Strategis DJPRL yang dapat dibandingkan langsung dengan indikator ini. Indikator pada Rencana Strategis DJPRL memiliki rincian yang sama dengan Rincian Target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dijadikan acuan pada perbandingan dengan standar nasional.

Tabel 11. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 3 BPSPL Padang

Program	Indikator	Indikasi Target					Lokasi
		2020	2021	2022	2023	2024	
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	Jumlah perizinan lokasi di wilayah perairan pesisir dan laut	10	12	14	16	18	34 Provinsi
	Jumlah lokasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah	12	27	26	40	46	34 Provinsi

Dalam hal ini, indikator kinerja Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang merupakan indikator pendukung dalam pencapaian target Renstra DJPRL dan RPJMN 2020-2024 karena memiliki nomenklatur dan satuan berbeda. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dan standar nasional, indikator kinerja ini memiliki sifat kontributif yang tidak dapat dibandingkan capaiannya.

#### D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil analisis, pencapaian IKU ini didukung oleh kelengkapan data dan informasi yang diperoleh dari lapangan dan kooperasi dari pelaku usaha. Hingga triwulan III, BPSPL Padang telah melaksanakan penilaian teknis, penilaian lapangan, asistensi, dan pengendalian dalam lingkup perizinan pemanfaatan ruang laut. Di samping itu, pedoman teknis terkait kegiatan ini juga telah diterbitkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut pada tanggal 4 September 2023 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut. Dalam hal ini, BPSPL Padang akan mempedomani ketentuan dalam pedoman tersebut dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada pelibatan tim dari wilayah kerja terdekat untuk mendampingi identifikasi ataupun verifikasi lapangan. Selain itu, efisiensi juga didukung dengan penggunaan aplikasi zoom sebagai media dalam pelaksanaan penilaian teknis permohonan pemanfaatan ruang laut.

#### E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya pencapaian IKU ini didukung oleh serangkaian kegiatan berikut.

##### a. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut

BPSPL Padang telah melaksanakan sosialisasi pemanfaatan ruang laut pada triwulan III 2024. Informasi sosialisasi pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Padang disajikan dalam ilustrasi berikut.

**KEGIATAN SOSIALISASI YANG SUDAH DILAKSANAKAN BPSPL PADANG** 7

**SOSIALISASI PKKPR**

LOKASI	JUMLAH PESERTA
<ul style="list-style-type: none"> <li>KABUPATEN KARIMUN</li> <li>KOTA SABANG</li> <li>KOTA BATAM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>40 OFFLINE DAN PEMBUKAAN GERAI PELAYANAN SOSIALISASI TANGGAL 12 JUNI 2024</li> <li>SEBAGAI NARASUMBER TANGGAL 4 JULI 2024</li> <li>SEBAGAI NARASUMBER (SOSIALISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT) PELAKSANAAN TANGGAL 14 MEI 2024</li> </ul>

**SOSIALISASI ALSE**

LOKASI	JUMLAH PESERTA
<ul style="list-style-type: none"> <li>KOTA DUMAI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>40 OFFLINE DAN 50 ONLINE PEMBUKAAN GERAI PELAYANAN</li> <li>PELAKSANAAN SOSIALISASI TANGGAL 21 MEI 2024</li> </ul>

**SOSIALISASI PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN PULAU PULAU KECIL**

LOKASI : KAB MENTAWAI PROV. SUMATERA BARAT PESERTA 50 PESERTA OFFLINE  
 TANGGAL PELAKSANAAN 5 JUNI 2024

Gambar 9. Pelaksanaan Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPSPL Padang

**b. Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut**

Hingga triwulan III 2024, BPSPL Padang telah melaksanakan identifikasi pemanfaatan ruang laut di tiga provinsi. Adapun identifikasi ini dilakukan terhadap pelaku usaha pemanfaat ruang laut yang belum memiliki PKKPR. Rekapitulasi identifikasi pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Padang disajikan dalam ilustrasi di bawah ini.

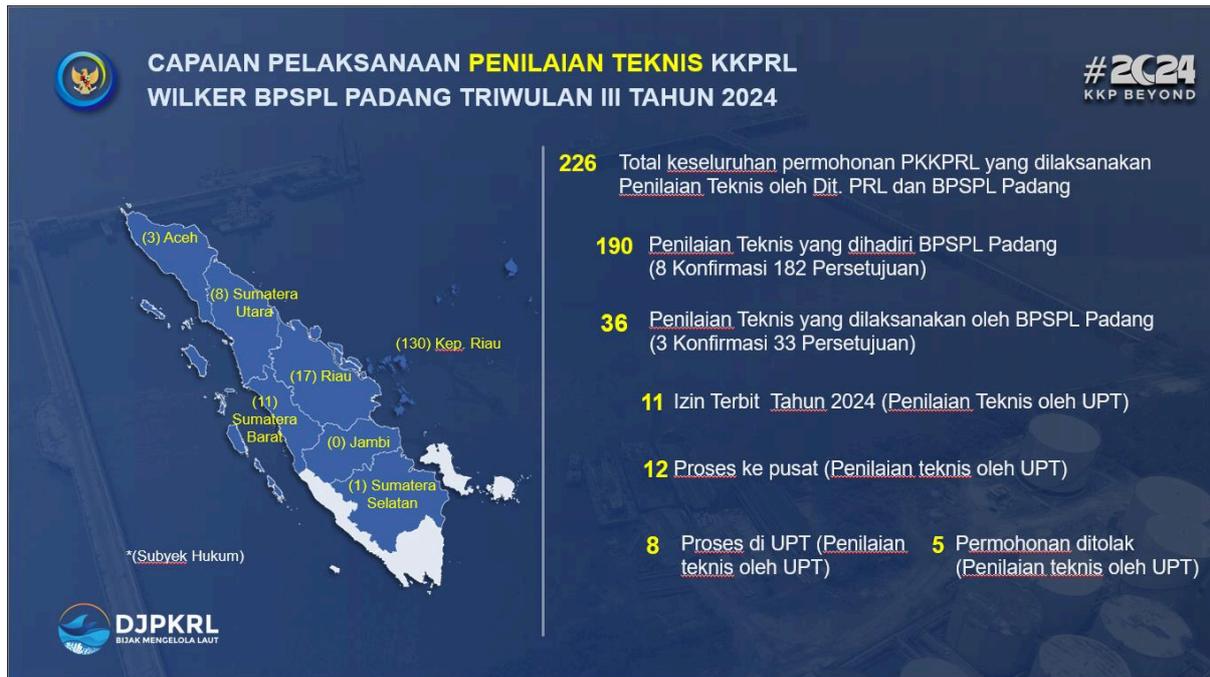


Gambar 10. Rekapitulasi Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Hingga Triwulan III 2024

**c. Penilaian Teknis Perizinan Kesesuaian Ruang Laut**

Penilaian teknis merupakan salah satu tahapan dalam pemrosesan izin PKKPR yang dimohonkan oleh pelaku usaha. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Perencanaan Ruang Laut dan BPSPL Padang berperan sebagai

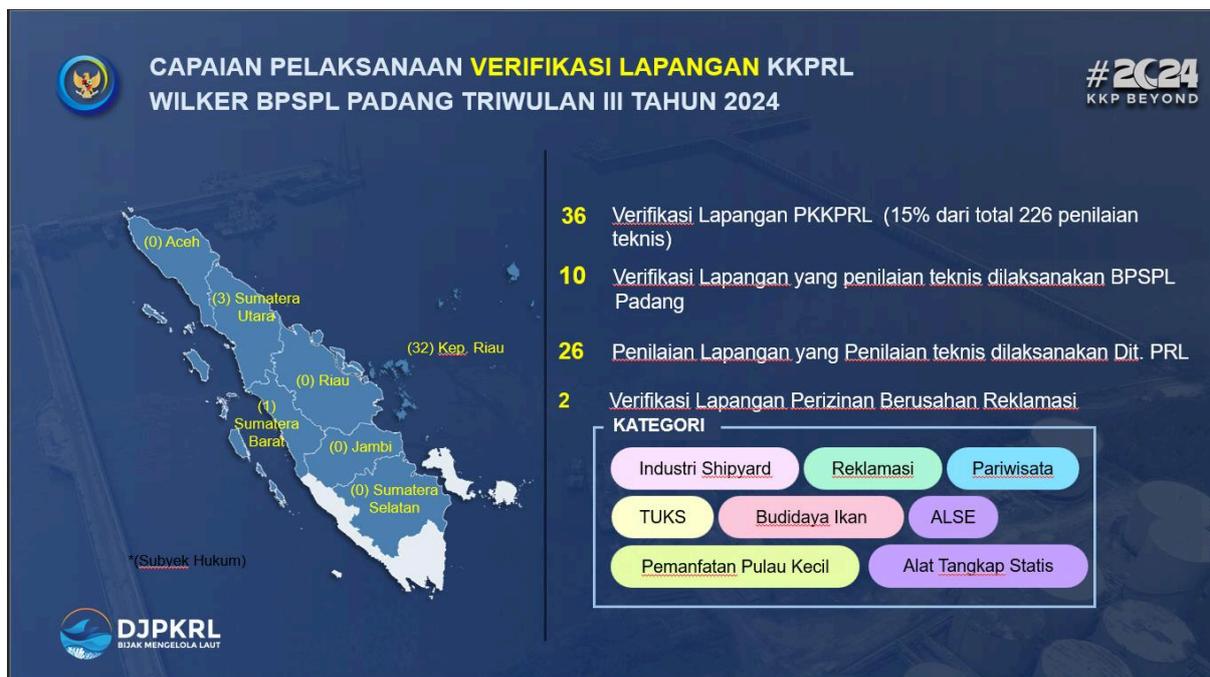
penyelenggara penilaian teknis. Rekapitulasi verifikasi teknis perizinan kesesuaian ruang laut di wilayah kerja BPSPL Padang hingga triwulan III 2024 disajikan dalam ilustrasi di bawah ini.



Gambar 11. Rekapitulasi Penilaian Teknis Perizinan Kesesuaian Ruang Laut Hingga Triwulan III 2024

#### d. Verifikasi Lapangan

Verifikasi lapangan merupakan tahapan lanjutan dalam pemrosesan izin PKKPRL setelah penilaian teknis ketika terdapat hal-hal yang perlu ditinjau kembali di lapangan. Berikut adalah rincian kegiatan verifikasi lapangan PKKPRL yang BPSPL Padang laksanakan hingga triwulan III 2024.



Tabel 12. Verifikasi Lapangan KKPRL di Wilayah Kerja BPSPL Padang Triwulan III 2024

#### d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Pengendalian pemanfaatan ruang laut dilakukan terhadap subjek hukum yang telah mengantongi izin PKKPR. Hingga triwulan III 2024, BPSPL Padang telah melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang laut terhadap 31 subjek hukum dan 35 izin terbit PKKPR di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatra Barat, dan Sumatra Selatan.

Tabel 13. Hasil Penilaian Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

No	Subjek Hukum	Provinsi	Detil Kegiatan	Luas (Ha)	Hasil Penilaian
1	BUT Zaratex	Aceh	Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi	1	Tidak Taat
2	PT Meulaboh Power Generation	Aceh	Water Intake PLTU nagan Raya Unit 3 dan 4	0,39	Taat dengan Catatan
3	PT PLN Nusantara Power	Aceh	Terminal Khusus	24,58	Taat dengan Catatan
4	PT Pertamina Patra Niaga	Aceh	Pengembangan Fuel Terminal Krueng Raya	13,05	Taat dengan Catatan
5	Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam	Kepulauan Riau	Pengendalian Daya Rusak Air ( <i>Breakwater dan Revetment</i> )	73,08	Taat dengan Catatan
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	Pembangunan Jembatan Batam Bintan	71,94	Taat dengan Catatan
7	PT Batamas Puri Permai	Kepulauan Riau	Pembangunan Pelabuhan	147,5	Taat dengan Catatan
8	PT Batamas Puri Permai	Kepulauan Riau	Real Estat yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	40,91	Tidak Taat
9	PT Bintang Alumina Indonesia	Kepulauan Riau	Pengembangan Kawasan Industri Alumina	127,84	Taat dengan Catatan
10	PT Buana Megawisata	Kepulauan Riau	Wisata Bahari	9,71	Taat
11	PT Dirgantara Inti Abadi	Kepulauan Riau	Pembangunan Kawasan Permukiman	17,08	Taat dengan Catatan
12	PT Indoprima Karisma Jaya	Kepulauan Riau	Pembangunan Pelabuhan	7,42	Tidak Taat
13	PT Karimun Granite	Kepulauan Riau	Pembuangan Limbah Pertambangan Batu Granit	19,28	Taat dengan Catatan
14	PT Optic Marine Indonesia	Kepulauan Riau	Sistem Komunikasi Kabel Laut Asia <i>Direct Cable</i>	134,60	Taat dengan Catatan
15	PT Pasifik Karyasindo Perkasa	Kepulauan Riau	Pembangunan Kawasan Industri	21,16	Taat dengan Catatan
16	PT Pasifik Karyasindo Perkasa	Kepulauan Riau	Pembangunan Kawasan Industri	34,78	Taat dengan Catatan

No	Subjek Hukum	Provinsi	Detil Kegiatan	Luas (Ha)	Hasil Penilaian
17	PT Servotech Indonesia	Kepulauan Riau	Pembangunan Industri <i>Shipyards</i> , Pabrikasi, Dan Pergudangan	22,74	Taat dengan Catatan
18	PT Sumber Bahari Abadi	Kepulauan Riau	Pembangunan Pelabuhan/Terminal Khusus Tanpa Reklamasi	1,55	Taat dengan Catatan
19	PT Sumber Bahari Abadi	Kepulauan Riau	Pembangunan Terminal Khusus	4,38	Taat dengan Catatan
20	PT Uma Graha Berkah	Kepulauan Riau	Pembangunan Kawasan Permukiman Dan Jasa	22,49	Taat dengan Catatan
21	PT Pulau Cempedak	Kepulauan Riau	Wisata Bahari	3,67	Taat
22	PT Pulau Nikoi	Kepulauan Riau	Dermaga Wisata Lainnya	1,64	Taat
23	Pusat Perencanaan Program Strategis, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Kepulauan Riau	Revitalisasi Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Terminal Batu Ampar Batam	23,24	Tidak Taat
24	PT Limas Raya Griya	Kepulauan Riau	Penyediaan Lahan Untuk Kawasan Perumahan	12,02	Taat dengan Catatan
25	PT Multi Auto Protect	Kepulauan Riau	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata	3,22	Taat dengan Catatan
26	PT Kelong Wisata Senggarang	Kepulauan Riau	Pembangunan Kawasan Pariwisata	3,31	Taat dengan Catatan
27	PT Adhitya Seraya Korita	Riau	Pengembangan Terminal Khusus	19,44	Taat dengan Catatan
28	PT Kawasan Industri Dumai	Riau	Terminal Khusus	23,70	Taat dengan Catatan
29	Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang	Sumatera Barat	Pembangunan Pengaman Pantai Kota Padang	0,79	Taat dengan Catatan
30	PT Pertamina Patra Niaga (Teluk Kabung)	Sumatera Barat	Pengembangan Integrated Terminal Teluk Kabung	75,40	Taat
31	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Sumatera Selatan	Pemasangan Kabel Laut 150 Kv Interkoneksi Sumatera-Bangka Sirkuit 2	35,20	Taat dengan Catatan
32	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Sumatera Selatan	Pemasangan Kabel Laut 150 Kv Interkoneksi Sumatera-Bangka Sirkuit 1	35,17	Taat dengan Catatan
33	BUT EMP Gebang	Sumatera Utara	Pengembangan Lapangan Migas Secanggih	4,84	Taat
34	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian	Sumatera Utara	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan	156,55	Taat

No	Subjek Hukum	Provinsi	Detil Kegiatan	Luas (Ha)	Hasil Penilaian
	Kelautan dan Perikanan				
35	PT Multimas Nabati Asahan	Sumatera Utara	Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)	20,88	Taat

#### F. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2366.PBT] Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan Rincian Output kegiatan tersebut.

Tabel 14. Realisasi Anggaran Rincian Output Pendukung IKU 3

No	Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2366.PBT.009] Rekomendasi Kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	1.100.000.000	729.224.901,00	66,29
<b>Total</b>		<b>1.100.000.000</b>	<b>729.224.901,00</b>	<b>66,29</b>

**Realisasi anggaran Rincian Output [2366.PBT.009] adalah 66,29%.** Adapun anggaran tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan verifikasi dan monitoring pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Padang. Rincian output ini bersumber dari rupiah murni senilai Rp600.000.000,00 dan bersumber dari PNBPNP senilai Rp500.000.000,00.

#### IKU. 4. Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Daerah)

Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil adalah Provinsi yang didampingi penyusunan percepatan usulan penetapan konservasi dapat melalui pendampingan penyusunan rencana zonasi, pendampingan penyusunan rencana pengelolaan, atau pendampingan lain sesuai dengan kondisi Kawasan Konservasi. Dasar hukum yang dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi. Adapun pencapaian IKU ini diperoleh dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan daerah di wilayah kerja BPSPL Padang yang didampingi dalam proses percepatan usulan penetapan Kawasan konservasinya.

##### A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Rincian target IKU 4 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 15. Perbandingan Target dan Capaian IKU 4

IKU 4. Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Daerah)				
Realisasi	Triwulan III 2024			
Triwulan III 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	-	-	-	-

Hingga berakhirnya periode triwulan III 2024, belum terdapat perolehan capaian terhadap IKU ini. IKU ini merupakan indikator kinerja yang ditargetkan dengan periode tahunan.

**B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya**

Pada tahun 2023 dan 2024, IKU ini memiliki target tahunan sehingga tidak terdapat perbandingan capaian pada triwulan III.

**C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan**

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan III 2024 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Tidak terdapat indikator kinerja pada Rencana Strategis DJPRL yang dapat dibandingkan langsung dengan indikator ini. Indikator pada Rencana Strategis DJPRL memiliki rincian yang sama dengan Rincian Target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dijadikan acuan pada perbandingan dengan standar nasional.

*Tabel 16. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 4 BPSPL Padang*

Program	Indikator	Indikasi Target					Lokasi
		2020	2021	2022	2023	2024	
Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil baru (nasional dan daerah) yang ditetapkan	Luas kawasan konservasi baru (ha)	700000	800000	900000	900000	900000	9 Provinsi

Dalam hal ini, indikator kinerja Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang merupakan indikator pendukung dalam pencapaian target Renstra DJPRL dan RPJMN 2020-2024 karena memiliki nomenklatur dan satuan berbeda. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dan standar nasional, indikator kinerja ini memiliki sifat kontributif yang tidak dapat dibandingkan capaiannya.

**D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Faktor pendukung terbesar dalam upaya pencapaian IKU 4 adalah akselerasi pemerintah daerah dalam memproses pengusulan penetapan kawasan konservasi perairan daerah. Dalam perkembangannya, BPSPL Padang telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah perihal tahapan-tahapan pendampingan pengusulan penetapan Kawasan Konservasi Daerah yang dapat didampingi oleh BPSPL Padang. Berdasarkan koordinasi tersebut, Pemerintah Daerah belum dapat menggunakan dana dekonsentrasi untuk pengusulan penetapan Kawasan Konservasi Daerah sehingga memerlukan koordinasi lanjutan.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada upaya koordinasi yang dilakukan secara jarak jauh dengan Pemerintah Daerah. Selain itu, pelibatan tim dari wilayah kerja terdekat juga dilakukan untuk mendukung efisiensi.

**E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Upaya pencapaian IKU ini didukung oleh koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah setempat, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, dalam tahapan pengusulan penetapan Kawasan konservasi di wilayah provinsinya masing-masing. Hingga triwulan III 2024, BPSPL Padang turut serta dalam pendampingan terhadap lima provinsi, meliputi Sumatra Utara, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Sumatra Selatan.

## IKU 4. DAERAH YANG DIFASILITASI PENYUSUNAN USULAN PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI (Daerah)

### KEPULAUAN RIAU

- Rapat Kelompok Kerja Zonasi dan Penetapan Kawasan Konservasi Bintang Tambelan
- Konsultasi Teknis Kawasan Konservasi Bintang Tambelan
- Konsultasi Publik Kawasan Konservasi Bintang Tambelan
- Rapat Pokja Evaluasi Hasil Konsultasi Publik I Kawasan Konservasi Bintang Tambelan
- Penyerahan Dokumen Zonasi Final Penetapan Kawasan Konservasi Bintang Tambelan

### RIAU

- Rapat Koordinasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Rupert Utara, Provinsi Riau
- FGD Pembentukan POKJA Kawasan Konservasi Rupert Utara
- Pendampingan Survei dan Konsultasi Publik I Usulan KK Rupert Utara

### SUMATRA SELATAN

- Rapat Pembahasan Awal Penetapan Pulau Maspari sebagai Kawasan Konservasi
- Rapat Pembahasan Dokumen Awal Penetapan Pulau Maspari sebagai Kawasan Konservasi

### JAMBI

- Survei Pendahuluan Kawasan Konservasi Perairan Daerah
- FGD Usulan Penetapan Kawasan Kkonservasi Perairan Daerah

### SUMATRA UTARA

- Evaluasi Teknis Kawasan Konservasi Pulau Pini
- Survei Biofisik, Bioekologi dan Sosek Kawasan Konservasi Perairan Sirombu

Gambar 12. Pendampingan Pengusulan Penetapan KKPD oleh BPSPL Padang

### 1. Kepulauan Riau

- **Rapat Kelompok Kerja Zonasi dan Penetapan Kawasan Konservasi Bintang Tambelan**  
 Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 2 dan 30 Agustus 2024 di Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. BPSPL Padang masuk ke dalam Kelompok Kerja Zonasi dan Penetapan Kawasan Konservasi Bintang Tambelan berdasarkan SK Gubernur Kepri Nomor 660 Tahun 2024. Saat ini telah terbentuk UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Provinsi Kepulauan Riau melalui Pergub Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Pengelola Kawasan Konservasi di Provinsi Kepulauan Riau.

Pertemuan pada tanggal 2 Agustus 2024 membahas profil calon Kawasan Konservasi Bintang Tambelan serta perkembangan data dan informasi pendukung yang diperlukan. Dalam hal ini, USAID Kolektif telah mendukung upaya pengumpulan data di Bintang Tambelan, mulai dari survei biofisik terumbu karang, ekosistem mangrove dan stok karbon, pemetaan partisipatif, survei sosial dan ekonomi, serta neraca sumber daya laut aspek sosial ekonomi. Selain itu, pertemuan ini juga membahas rencana kerja dan tata waktu akselerasi penetapan calon Kawasan Konservasi Bintang Tambelan dan pembagian peran tim Pokja.

Lebih lanjut, pertemuan pada tanggal 30 Agustus 2024 membahas rancangan zonasi Kawasan Konservasi Bintang Tambelan. Kegiatan pengumpulan data telah dilakukan sebelumnya di Tambelan, mulai dari pemetaan partisipatif, survei biofisik, dan survei sosial ekonomi. Pada kesempatan ini, disampaikan mengenai peta habitat perairan dangkal, habitat perairan dalam, fitur konservasi penting, fitur pemanfaatan kawasan, fitur tekanan perikanan, fitur unit perencanaan, fitur *locked in*, dan fitur biaya. Informasi-informasi tersebut diolah menggunakan Marxan yang akan menunjukkan area area prioritas *best solution*. Dalam hal ini, lokasi-lokasi untuk Zona Inti, Zona Pemanfaatan Terbatas (Sub Zona Pariwisata dan Sub Zona Perikanan Berkelanjutan), Zona Lainnya (Sub Zona lalu lintas kapal dan Sub Zona Rehabilitasi Karang) terpetakan.



Gambar 13. Dokumentasi Rapat Pokja Zonasi KK Bintang Tambelan

- **Lokakarya Persiapan Perancangan Zonasi Kawasan Konservasi di Perairan Bintang Tambelan**

Kegiatan dilaksanakan pada 9 s.d. 10 Agustus 2024 di Hotel CK Convention Centre, Kota Tanjungpinang. Kegiatan ini didasari oleh Surat Undangan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 526.3/41/DKP/2024 pada tanggal 8 Agustus 2024.

Lokakarya ini membahas langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung penetapan dan percepatan Kawasan Konservasi Bintang Tambelan, yaitu mendefinisikan tujuan dan sasaran untuk kawasan konservasi dan jejaring, kriteria biofisik untuk merancang zonasi kawasan konservasi, dan kriteria desain sosial-ekonomi-budaya untuk mendesain zonasi kawasan konservasi. Pada sesi diskusi, diusulkan target konservasi di Kawasan Konservasi, yaitu penyu dan ekosistem terumbu karang. Selain itu, dipertimbangkan ekosistem mangrove yang berada di luar garis pantai atau di wilayah perairan untuk menjadi target konservasi. Selanjutnya dilakukan pembobotan *cost features*/biaya konservasi yang terdiri dari 12 kriteria pemanfaatan yang berada di kawasan konservasi. Pembobotan dilakukan untuk mengetahui seberapa parah kerusakan yang ditimbulkan, luas jangkauan dan usaha dalam memperbaiki ancaman.

Dalam pertemuan ini, dilakukan perumusan Berita Acara yang memuat rekomendasi antara lain:

1. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Kawasan Konservasi di Perairan Bintang Tambelan Provinsi Kepulauan Riau dari aspek biofisik dan aspek sosial, ekonomi dan budaya.
2. Kriteria desain biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya untuk merancang dan membangun jejaring Kawasan Konservasi di Perairan Bintang Tambelan Provinsi Kepulauan Riau.
3. Pembobotan terhadap ancaman dalam rangka mendukung perancangan zonasi Kawasan Konservasi di Perairan Bintang Tambelan Provinsi Kepulauan Riau.
4. Perlu melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai usulan pantai peneluran penyu yang akan diakomodir untuk dipertimbangkan sebagai zona Inti.
5. Mempertimbangkan lokasi Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) sebagai area Kawasan Konservasi Maritim (KKM) di Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kepulauan Riau untuk menjadi bagian analisis perumusan atau perluasan zonasi Kawasan Konservasi di Perairan Bintang Tambelan Provinsi Kepulauan Riau.



Gambar 14. Dokumentasi Lokakarya Persiapan Perancangan Zonasi KK di Perairan Bintang Tambelan

- **Rapat Konsultasi Teknis Penetapan Kawasan Konservasi Bintang Tambelan**

Kegiatan dilaksanakan pada 3 September 2024 di Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini didasari oleh Surat Undangan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor B/526.3/56/DKP/2024 pada tanggal 2 September 2024.

Pada kesempatan ini, disampaikan Draft Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Bintang Tambelan yang mengacu pada hasil survey pemetaan partisipatif, biofisik, dan sosial ekonomi. Hasil rapat pokja dilakukan dan sudah disepakati untuk Kawasan Konservasi Bintang Tambelan masuk kategori Taman. Selain itu, disampaikan beberapa peta tematik seperti peta habitat perairan dangkal, habitat perairan dalam, fitur konservasi penting, fitur pemanfaatan kawasan, fitur tekanan perikanan, fitur unit perencanaan, fitur locked in, dan fitur biaya. Informasi-informasi tersebut diolah menggunakan Marxan yang akan menunjukkan area-area prioritas best solution untuk pengelolaan target konservasi yang telah ditentukan. Zonasi yang disusun dalam Kawasan Konservasi Bintang Tambelan terdiri dari Zona Inti, Zona Pemanfaatan Terbatas (Sub Zona Pariwisata dan Sub Zona Perikanan Berkelanjutan), Zona Lainnya (Sub Zona lalu lintas kapal dan Sub Zona Rehabilitasi Karang). Untuk zona inti di Pulau Berdua, sudah dilakukan penyesuaian berdasarkan rapat pokja sebelumnya yang mana sudah terdapat akses menuju pulau yang sebelumnya zona inti mengelilingi pulau.



Gambar 15. Rapat Konsultasi Teknis Penetapan Kawasan Konservasi Bintang Tambelan

- **Konsultasi Publik Penetapan Kawasan Konservasi Bintang Tambelan**

Kegiatan dilaksanakan pada 5 s.d. 13 September 2024 di Kantor Desa Mentebung, Kantor Desa Pulau Pinang, dan Kantor Kecamatan Tambelan. Kegiatan ini didasari oleh Surat Undangan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor B/526.3/58/DKP/2024 pada tanggal 3 September 2024. Kegiatan konsultasi publik dilakukan untuk mendapatkan masukan tanggapan atau saran perbaikan dari pemangku kepentingan atau pihak terkait mengenai rencana zonasi yang telah disusun. Dalam hal ini, penyampaian rencana zonasi dilakukan oleh fasilitator yang dibantu oleh tim pemetaan (GIS) untuk merangkum dan mengumpulkan masukan dari masyarakat langsung.

**Konsultasi Publik Desa Mentebung dan Desa Pulau Pinang**

Kegiatan konsultasi publik pertama dilakukan di Desa Mentebung dan Pulau Pinang yang berjarak 8 jam pelayaran dari Pulau Tambelan Besar. Kegiatan dilakukan pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 pada pukul 14.00 WIB. Dalam hal ini, tim dibagi menjadi 2 tim untuk melakukan konsultasi publik di Desa Mentebung dan Pulau Pinang. Dalam kesempatan ini, tim merangkum setiap masukan atas rencana zonasi yang telah disusun. Beberapa hal penting dan masukan yang diberikan pada konsultasi publik ini antara lain:

1. Zona inti di Pulau Panau perlu diberi akses agar masyarakat dapat menuju ke pulau tersebut dan sebagai gantinya mengusulkan zona inti di sisi utara Pulau Pinangkuning,
2. Sisi barat Pulau Mentebung sebagai subzona pariwisata,
3. Zona inti di Pulau Pinangseratus perlu disesuaikan untuk diberi akses bagi masyarakat menuju kebun di pulau tersebut,
4. Mengusulkan zona inti di sekitar Pulau Tukonganggan,
5. Menyetujui subzona pariwisata di Pulau Sigang dan untuk Pulau Kepayang disesuaikan menjadi subzona perikanan tangkap karena di pesisir dekat pantai terdapat aktivitas nabbe (tradisi penangkapan ikan tradisional) oleh masyarakat,
6. Menyetujui Pulau Anakaur sebagai subzona pariwisata.

### **Konsultasi Publik Desa di Pulau Tambelan Besar**

Kegiatan KP selanjutnya dilakukan pada Hari Selasa dan Rabu, 10 dan 11 September 2024 yang mana peserta dari 5 Desa/Kelurahan di Pulau Tambelan Besar dan Desa Pengikik. Kawasan konservasi di sekitar Pulau Tambelan Besar terdiri dari Kelurahan Teluk Sekuni, Desa Kukup, Desa Kampung Hilir, Desa Batu Lepuk, dan Desa Kampung Melayu. Sementara Desa Pengikik yang berjarak sekitar 97 km dari Pulau Tambelan Besar tetap dilibatkan untuk menyampaikan saran dan masukan mengenai KK di Tambelan. Beberapa hal penting dalam kegiatan konsultasi publik ini adalah:

1. Zona inti di Pulau Bedua perlu diberi akses bagi masyarakat yang memiliki lahan disana,
2. Mengusulkan subzona pariwisata di Pulau Kera dan Pulau Betunda,
3. Pengelolaan di kawasan konservasi mengikutsertakan dan mengkoordinasikan masyarakat di setiap desa,
4. Mengusulkan zona perikanan tangkap disekitar Pulau Benua,
5. Desa Pengikik mendukung kawasan konservasi dan berharap perairan disekitar Desa Pengikik dapat dipertimbangkan menjadi kawasan konservasi karena memiliki nilai konservasi yang tinggi sekaligus ancaman yang tinggi dari armada perikanan tangkap berskala besar,
6. Menyepakati rancangan subzona pariwisata di sekitar Pulau Uwi dan Pulau Genting,
7. Zona inti disekitar Pulau Bumin perlu diberi akses menuju pulau,
8. Penegakan hukum dan pengawasan yang melibatkan masyarakat serta diberi pembinaan serta keaktifan aparat pengawasan di dalam kawasan konservasi,
9. Zona inti di Pulau Tambelan Besar perlu diberikan akses,
10. Menyepakati rancangan subzona pariwisata di Pulau Nangka,
11. Mengusulkan sisi utara Pulau Mendara menjadi subzona perikanan berkelanjutan,
12. Mengusulkan Pulau Lintang, sisi utara Pulau Lintang, Pulau Tamban menjadi subzona pariwisata,
13. Mengusulkan sisi selatan Pulau Kepala Tambelan, sisi selatan Pulau Menggirang Besar dan Pulau Menggirang Kecil menjadi subzona pariwisata,
14. Mengusulkan Teluk Lumpat di Pulau Tambelan Besar sebagai zona inti.

Umumnya masyarakat Tambelan setuju dengan rancangan kawasan konservasi dan zonasi yang telah disusun. Namun, pada zona inti yang mengelilingi pulau, terdapat pertanyaan masyarakat apakah zona tersebut dapat dilintasi dengan perahu dayung untuk menuju pulau mengingat peruntukan zona inti termasuk *no take and no go*. Selama ini masyarakat menuju pulau menggunakan perahu dayung/sampan (tanpa motor) untuk menepi ke pulau dan mengangkut hasil kebun menuju perahu motor yang dijangkarkan pada lokasi tertentu. Prinsipnya masyarakat menyetujui terhadap rancangan zona inti yang telah disusun

berdasarkan kajian ilmiah, namun keberatan jika tidak dapat mengakses pulau yang menjadi lahan kebun mereka, sehingga perlu adanya penyesuaian kembali.



Gambar 16. Konsultasi Publik Penetapan Kawasan Konservasi Bintang Tambelan

- **Rapat Pokja Evaluasi Hasil Konsultasi Publik I Perencanaan Zonasi Kawasan Konservasi Bintang Tambelan**

Kegiatan dilaksanakan pada 19 September 2024 di Ruang Rapat Kerapu, Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang. Kegiatan ini bertujuan untuk memaparkan hasil Konsultasi Publik I.

Berdasarkan hasil Konsultasi Publik I, Pulau Sedua Besar dan Pulau Sedua Kecil mendapat masukan untuk menjadi subzona pariwisata, sebagian besar usulan zona (zona inti, zona pemanfaatan terbatas, subzona pariwisata, subzona perikanan berkelanjutan, subzona rehabilitasi) yang telah disusun oleh tim Pokja disetujui oleh masyarakat, masukan sarannya terdapat lebih kepada akses ke zona inti ataupun pada saat mereka berkebun masih bisa menangkap ikan di sekitarnya. ada juga penambahan zona/subzonanya, pengurangan, dan juga ada yang diganti lokasinya. hasil penyesuaian tersebut terdapat pengurangan luasan tetapi pengurangan luasan tersebut tidak signifikan yang semula total luasan adalah 1.015.254,66 Ha menjadi 1.010.632,34 Ha dengan rincian zona yang baru adalah Zona Inti 2.227,52 ha (0,22%), Zona Pemanfaatan Terbatas 998.976,22 ha (98,85%), dan Zona Lainnya 9.428,60 ha (0,93%). Perubahan yang dilakukan sesuai dengan permintaan masyarakat baik itu penambahan, pengurangan, dan pengantiannya sebagai berikut:

- Pulau Bedua yang semula zona inti menutupi seluruh pulau, saat ini sudah disesuaikan dan dikurangi zona intinya pada bagian utara pulau, disisakan pada bagian selatan serta menambahkan alur antara Pulau Lipih dan Pulau Bedua;
- Selanjutnya pada Zona Inti 05 dan Pulau Penyemuk yang menutup pulau sudah disesuaikan untuk alur masuk menuju pulau;
- Penambahan Zona Inti (Zona Inti 10) pada ujung selatan Pulau Tambelan;
- Zona Inti Pulau Mentebung dikurangi hampir 50%;
- Menghapus Zona Inti di Pulau Tukonkarang;
- Membuka akses Zona Inti di Pulau Pinangsertur di bagian selatan;
- Menambah Zona Inti di Pulau Pinangkuning;
- Subzona Pariwisata antara Pulau Genting dan Pulau Mandara luasannya dikurangi;
- Pada Pulau Nangka luasan Subzona Pariwisata juga dikurangi;
- Penambahan Subzona Pariwisata di Pulau Menggirang Besar dan Pulau Menggirang Kecil;
- Penambahan Subzona Pariwisata di Pulau Pinang;
- Mengurangi Subzona Pariwisata di Pulau Mentebung; dan
- Mengurangi luasan Zona Lainnya di antara Pulau Tiyangnyaru dan Pulau Penggeghah.

Kemudian, sesi diskusi menghasilkan poin-poin berikut:

- Menjadi catatan pada daerah Pengkik sebelumnya memberikan saran untuk daerah tersebut dimasukkan dalam Kawasan Konservasi, tapi pada penyusunan Kawasan Konservasi saat ini daerah tersebut tidak masuk dalam alokasi pengusulan, sekiranya perlu ada justifikasi sebagai bahan tanggapan pada saat dilaksanakan Konsultasi Publik II;
- Akses yang dimohonkan oleh warga untuk masuk ke pulau khususnya pada zona inti sudah diakomodir, karena pulau tersebut merupakan kebun milik masyarakat dan perlu adanya akses lalu lintas;
- Terdapat perbedaan luasan antara lokasi pencadangan dan lokasi yang telah ditetapkan dalam RZWP3K, hal ini perlu segera ada kesepakatan guna luasan yang dicantumkan dalam 2 dasaran tersebut memiliki perbedaan yang cukup banyak. Direktorat KEBP menyarankan menggunakan luasan yang telah ditetapkan pada RZWP3K agar proses pengusulan bisa segera terlaksana.



Gambar 17. Dokumentasi Rapat Pokja Evaluasi Hasil Konsultasi Publik I Perencanaan Zonasi Kawasan Konservasi Bintang Tambelan

- **Penyampaian serta Penyerahan Dokumen Zonasi Final Penetapan Kawasan Konservasi Bintang Tambelan**

Kegiatan dilaksanakan pada 30 September 2024 di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang.

Pada kesempatan ini, dilakukan Penyampaian serta Penyerahan Dokumen Zonasi Final Penetapan Kawasan Konservasi Bintang Tambelan dari Kelompok Kerja (POKJA) Kawasan Konservasi Bintang Tambelan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kepulauan Riau. Dalam hal ini Gubernur Kepulauan Riau mendukung dalam penetapan Kawasan Konservasi ini yang mana beliau telah menandatangani Surat Usulan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Harapannya kawasan konservasi dengan Kategori Taman ini dapat bermanfaat dan juga mendorong sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan secara simbolis Dokumen Rencana Zonasi Bintang Tambelan dari Camat Tambelan mewakili Kelompok Kerja kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Surat usulan Penetapan Kawasan Konservasi Bintang Tambelan beserta link dokumen pendukung sudah dikirim melalui email Dinas Kelautan dan Perikanan kepada email KKP per tanggal 30 September 2024.



Gambar 18. Dokumentasi Penyampaian serta Penyerahan Dokumen Zonasi Final Penetapan Kawasan Konservasi Bintang Tambelan

## 2. Riau

### - Rapat Koordinasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Rupa Utara

Kegiatan dilaksanakan pada Rabu, 5 Februari 2024 melalui aplikasi Zoom dengan turut dihadiri oleh Direktorat KKHL, BPSPL Padang, DKP Provinsi Riau, dan LKKPN Pekanbaru. Kawasan Konservasi (KK) Rupa Utara merupakan salah satu Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Riau yang diinisiasi oleh Pemerintah Riau melalui Pencadangan KK Rupa Utara melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.565/III/2019 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Bengkalis dengan luas 15.547 Hektar.

Pada kesempatan ini, Direktur KKHL melalui Katimja Penataan Kawasan konservasi Bapak Amerh Hakim menyatakan bahwa KK Rupa Utara ini dapat dikelola oleh Pemda seperti contoh di Nusa Penida Prov. Bali dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti pernyataan Gubernur Riau tidak keberatan untuk mengelola Kawasan ini yang ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, melaksanakan proses-proses penetapan Kawasan sesuai dengan Permen KP No. 31 tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi. Dit. KKHL juga akan melakukan koordinasi dengan KSNT PPKT terkait pengelola KSNT dan peluang pengelolaan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah sesuai aturan dan perundangan yang berlaku.

Pada tahun ini dialokasikan anggaran Tugas Pembantuan untuk percepatan penetapan KK Rupa Utara melalui Dinas KP Riau sebesar 250 juta, dan diharapkan tahun 2024 sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. BPSPL Padang berkomitmen untuk berkolaborasi dalam Upaya pengelolaan Kawasan konservasi di Riau dan membantu dalam penetapan KK Rupa Utara, melalui penyediaan SDM monitoring sumberdaya, pemetaan dan perencanaan kawasan konservasi.

### - FGD Pembentukan Pokja Kawasan Konservasi Rupa Utara

Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 18 Juli di Ruang Rapat Terbuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini, alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi Rupa Utara sudah sesuai. Dan sudah dilakukan kajian awal tentang Alokasi Ruang untuk Kawasan Konservasi di Rupa Utara. Adapun Rupa Utara merupakan Kawasan Strategis Nasional Tertentu. Lebih lanjut, disampaikan juga salah satu tahapan untuk penetapan Kawasan konservasi adalah pembentukan Kelompok Kerja. Kelompok Kerja ini nanti akan bersama sama dalam pengelolaan Kawasan Konservasi dari usulan penetapan maupun nanti dalam proses penyusunan rencana pengelolaan. Pokja juga ikut serta dalam penyusunan dokumen awal sampai Dokumen Final. Sementara itu, target konservasi

yang teridentifikasi pada tahun 2018 lalu adalah pesut. Untuk tahapan penetapan perlu kajian lebih lanjut terkait habitat yang menjadi target Kawasan Konservasi.



Gambar 19. Dokumentasi FGD Pembentukan Pokja Kawasan Konservasi Rupat Utara

- **Survei dan Konsultasi Publik I Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Rupat Utara**  
 Kegiatan dilaksanakan pada 26 s.d. 30 Agustus 2024 di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis. Adapun lingkup kegiatan survei adalah pengambilan data biofisik dan sosial ekonomi ke beberapa desa yang ada di Rupat Utara.

Survei sosial ekonomi dilaksanakan selama dua hari di tujuh desa, yaitu Desa Tanjung Medang, Desa Tanjung Punak, Desa Putri Sembilan, Desa Suka Damai, Desa Titik Akar, Desa Teluk Rhu, dan Desa Kadur. Pada dasarnya, masyarakat dan para nelayan mendukung dengan adanya rencana pengelolaan kawasan konservasi ini, dengan harapan kedepannya hewan-hewan laut yang berada diperairan rupert dapat terjaga dan terlindungi. Selain itu Nelayan juga perlu mendapatkan publikasi Peta Rencana Zonasi yang disampaikan agar semua nelayan mengetahui area inti yang dilindungi serta lokasi area tangkap maupun area yang dilarang, serta area yang banyak terdapat lumba-lumba, penyu, pesut dan dugong. Sementara itu, survei biofisik dilakukan dengan pengambilan data kualitas air dan pengamatan kemunculan cetacean. Pada hari pertama survei, dijumpai kemunculan sepasang pesut (*Orcaella brevirostris*) dan pada hari kedua ditemukan cetacean yang tidak teridentifikasi.

Konsultasi Publik I dihadiri oleh 24 orang perwakilan nelayan dan perwakilan stakeholder perangkat pemerintahan di Rupat Utara. Pada sesi ini dipaparkan hasil survei untuk menjangkau masukan dari tamu undangan. Dari Konsultasi Publik I ini didapatkan hasil sepemahaman dan kesepakatan bersama yaitu dengan membatasi sebagian dari Pulau Babi yang menjadi zona ini untuk dilakukan pembatasan aktivitas tertentu, dengan penanda tangan pengesahan Berita Acara oleh Kabid Kelautan dan Pengawasan DKP Provinsi Riau.



Gambar 20. Dokumentasi Survei dan Konsultasi Publik I Usulan Penetapan KK Rupat Utara

### 3. Sumatra Selatan

#### - **Rapat Pembahasan Awal Penetapan Pulau Maspari sebagai Kawasan Konservasi**

Kegiatan dilaksanakan pada 10 September 2024 di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Selatan, Kota Palembang dan secara daring melalui Zoom. Pertemuan ini turut melibatkan OPD lingkup Sumatra Selatan.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 349/KPTS/DISLUTKAN/2024 tanggal 29 Mei 2024, BPSPL Padang merupakan anggota Pokja Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Laut Daerah Provinsi Sumatra Selatan. Sebelumnya, Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Maspari, Kec. Tulung Selapan, Kab. Ogan Komering Ilir dan perairan sekitarnya telah dicadangkan sebagai Kawasan Konservasi berdasarkan Perda Provinsi Sumatra Selatan Nomor 2 Tahun 2020. Luas Kawasan Konservasi Pulau Maspari yang telah dicadangkan yaitu 976,03 Ha.

Berdasarkan hasil diskusi, pengusulan penetapan Kawasan Konservasi Pulau Maspari telah memperoleh dukungan dari anggota Pokja dan OPD terkait. Proses tersebut perlu memerhatikan target konservasi, karakteristik sumber daya yang terdapat di lokasi, serta kebutuhan masyarakat sekitar. Untuk sementara, jadwal kegiatan lanjutan yang telah direncanakan adalah Rapat Pokja 2 (19 September 2024), Konsultasi Teknis (3 Oktober 2024), Rapat Pokja 3 (8 Oktober 2024), Konsultasi Publik (28 Oktober 2024).



*Gambar 21. Dokumentasi Rapat Pembahasan Awal Penetapan Pulau Maspari sebagai Kawasan Konservasi*

#### - **Rapat Pembahasan Dokumen Awal Penetapan Pulau Maspari sebagai Kawasan Konservasi ke-2**

Kegiatan dilaksanakan pada 30 September 2024 di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Selatan, Kota Palembang dan secara daring melalui Zoom. Kegiatan ini didasari oleh adanya Surat Dinas dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 523/711/V/Dislutkan/2024 tanggal 24 September 2024.

Pada kesempatan ini, dipaparkan profil Pulau Maspari beserta potensi target konservasi yang ada di pulau tersebut. Sementara itu, OPD yang terlibat juga memberikan masukan, khususnya terkait penentuan target konservasi, kesesuaian peta rencana zonasi, hingga metode survei yang digunakan. Masukan tersebut telah dicatat oleh tenaga ahli, yang menanggapi bahwa desain zonasi kawasan akan didukung dengan analisis marxan dan batas luar kawasan konservasi yang diakomodir adalah sesuai dengan pencadangan yang termuat pada Perda RZWP3K Provinsi Sumatra Selatan.



Gambar 22. Dokumentasi Rapat Pembahasan Dokumen Awal Penetapan Pulau Maspari sebagai Kawasan Konservasi ke-2

#### 4. Jambi

##### - Survei Pendahuluan KKPD di Provinsi Jambi

Kegiatan dilaksanakan pada Selasa s.d. Kamis, 28 s.d. 30 Mei 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kawasan Konservasi Seberang Kota adalah kawasan konservasi dengan status pencadangan yang memiliki luas 2505,36 hektar. Berdasarkan hasil survei pendahuluan KK Seberang Kota diperoleh informasi bahwa pemanfaatan ruang laut yang berada di KK Seberang Kota adalah alat tangkap togok dan alat tangkap belat. Kondisi mangrove di Kawasan Konservasi Seberang Kota cukup baik dengan didominasi jenis api-api dan pedada. Jenis biota laut yang umumnya berada di Kawasan Konservasi Seberang Kota adalah kerang darah, kerang bambu, ikan kakap putih, ikan sembilang, ikan belanak, ikan duri, ikan pari, udang mantis, udang kuning, kepiting bakau, dan belangkas/tapal kuda.

Kawasan Konservasi Tungkal Ilir adalah kawasan konservasi dengan status pencadangan yang memiliki luas 8182,13 hektar. Berdasarkan hasil survei pendahuluan KK Tungkal Ilir diperoleh informasi bahwa pemanfaatan ruang laut yang berada di KK Tungkal Ilir adalah alat tangkap togok, budidaya kerang darah, dan alat tangkap belat. Terdapat salah satu jenis mangrove yang jarang ditemukan di tempat lain namun tumbuh di pesisir sekitar Kawasan Konservasi Tungkal Ilir, yaitu Kancelia candel. Jenis biota laut yang umumnya berada di Kawasan Konservasi Tungkal Ilir adalah kerang darah, kerang bambu, ikan kakap putih, ikan sembilang, ikan belanak, ikan duri, ikan pari, udang mantis, udang kuning, kepiting bakau, dan belangkas/tapal kuda.

##### - FGD Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Provinsi Jambi

Kegiatan dilaksanakan pada 13 Agustus 2024 di Aula Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

Saat ini, KKPD di Provinsi Jambi masih dalam tahap pencadangan dan untuk penetapannya perlu dilakukan pembaruan data melalui survey biofisik. Pencadangan kawasan konservasi pada RZWP3K Provinsi Jambi didasarkan pada Perda kabupaten, seperti Suaka Perikanan di Pantai Desa Dualap dan Mendahara Lestari. Dijelaskan bahwa berdasarkan alokasi ruang kawasan konservasi dalam Perda No. 20 Tahun 2019, Provinsi Jambi memiliki alokasi sebanyak 7 kawasan konservasi, namun karena ada 2 kabupaten maka penetapan dilakukan melalui 2 proses (SK). Dijelaskan pula Kawasan Konservasi yang ada di Perairan Darat (suaka atau lubuk larangan). Saat ini, sudah dibentuk Pokja melalui Keputusan Gubernur Jambi No. 1045/KEP.GUB/DKP-2.2/2023.



Gambar 23. Dokumentasi FGD Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Provinsi Jambi

## 5. Sumatra Utara

### - **Evaluasi Teknis Penetapan Kawasan Konservasi Pulau Pini, Kabupaten Nias Selatan dan Reviu Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Sawo Lahewa Kabupaten Nias Utara**

Kegiatan dilaksanakan pada Senin, 29 Juni 2024 melalui aplikasi Zoom yang mana merupakan tindak lanjut surat Pj. Gubernur Sumatera Utara Nomor: 500.5.1/16832/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Permohonan Penetapan Kawasan Konservasi di Sumatera Utara. Tim evaluasi dari Direktorat KKHL dipimpin oleh Cora Mustika, selaku PELP Ahli Madya Dit. KKHL.

Berdasarkan hasil rapat, disepakati tanggapan/saran/masukan sebagai berikut:

Kawasan Konservasi Pulau Pini

1. Luas kawasan konservasi yang diusulkan disepakati seluas 44.336,01 Ha dengan proyeksi CEA yang telah sesuai dengan materi teknis pengaturan ruang perairan pesisir Provinsi Sumatera Utara yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri KP.
2. Target konservasi berupa ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan mangrove.
3. DKP Sumatera Utara akan melengkapi data shapefile ekosistem target konservasi yang dilindungi dalam zona inti sekitar 11%.
4. KK terdiri dari 3 zona, yaitu: zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lain.

Kawasan Konservasi Sawo Lahewa

1. Luas kawasan konservasi yang diusulkan disepakati seluas 29.130,47 Ha dengan proyeksi CEA yang telah sesuai dengan materi teknis pengaturan ruang perairan pesisir Provinsi Sumatera Utara yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri KP.
2. Target konservasi berupa ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan mangrove dengan persentase 31% target konservasi dilindungi dalam zona inti.
3. Terdiri dari 3 zona, yaitu: zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lain.
4. Perbaiki dokumen penetapan kawasan konservasi agar dapat disampaikan kembali kepada Direktorat KKHL paling lambat 2 Februari 2024.

### - **Survei Biofisik, Bioekologi dan Sosial Ekonomi Kawasan Konservasi Perairan Sirombu, Kabupaten Nias Barat**

Kegiatan dilaksanakan pada 30 Juli s.d. 2 Agustus 2024 di Kawasan Konservasi Daerah Nias Barat. Sebelum melaksanakan survey di lapangan, BPSPL Padang dan DKP Prov Sumatera Utara berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias Barat, menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yaitu adanya pencadangan

kawasan konservasi di Kabupaten Nias Barat seluas 27.343,57 ha yang ditargetkan untuk diusulkan penetapannya pada tahun 2024 ini.

Pelaksanaan survei terdiri dari pengumpulan data ekologi berupa ekosistem terumbu karang, lamun dan mangrove, termasuk biota dilindungi jika terindikasi ditemukan. Di samping itu, pengumpulan data sosial ekonomi turut diperhatikan terutama aktivitas di lokasi calon zona inti. Di Kawasan Konservasi Perairan Sirombu, terdapat beberapa pulau antara lain Pulau Hinako, Pulau Bawa, Pulau Himana, dan Pulau Langu yang perlu keterwakilan habitatnya dari masing-masing pulau. Titik pengambilan data dapat menjadi T-0 sebagai data series dalam pemenuhan EVIKA. Hasil survei tersebut secara detail akan diolah lebih lanjut oleh tenaga ahli.

Lebih lanjut, dilakukan juga FGD dengan masyarakat dengan hasil sebagai berikut:

- a. Target konservasi di Kabupaten Nias Barat adalah ekosistem terumbu karang,
- b. Kawasan konservasi Nias Barat dikategorikan sebagai Taman,
- c. Rencana zona inti yang disepakati antara lain:
  - Gosong (sebelah kanan) yang terletak antara Pulau Langu dan Pulau Bogi,
  - Pulau Langu (kecuali bagian barat laut);
  - Bagian tenggara Pulau Himana.



Gambar 24. Survei Biofisik, Bioekologi dan Sosial Ekonomi Kawasan Konservasi Perairan Sirombu

#### F. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2362.UBA] Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah dengan Rincian Output (RO) [2362.UBA.001] Pemerintah daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 17. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 4

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2362.UBA.001.051] Fasilitasi usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	150.000.000,00	35.759.292,00	23,84
<b>Total</b>		<b>150.000.000,00</b>	<b>35.759.292,00</b>	<b>23,84</b>

**Realisasi anggaran rincian output [2362.UBA.001] adalah 23,84%.**

## IKU 5. Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)

Kegiatan inisiasi penyusunan draft Kerjasama, jejaring dan/atau kemitraan konservasi yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerjasama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Unit Kerja di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu atau lebih Lembaga/badan/ organisasi untuk mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerjasama dapat dilakukan dengan kementerian dan Lembaga pemerintah non kementerian. Pemerintah daerah, Lembaga Pendidikan, Lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha/ industri/ perusahaan, dan organisasi kemasyarakatan.

Capaian indikator ini dihitung dari inventarisasi dan penjumlahan draft kerja sama yang disusun/difasilitasi penyusunannya di wilayah kerja BPSPL Padang untuk mendukung kegiatan konservasi dan keanekaragaman hayati laut dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon 1.

### A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Rincian Target IKU 5 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 18. Perbandingan Target dan Capaian IKU 5

IKU 5. Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)				
Realisasi	Triwulan III 2024			
Triwulan III 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	-	-	-	-

Pada periode triwulan III 2024, belum terdapat capaian terhadap IKU ini. IKU ini merupakan indikator kinerja yang ditargetkan dengan periode tahunan.

### B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya

IKU ini tidak terdapat pada tahun 2023 sehingga tidak terdapat perbandingan capaian antara triwulan III 2023 dan triwulan III 2024.

### C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan III 2024 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Tidak terdapat indikator kinerja pada Rencana Strategis DJPRL yang dapat dibandingkan langsung dengan indikator ini. Indikator pada Rencana Strategis DJPRL memiliki rincian yang sama dengan Rincian Target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dijadikan acuan pada perbandingan dengan standar nasional.

Tabel 19. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 5 BPSPL Padang

Program	Indikator	Indikasi Target					Lokasi
		2020	2021	2022	2023	2024	
Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	Konvensi dan Kerjasama Konservasi yang mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	5	5	5	5	5	Pusat

Dalam hal ini, indikator kinerja Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang merupakan indikator pendukung dalam pencapaian target Renstra DJPRL dan RPJMN 2020-2024 karena memiliki nomenklatur dan satuan berbeda. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dan standar nasional, indikator kinerja ini memiliki sifat kontributif yang tidak dapat dibandingkan capaiannya.

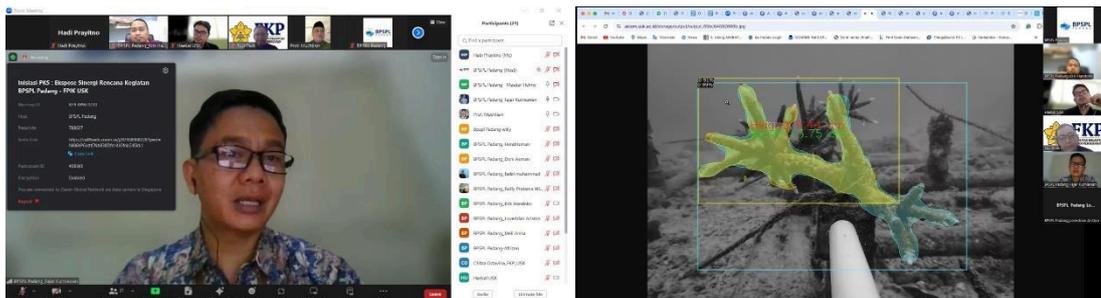
#### D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil analisis, pencapaian IKU ini didukung oleh koordinasi dengan calon mitra, dalam hal ini adalah Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala. Hingga triwulan III, BPSPL Padang telah melaksanakan dua kali pembahasan draft Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala secara daring melalui aplikasi Zoom. Dengan dilaksanakan koordinasi berbasis daring, masing-masing pihak dapat mengikuti pembahasan lebih fleksibel. Maka dari itu, pencapaian IKU ini sangat terbantu dengan penggunaan aplikasi Zoom yang dapat memfasilitasi pertemuan berbasis daring.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada penggunaan aplikasi Zoom dalam pembahasan Perjanjian Kerja Sama secara daring dengan Universitas Syiah Kuala. Selain itu, pelibatan tim dari wilayah kerja terdekat juga mendukung efisiensi penggunaan sumber daya.

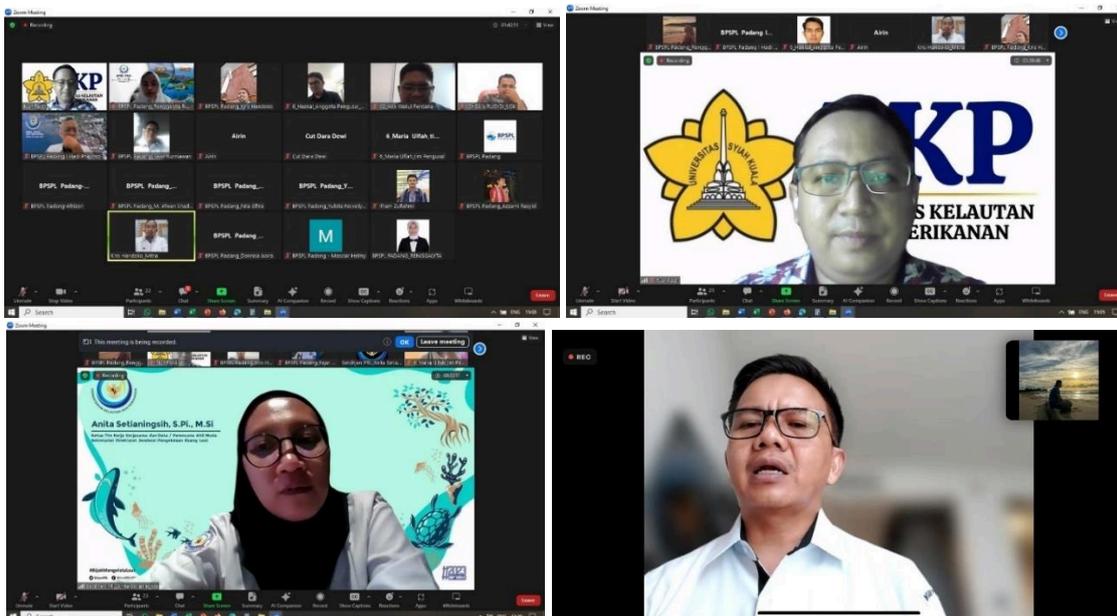
#### E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya pencapaian IKU ini didukung oleh kegiatan pembahasan draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) BPSPL Padang dengan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala (FKP USK) Tahun 2024-2027 yang telah dilaksanakan pada 25 Januari 2024 dan 2 Februari 2024 secara daring. Hingga pembahasan terakhir, draft Perjanjian Kerja Sama tersebut telah mengakomodir empat ruang lingkup, yaitu penguatan kapasitas SDM, pelestarian dan perlindungan biota laut dilindungi dan/atau terancam punah, pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, dan kolaborasi padanan dana.



Gambar 25. Dokumentasi Pembahasan Draft PKS Bersama FKP USK

Dalam perkembangannya, telah dilaksanakan pembahasan draft Perjanjian Kerja Sama BPSPL Padang dengan Universitas Syiah Kuala bersama Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada 26 Juni 2024. Kemudian, Draft Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut melalui Surat Kepala BPSPL Padang Nomor B.1553/BPSPL.1/TU.210/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024.



Gambar 26. Dokumentasi Pembahasan Draft PKS Bersama Tim Sekretariat DJPKRL

Kemudian, setelah melalui penyesuaian, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPSPL Padang dengan FKP USK tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Melalui Dukungan Penguatan Sumber Daya Manusia, Kajian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang diselenggarakan pada 5 September 2024 di Ruang Rapat Dekanat FKP USK.



Gambar 27. Dokumentasi Penandatanganan PKS dengan FKP USK

Kemudian, BPSPL Padang kembali melakukan penajakan kerja sama dengan mitra potensial lainnya. Pada 27 September 2024, BPSPL Padang mengundang Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang (UNP) dalam rangka pembahasan usulan ruang lingkup dan rencana aksi perjanjian kerja sama.

#### F. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung oleh alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2362.PEC] Kerja Sama. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan Rincian Output kegiatan tersebut.

Tabel 20. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 5

No	Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2362.PEC.001] Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	70.000.000,00	17.645.000,00	25,21
	<b>Total</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>17.645.000,00</b>	<b>25,21</b>

Realisasi anggaran pada KRO [2362.PEC] adalah 25,21%.

## IKU. 6. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kelompok)

Bantuan konservasi merupakan bantuan penyediaan sarana dan prasarana konservasi yang bertujuan untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan/atau jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi, diberikan kepada kelompok masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan, pengawasan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati laut secara berkelanjutan. Dalam hal ini, pelaksanaan kegiatan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 71 Tahun 2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2024. Adapun pencapaian IKU ini dihitung dari jumlah kelompok konservasi yang telah diberikan bantuan sesuai petunjuk teknis tersebut.

### A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Rincian target IKU 6 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 21. Perbandingan Target dan Capaian IKU 6

IKU 6. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kelompok)				
Realisasi		Triwulan III 2024		
Triwulan III 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
3	2	3	200 atau 120 menurut SAPK Kinerjaaku	-

Hingga triwulan III 2024, BPSPL Padang telah menyalurkan bantuan konservasi kepada tiga kelompok masyarakat sebagaimana berikut.

Tabel 22. Penerima Bantuan Konservasi Hingga Triwulan III 2024

No	Nama Kelompok	Lokasi	Nilai Bantuan	Nomor dan Tanggal BAST	Item Bantuan
1	Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang	Sungai Pinang, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat	Rp100.910.070,00	B.1045/BPSPL.1/PRL.440/V/2024 tanggal 4 Mei 2024	1. Mesin tempel: 1 Unit, 2. Genset V-Gen 3000 Watt: 1 Unit, 3. Papan Nama: 1 Unit, 4. WC Portable: 1 Unit, 5. Senter Kepala: 3 Unit, 6. Pelampung: 10 Unit, 7. Tenda: 1 Unit, 8. Kamera Olympus TG-6: 1 Unit, 9. Printer: 1 Unit.
2	Kelompok Kawasan Mandeh Blue Diving	Desa Carocok Anau Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI	Rp98.670.000,00	B.1451/BPSPL.1/PRL.440/VI/2024 tanggal 9 Juni 2024	1. Kamera Underwater TG-7 + Housing PT-059: 1 Set, 2. BCD Cressi Patrol: 2 Set,

No	Nama Kelompok	Lokasi	Nilai Bantuan	Nomor dan Tanggal BAST	Item Bantuan
		Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat			3. Diving Set 2 Regulator Cressi MC9 XS Compact Pro: 2 Set, 4. Tabung Scuba Amscud 80 Cuft: 2 Set, 5. Mask Cressi Perla: 2 Set, 6. Snorkel Cressi Mexico: 2 Set, 7. Long Wetsuit Cressi Fast 3 mm: 2 Set, 8. Fin OH Cressi Thor: 2 Set, 9. Long Boot Cressi Patriot 5 mm: 2 Set.
3	Lembaga Ekowisata Pulo Aceh	Dusun I Gampong Bugop Kemukiman Pulau Breueh Selatan, Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh	Rp100.005.000,00	B.2122/BPSPL.1/PRL.440/IX/2024 Tanggal 6 September 2024	Pondok Wisata: 1 Unit

Data dukung:

[https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PaHoP4\\_CYIOs\\_ByWAru0EKj1wyOGdIUE](https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PaHoP4_CYIOs_ByWAru0EKj1wyOGdIUE)

#### B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya

Pada triwulan III 2023, BPSPL Padang telah menyalurkan bantuan konservasi kepada 3 kelompok, yaitu Kelompok Poseidon Diver Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 30 Maret 2023, Kelompok Banyu Biru di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 21 Juni 2023, dan Pokmaswas Hiu Macan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada 26 Juli 2024. Maka dari itu, tidak terdapat kenaikan capaian antara triwulan III 2023-2024 karena memiliki realisasi yang sama.

#### C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan

Pada triwulan III 2024, BPSPL Padang telah mencapai tiga kelompok dari target tiga kelompok yang disalurkan bantuan konservasi. Maka dari itu, persentase pemenuhan target tahunan telah mencapai 100%.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja

dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Tidak terdapat indikator kinerja pada Rencana Strategis DJPRL yang dapat dibandingkan langsung dengan indikator ini. Indikator pada Rencana Strategis DJPRL memiliki rincian yang sama dengan Rincian Target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dijadikan acuan pada perbandingan dengan standar nasional.

*Tabel 23. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 6 BPSPL Padang*

Program	Indikator	Indikasi Target					Lokasi
		2020	2021	2022	2023	2024	
Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	Jejaring kemitraan konservasi yang mendukung konservasi keanekaragaman hayati laut	20	5	5	5	5	Pusat

Dalam hal ini, indikator kinerja Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang merupakan indikator pendukung dalam pencapaian target Renstra DJPRL dan RPJMN 2020-2024 karena memiliki nomenklatur dan satuan berbeda. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dan standar nasional, indikator kinerja ini memiliki sifat kontributif yang tidak dapat dibandingkan capaiannya.

**D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Pencapaian IKU ini didukung dengan dilakukannya identifikasi calon kelompok penerima bantuan yang menyeluruh sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi. Tim pelaksana juga telah menyiapkan form seleksi dalam rangka memperoleh kelompok yang benar-benar sesuai. Melalui tahapan identifikasi, tim BPSPL Padang dapat memahami lingkup kegiatan yang diusung oleh kelompok secara menyeluruh hingga mengidentifikasi kebutuhan sarana/prasarana yang diajukan kelompok. Selain itu, tahapan identifikasi serta verifikasi yang menyeluruh juga dapat menghasilkan kelompok yang benar-benar sesuai dengan persyaratan yang dimandatkan dalam Petunjuk Teknis. Jika kelompok yang terpilih sebagai penerima bantuan tersebut betul-betul layak dan sesuai, diharapkan bantuan pun dapat dimanfaatkan dan mendukung pengembangan upaya konservasi kelompok di wilayahnya. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan KOMPAK, tahapan pengadaan barang jasa merupakan tahapan krusial yang dapat mengancam keberhasilan kegiatan secara tepat waktu. Untuk ke depannya, tim dapat mengupayakan pencegahan permasalahan dalam tahapan pengadaan barang dan jasa dengan melakukan pemantauan secara menyeluruh dari tahap perencanaan hingga pelaporan.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada pelibatan tim dari wilayah kerja terdekat pada setiap tahapan penyaluran bantuan konservasi. Hal tersebut mendukung efisiensi anggaran dan waktu yang dibutuhkan.

**E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Keberhasilan/kegagalan pencapaian IKU ini dapat ditunjang oleh kegiatan koordinasi dan pelaporan progress perkembangan penyaluran bantuan dengan Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Pelaporan yang tertib dan sesuai dapat mendukung aspek akuntabilitas dalam penyaluran bantuan.

Hingga triwulan III 2024, kegiatan pendukung IKU 6 antara lain sebagai berikut.

**a. Verifikasi Usulan Bantuan Konservasi Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang**

Dalam rangka penyaluran bantuan konservasi, BPSPL Padang melaksanakan verifikasi usulan bantuan terhadap Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang di Kabupaten Pesisir Selatan pada Jumat, 23 Februari 2024.

Berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan administrasi Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang telah lengkap dan memenuhi syarat. Namun demikian, terdapat penyesuaian usulan bantuan yang disampaikan karena menyesuaikan dengan Petunjuk Teknis dan aktivitas kelompok. Usulan bantuan yang disepakati adalah mesin tempel, senter infrared, kamera, generator listrik, panel surya, pelampung, laptop, printer, tenda, dan plang nama. Usulan ini akan menjadi acuan untuk proses selanjutnya.



Gambar 28. Dokumentasi Verifikasi Usulan Bantuan Konservasi Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang

**b. Penetapan Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang sebagai Penerima Bantuan Konservasi Tahun 2024**

Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang yang beralamat di Desa Sungai Pinang, Koto XI Tarusan, Pesisir Selatan telah ditetapkan sebagai penerima bantuan konservasi tahun 2024 melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Nomor B.814/BPSPL.1/PRL.440/IV2024 tanggal 1 April 2024.

**c. Serah Terima Bantuan Konservasi kepada Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang**

Serah terima bantuan konservasi kepada Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang diselenggarakan di Pandan View Mandeh Resort and Resto, Pesisir Selatan pada Selasa, 14 Mei 2024.



Gambar 29. Dokumentasi Serah Terima Bantuan Konservasi kepada Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang

**d. Verifikasi Usulan Bantuan Kelompok Kawasan Mandeh Blue Diving**

Verifikasi usulan bantuan konservasi Kelompok Kawasan Mandeh Blue Diving dilaksanakan pada 9 Mei 2024. Berdasarkan hasil verifikasi, usulan bantuan yang disepakati adalah kamera bawah air, regulator, Buoyancy Compensator Device (BCD), tabung SCUBA, masker, snorkel, wetsuit, fin open heel, dan long boot.

**e. Penetapan Kelompok Kawasan Mandeh Blue Diving sebagai Penerima Bantuan Konservasi Tahun 2024**

Kelompok Kawasan Mandeh Blue Diving yang beralamat di Desa Cerocok Anau Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Pesisir Selatan telah ditetapkan sebagai penerima bantuan konservasi tahun 2024 melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Nomor B.1219/BPSPL.1/PRL.440/V2024 tanggal 22 Mei 2024.

**f. Serah Terima Bantuan Konservasi kepada Kelompok Kawasan Mandeh Blue Diving**

Serah terima bantuan konservasi kepada Kelompok Kawasan Mandeh Blue Diving dilaksanakan di Pesisir Selatan pada Senin, 3 Juni 2024.



Gambar 30. Dokumentasi Serah Terima Bantuan Konservasi kepada Kelompok Kawasan Mandeh Blue Diving

**g. Verifikasi Usulan Bantuan Kelompok Lembaga Ekowisata Pulo Aceh**

Verifikasi usulan bantuan konservasi Kelompok Lembaga Ekowisata Pulo Aceh dilaksanakan pada 1 Juli 2024. Berdasarkan hasil verifikasi, usulan bantuan yang disepakati adalah pondok wisata.

**h. Penetapan Kelompok Lembaga Ekowisata Pulo Aceh sebagai Penerima Bantuan Konservasi Tahun 2024**

Kelompok Lembaga Ekowisata Pulo Aceh yang beralamat di Dusun I Gampong Gugop Kemukiman Pulau Breueh Selatan, Kabupaten Aceh Besar telah ditetapkan sebagai penerima bantuan konservasi tahun 2024 melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Nomor B.1745/BPSPL.1/PRL.440/VII2024 tanggal 18 Juli 2024.

**i. Serah terima Bantuan Konservasi kepada Kelompok Lembaga Ekowisata Pulo Aceh**

Serah terima bantuan konservasi kepada Lembaga Ekowisata Pulo Aceh dilaksanakan di Dusun I Gampong Gugop, Kabupaten Aceh Besar pada 6 September 2024.



Gambar 31. Dokumentasi Serah Terima Bantuan Konservasi kepada Kelompok LEPA

## F. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU 6 didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2362.QEH] Bantuan Kelompok Masyarakat dengan Rincian Output (RO) [2362.QEH.001] Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 24. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 6

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2362.QEH.001.051] Pemberian Bantuan KOMPAK	362.200.000,00	360.292.832,00	99,47
<b>Total</b>		<b>362.200.000,00</b>	<b>360.292.832,00</b>	<b>99,47</b>

**Realisasi anggaran komponen [2362.QEH.001.051] adalah 99,47%.** Adapun anggaran tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan identifikasi dan verifikasi kelompok penerima bantuan.

## IKU. 7. Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Padang yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)

Kelompok masyarakat di kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru adalah kelompok masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Capaian IKU ini dihitung dari inventarisasi dan penjumlahan kelompok masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru di wilayah kerja BPSPL Padang.

### A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Rincian target IKU 7 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 25. Perbandingan Target dan Capaian IKU 7

IKU 7. Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Padang yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)				
Realisasi		Triwulan III 2024		
Triwulan III 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	-	-	-	-

Hingga berakhirnya periode triwulan III 2024, belum terdapat perolehan capaian terhadap IKU 7 karena ditargetkan pada periode tahunan. Anggaran pendukung kegiatan ini sempat mengalami blokir. Namun demikian, dalam perkembangannya blokir tersebut telah dibuka yang disertai dengan perubahan Klasifikasi Rincian Output pendukung kegiatan.

### B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya

Tidak terdapat perbandingan capaian pada triwulan III 2023-2024. Pada tahun 2023, IKU ini tidak digunakan dalam pengukuran kinerja karena anggaran pendukungnya terdampak blokir hingga akhir tahun.

### C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan III 2024 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Tidak terdapat indikator kinerja pada Rencana Strategis DJPRL yang dapat dibandingkan langsung dengan indikator ini. Indikator pada Rencana Strategis DJPRL memiliki rincian yang sama dengan Rincian Target pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dijadikan acuan pada perbandingan dengan standar nasional.

Tabel 26. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 6 BPSPL Padang

Program	Indikator	Indikasi Target					Lokasi
		2020	2021	2022	2023	2024	
Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	Jejaring kemitraan konservasi yang mendukung konservasi keanekaragaman hayati laut	20	5	5	5	5	Pusat

Dalam hal ini, indikator kinerja Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Padang yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru merupakan indikator pendukung dalam pencapaian target Renstra DJPRL dan RPJMN 2020-2024 karena memiliki nomenklatur dan satuan berbeda. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dan standar nasional, indikator kinerja ini memiliki sifat kontributif yang tidak dapat dibandingkan capaiannya.

#### D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Anggaran pendukung kegiatan ini sempat terdampak blokir sehingga belum terdapat realisasi kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini. Adapun blokir tersebut telah terbuka pada Juni 2024 sehingga kegiatan pendukung IKU ini akan mulai dilaksanakan pada Juli 2024. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pun belum dapat dilakukan pada indikator ini karena tahapan kegiatannya belum terlaksana.

#### E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adanya blokir anggaran pendukung selama periode Januari hingga Juni terhadap anggaran pendukung kegiatan ini mempengaruhi pergerakan tim dalam memulai pelaksanaan kegiatan. Hingga triwulan III 2024, belum terdapat realisasi kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini.

#### F. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU 7 awalnya didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2362.REA] Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem dengan Rincian Output (RO) [2362.REA.003] Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan. Namun demikian, KRO tersebut mengalami blokir. Dalam perkembangannya, terjadi pembukaan blokir dan kegiatan ini memiliki KRO dan RO pendukung yang berbeda. Saat ini IKU 7 didukung oleh KRO [2362.SCC] Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan dengan RO [2362.SCC.002] Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 27. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 7

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2362.SCC.002.051] Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi	200.000.000,00	-	-
<b>Total</b>		<b>200.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Realisasi anggaran komponen [2362.SCC.002.051] adalah 0% karena sempat terkendala oleh blokir anggaran. Komponen ini memiliki pagu senilai Rp200.000.000,00 yang bersumber dari rupiah murni senilai Rp100.000.000,00 dan bersumber dari PNPB senilai Rp100.000.000,00.

## **IKU. 8. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)**

Jenis ikan yang terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi, dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja kerja BPSPL Padang adalah Jenis ikan yang diintervensi perlindungan/pelestariannya melalui pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat/pemulihan populasi, atau penanganan biota dilindungi untuk kesinambungan keanekaragaman hayati perairan. Capaian IKU ini dihitung dari inventarisasi dan penjumlahan jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Padang.

Upaya perlindungan dan/atau pelestarian jenis ikan terancam punah yang dilaksanakan, melalui:

- a. Pendataan jenis ikan dilindungi/terancam punah dengan target jenis: sidat, teripang, penyu, karang, ikan belida, terubuk, ikan bilih dan arwana,
- b. Perbaikan habitat/pemulihan populasi dan/atau pengayaan stok jenis ikan dengan target jenis karang
- c. Penyadartahuan/edukasi dan sosialisasi keanekaragaman hayati perairan dilindungi/terancam punah serta Penanganan biota laut dilindungi/terancam punah dengan target jenis biota laut dilindungi.

### **A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan**

Rincian target IKU 8 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

*Tabel 28. Perbandingan Target dan Capaian IKU 8*

<b>IKU 8. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)</b>				
<b>Realisasi</b>		<b>Triwulan III 2024</b>		
<b>Triwulan III 2023</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>	<b>% Kenaikan 2023-2024</b>
-	-	-	-	-

Hingga berakhirnya triwulan III 2024, belum terdapat perolehan capaian terhadap IKU ini. IKU ini merupakan indikator kinerja yang ditargetkan dengan periode tahunan.

### **B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya**

Pada triwulan III 2023, tidak terdapat realisasi capaian pada IKU ini. Kemudian, pada tahun 2024 ini, target pencapaian jenis dijadwalkan tahunan. Atas dasar hal tersebut, tidak terdapat kenaikan capaian dari triwulan III 2023 ke triwulan III 2024 karena pada periode tersebut tidak terdapat realisasi capaian.

### **C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan**

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan III 2024 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Tidak terdapat indikator kinerja pada Rencana Strategis DJPRL yang dapat dibandingkan langsung dengan indikator ini. Indikator pada Rencana Strategis DJPRL memiliki rincian yang sama dengan Rincian Target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dijadikan acuan pada perbandingan dengan standar nasional.

Tabel 29. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 8 BPSPL Padang

Program	Indikator	Indikasi Target					Lokasi
		2020	2021	2022	2023	2024	
Keanekaragaman hayati perairan terancam punah yang dilindungi dan/atau dilestarikan	Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dan/atau dilestarikan	6	10	14	18	20	Pusat

Dalam hal ini, indikator kinerja Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang merupakan indikator pendukung dalam pencapaian target Renstra DJPRL dan RPJMN 2020-2024 karena memiliki nomenklatur dan satuan berbeda. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dan standar nasional, indikator kinerja ini memiliki sifat kontributif yang tidak dapat dibandingkan capaiannya.

**D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Upaya pencapaian IKU 8 tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Dalam pendataan sidat, penyuluhan, belida, terubuk, dan ikan bilih, tim BPSPL Padang dibantu oleh enumerator sehingga diperoleh pendataan *time series*. Pada jenis karang, pendataan juga dibantu oleh Kelompok Masyarakat di Aceh Barat Daya, Pesisir Selatan, dan Bintan. Selain itu, dukungan dari pihak lain juga terdapat pada kegiatan respon cepat penanganan biota terdampar. Pada kegiatan respon cepat, BPSPL Padang kerap berkolaborasi dengan Kelompok Masyarakat, Dinas, LSM, dan stakeholder setempat lainnya. Sementara itu, pada kegiatan yang membutuhkan survei lapangan secara langsung, seperti monitoring *coral stock center*, pendataan sidat, pendataan arwana, dan monitoring teripang, tim pelaksana juga melakukan perencanaan dan persiapan yang mengantisipasi adanya kemungkinan cuaca buruk. Tim survei juga membekali diri dengan peralatan yang memadai untuk survei menyesuaikan dengan data yang dibutuhkan dan tipe kegiatan yang dilakukan. Antisipasi tersebut diperlukan untuk memastikan keselamatan tim dan kesesuaian data yang terkumpul. Tanpa adanya pertimbangan tersebut, pelaksanaan kegiatan dapat terhambat dan berimplikasi pada kualitas pendataan. Selama proses pelaksanaan kegiatan, BPSPL Padang telah mengantisipasi terjadinya hal-hal yang diduga dapat menghambat capaian sehingga tidak ditemukan kendala/permasalahan yang tidak dapat diatasi.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi dalam penyeteroran data dari enumerator berbasis daring. Selain itu, terjalinnya kerja sama dan komunikasi aktif dengan stakeholder lain juga dilakukan untuk penanganan jenis ikan terdampar di lokasi yang terkendala jarak dan akses.

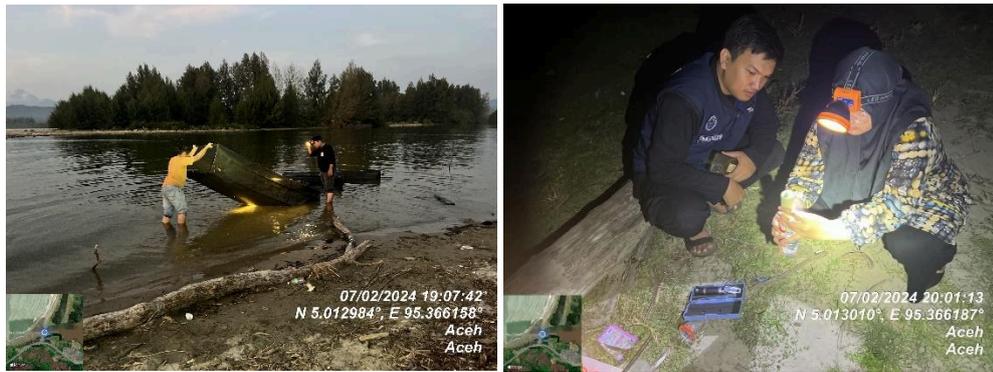
**E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Upaya pencapaian IKU 8 dapat ditunjang oleh kegiatan supervisi yang perlu dilakukan secara rutin dan menyeluruh kepada tenaga enumerator. Hal tersebut penting untuk dilakukan agar kualitas data yang dikumpulkan dapat terjaga. Dalam hal kegiatan penanganan, koordinasi dan komunikasi aktif dengan *stakeholder* lain juga penting agar dapat menjangkau lokasi keterdamparan yang terkendala jarak dan akses. Berikut adalah kegiatan pendukung keberhasilan capaian IKU 8.

**1. Sidat**

**a. Pendataan Sidat di Kabupaten Aceh Jaya**

Pendataan sidat di Kabupaten Aceh Jaya dilaksanakan di Kecamatan Indra Jaya selama sebelas bulan dengan dibantu oleh dua tenaga enumerator. Dalam kurun waktu tersebut, pendataan dilakukan selama lima - enam hari setiap bulannya atau 60 hari selama sebelas bulan. Adapun metode yang dilakukan adalah survei langsung menggunakan alat tangkap bubu jaring yang memiliki frame besi dengan dimensi Tinggi 50 cm, Lebar 100 cm, Panjang 300 cm.



Gambar 32. Dokumentasi Supervisi Pendataan Sidat di Kabupaten Aceh Jaya

### b. Pendataan Sidat di Kabupaten Aceh Besar

Pendataan sidat di Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan di Muara Beureunut, Kecamatan Seulimeum. Metode yang dilakukan adalah pengumpulan data terkait potensi sidat pada stadia *glass eel* menggunakan tiga alat tangkap bubu ukuran 3 m x 1 m x 50 cm yang dilaksanakan setiap triwulan untuk mengetahui puncak kemunculan sidat. Pendataan telah dilaksanakan pada 9 s.d. 11 Maret 2024, 7 s.d. 9 Mei 2024, dan 5 s.d. 7 Juli 2024.



Gambar 33. Dokumentasi Pendataan Sidat di Kabupaten Aceh Besar

### c. Pendataan Sidat di Kabupaten Agam

Pendataan sidat di Kabupaten Agam dijadwalkan pada musim penghujan dengan estimasi bulan Oktober dan November.

## 2. Teripang

Pendataan teripang di Pulau Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai dilaksanakan pada 3 s.d. 7 Maret 2024. Adapun metode yang digunakan adalah wawancara terkait pemanfaatan teripang dan survei sebaran teripang. Responden pada wawancara adalah pengepul dan nelayan teripang. Berdasarkan hasil wawancara, teripang yang paling banyak dikumpulkan adalah teripang gamat/kacang, pulut, dan karang dengan rata-rata per hari terkumpul kurang dari 10 kg atau sebulan mencapai 50 kg. Harga jual teripang tertinggi, yaitu jenis gamat, mencapai Rp950.000,00/kg dan tertinggi adalah teripang pulut dan karang seharga Rp350.000,00/kg. Untuk menangkap teripang, nelayan menyelam secara manual pada kedalaman 4 s.d. 7 meter dan menggunakan kompresor hingga kedalaman 10 s.d. 15 meter tanpa bantuan alat tangkap. Penangkapan dilakukan sepanjang tahun.

Lebih lanjut, survei sebaran teripang dilaksanakan dengan metode jelajah di tujuh titik survei, yaitu Simakakkang, Pulau Siburu, Putotogot, Jati, Taitaiumatsiteut bagian luar, Simobuk, dan Taitaiumatsiteut bagian dalam. Adapun panjang lintasan di tujuh lokasi survei tersebut berkisar antara 300-900 meter dengan kedalaman 3 s.d. 20 meter. Penyelaman dilakukan selama 3 malam bersama nelayan lokal. Hasil pendataan tersebut disajikan pada tabel di bawah ini dan akan dianalisis lebih lanjut.

Tabel 30. Hasil Survei Sebaran Teripang di Pulau Sipora

No	Lokasi	Hasil Survei
1	Simakakkang	Ditemukan 6 ekor teripang dari jenis <i>Thelenota anax</i> , <i>Stichopus</i> spp., dan <i>Holothuria edulis</i>
2	Pulau Siburu	Ditemukan 14 ekor teripang dari jenis <i>Bohadschia marmorata</i> , <i>Stichopus</i> spp., <i>Holothuria atra</i> , dan <i>Holothuria edulis</i>
3	Putotogat	Ditemukan 10 ekor teripang dari jenis <i>Bohadschia marmorata</i> , <i>Stichopus</i> spp., dan <i>Holothuria atra</i>
4	Jati	Ditemukan 8 ekor teripang dari jenis <i>Bohadschia marmorata</i> , <i>Stichopus</i> spp., dan <i>Holothuria atra</i>
5	Taitaiumatsiteut bagian luar	Ditemukan 37 ekor teripang dari jenis <i>Stichopus</i> spp., <i>Pearsonothuria graeffei</i> , <i>Holothuria fuscocinerea</i> , <i>Bohadschia vitiensis</i> , <i>Bohadschia marmorata</i> , dan <i>Holothuria atra</i>
6	Simobuk	Ditemukan 15 ekor teripang <i>Pearsonothuria graeffei</i> , <i>Bohadschia vitiensis</i> , <i>Bohadschia marmorata</i> , dan <i>Holothuria atra</i>
7	Taitaiumatsiteut bagian dalam	Ditemukan 9 ekor teripang dari jenis <i>Stichopus</i> spp., <i>Pearsonothuria graeffei</i> , dan <i>Bohadschia vitiensis</i> .



Gambar 34. Dokumentasi Pendataan Teripang di Pulau Sipora, Kabupaten Kep. Mentawai

### 3. Penyu

#### a. Pendataan Penyu di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Pendataan pendaratan penyu dilaksanakan di Pantai Buggeisiata, Desa Betumonga, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pendataan dilaksanakan pada musim peneluran penyu, yaitu bulan Januari, Februari, Maret, dan Desember dengan sistem *shifting* pada setiap malam dibantu oleh tenaga enumerator. Adapun pendataan aktivitas pendaratan, jejak, dan sarang dilaksanakan melalui patroli malam. Kegiatan ini didukung oleh Perjanjian Kerja Sama antara BPSPL Padang dengan Yayasan Penyu Indonesia.



Gambar 35. Dokumentasi Pendataan Penyu di Kabupaten Kepulauan Mentawai

#### b. Pendataan Penyu di Pulau Salaut Besar, Kabupaten Simelue

Pendataan penyu di Pulau Salaut Besar berlangsung pada Januari, Februari, November, dan Desember, yang mana juga didukung oleh Perjanjian Kerja Sama dengan Yayasan Penyu Indonesia. Sama halnya dengan pendataan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, pendataan dilaksanakan dengan sistem *shifting* pada setiap malam dibantu oleh tenaga enumerator.



Gambar 36. Dokumentasi Pendataan Penyu di Pulau Salaut Besar

#### 4. Karang

##### a. Pendataan dan Monitoring Terumbu Karang di KKPD Aceh Barat Daya

Pendataan dan monitoring terumbu karang di Kabupaten Aceh Barat Daya dilaksanakan di perairan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Aceh Barat Daya, Kecamatan Susoh. Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2022 dengan metode rehabilitasi berupa meja transplantasi dan coral tree nursery. Hingga saat ini, meja transplantasi yang telah terpasang adalah 25 unit dan coral tree nursery yang telah terpasang berjumlah 10 unit. Adapun pendataan dibantu oleh Kelompok Pusong Diving Club di Aceh Barat Daya dengan frekuensi pendataan 10 kali dalam satu tahun.



Gambar 37. Dokumentasi Pendataan dan Monitoring Terumbu Karang di Aceh Barat Daya

##### b. Pendataan dan Monitoring Terumbu Karang di KKPD Aceh Besar

Pendataan dan monitoring terumbu karang di Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan di perairan sekitar Pulau Tuan, Ujung Pancu, Kecamatan Peukan Bada. Kegiatan ini dilakukan berkolaborasi dengan Ocean Diving Club (ODC) Universitas Syiah Kuala. Adapun total fragmen transplantasi karang yang ditanam berjumlah 60 pieces.



Gambar 38. Dokumentasi Pendataan dan Monitoring Terumbu Karang di Aceh Besar

##### c. Pendataan dan Monitoring Terumbu Karang di Kabupaten Pesisir Selatan

Monitoring dan pemeliharaan *coral stock center* dilaksanakan di Perairan Batu Kajang, Nagari Sungai Pinang, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun model rehabilitasi yang

dilakukan adalah metode rak besi dan beton sejumlah 66 unit (51 unit beton dan 15 unit besi) dengan jumlah bibit karang yang ditanam 306 pieces pada rak beton dan 240 pieces pada rak besi. Pada tahun 2024, pendataan dijadwalkan dengan frekuensi tiga kali dalam setahun.



Gambar 39. Dokumentasi Pendataan dan Monitoring Terumbu Karang di Pesisir Selatan.

#### d. Rehabilitasi Terumbu Karang

BPSPL Padang telah melaksanakan survei identifikasi lokasi rehabilitasi terumbu karang di dua lokasi, yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat dan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Survei di Pasaman Barat dilaksanakan pada 1 s.d. 4 Mei 2024, sementara survei di Bintan dilaksanakan pada 6 s.d. 9 Mei 2024.



Gambar 40. Dokumentasi Survei Identifikasi Lokasi Rehabilitasi Terumbu Karang di Pasaman Barat



Gambar 41. Dokumentasi Survei Identifikasi Lokasi Rehabilitasi Terumbu Karang di Bintan

Dalam perkembangannya, kegiatan rehabilitasi terumbu karang dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Bintan.

- **Rehabilitasi Terumbu Karang di Kabupaten Pesisir Selatan**

Kegiatan dilaksanakan di Perairan Batu Kajang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat berkolaborasi dengan Andespin Deep West Sumatera dan Yayasan Minang Bahari. Media transplantasi yang digunakan adalah 10 rak/meja dengan dimensi 100 x 100 cm. penanaman anakan karang dilakukan sebanyak 25 anakan karang untuk setiap meja/rak besi. Total anakan karang yang ditransplantasi berjumlah 250 fragmen pada rak/meja besi. Lebih lanjut, dilakukan monitoring pada Agustus 2024.



Gambar 42. Dokumentasi Rehabilitasi Karang di Pesisir Selatan

- **Rehabilitasi Terumbu Karang di Kabupaten Bintan**

Kegiatan dilaksanakan di Perairan Pantai Dugong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau berkolaborasi dengan Pokdarwis Bintan Neemo. Media transplantasi yang digunakan adalah empat unit rak/meja besi berdimensi 100 x 100 cm<sup>2</sup> dengan tinggi sekitar 50 cm dan 100 cm, 5 media coral tree, dan 9 media obor. Penanaman anakan karang dilakukan di masing-masing media dengan total anakan karang yang ditransplantasi berjumlah 244 fragmen pada seluruh media. Jenis anakan karang yang ditanam sebanyak 2 genera, yaitu genus *Acropora* dan *Pocillopora*. Lebih lanjut, dilakukan monitoring pada bulan Agustus dan September 2024.



Gambar 43. Dokumentasi Rehabilitasi Karang di Bintan

## 1. Ikan Belida

### a. Pendataan *Time-Series*

Pendataan *time-series* ikan belida dilaksanakan di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan dalam kurun waktu Januari hingga Desember dibantu oleh enumerator selama 300 hari dalam satu tahun anggaran. Di Kabupaten Tebo, Jambi, pengumpulan data di lapangan menggunakan alat tangkap pukat (jaring insang). Sementara itu, di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, pengumpulan data belida di lapangan menggunakan alat tangkap pengilar (perangkap). Dalam hal ini, tim BPSPL Padang turut melaksanakan supervisi pendataan.



Gambar 44. Dokumentasi Supervisi Pendataan Belida di Kabupaten Tebo



Gambar 45. Dokumentasi Supervisi Pendataan Belida di Kabupaten Muara Enim

### b. Survei Sebaran Pendataan Ikan Belida

Survei sebaran pendataan Ikan Belida telah dilakukan di Provinsi Sumatra Selatan dan Jambi. Di Provinsi Sumatra Selatan, survei di Kabupaten Ogan Ilir dilaksanakan pada 19 s.d. 22 Februari 2024, di Kota Prabumulih pada 11 s.d. 14 Juni 2024 dan di Kabupaten Musi Banyuasin pada 23 s.d. 25 Juli 2024. Metode yang digunakan adalah survei langsung, pengumpulan data sosial ekonomi,

pengumpulan data sekunder, dan pengamatan aktivitas antropogenik. Di Kabupaten Ogan Ilir, ditemukan ikan Belida Jawa sementara di Kota Prabumulih ditemukan Belida Sumatera. Lebih lanjut, survei di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi telah dilaksanakan pada 20 s.d. 23 Februari 2024 dan 16 s.d. 19 Juli 2024 dengan ikan belida yang ditemukan berjenis Belida Sumatera (*Chitala hypselonotus*).



Gambar 46. Dokumentasi Survei Sebaran Belida di Kabupaten Ogan Ilir



Gambar 47. Dokumentasi Survei Sebaran Belida di Kota Prabumulih



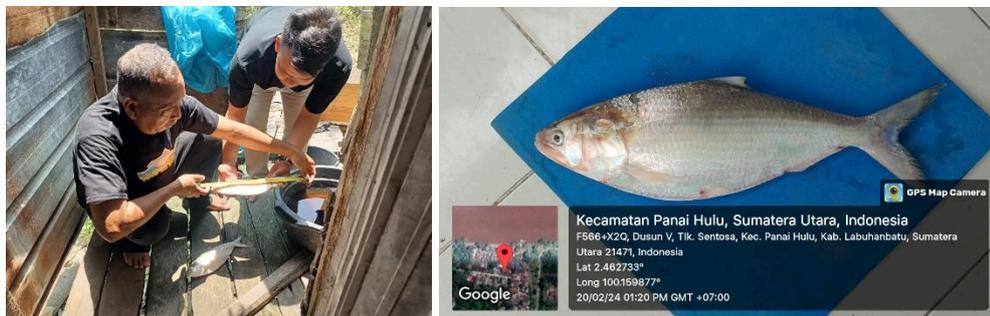
Gambar 48. Dokumentasi Survei Sebaran Belida di Kabupaten Bungo

## 6. Terubuk

Pendataan ikan terubuk dilaksanakan di dua provinsi, yaitu Sumatera Utara dan Riau selama sepanjang tahun pada Januari hingga Desember. Di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatra Utara, pendataan terubuk jenis *Tenualosa ilisha* dilaksanakan sepanjang tahun dibantu oleh tenaga enumerator. Sementara itu, di Bengkalis dan Siak, Provinsi Riau pendataan terubuk jenis *Tenualosa macrura* dilakukan pada fase bulan gelap (27, 28, 29, 30) dan bulan terang (13, 14, 15, dan 16) penanggalan hijriah dengan dibantu oleh tenaga enumerator. Adapun metode analisis data yang dilakukan adalah pendekatan *Length Based-Spawning Potential Ratio* (LB-SPR) yang dapat menggambarkan status eksploitasi stok perikanan, yang secara umum dapat mengacu kepada kriteria yang ditetapkan oleh NOAA Fisheries dalam Badaruddin (2013) sebagai berikut.

SPR	< 30%	30 – 50%	> 50%
Status Eksploitasi	<b>MERAH</b>	<b>KUNING</b>	<b>HIJAU</b>
	Over-exploited	Fully-exploited	Under-exploited

Gambar 49. Status Eksploitasi Perikanan Berdasarkan Nilai SPR



Gambar 50. Dokumentasi Supervisi Pendataan Terubuk di Labuhan Batu



Gambar 51. Dokumentasi Supervisi Pendataan Terubuk di Kabupaten Bengkalis

## 7. Ikan Bilih

Pendataan ikan bilih berfokus di Danau Singkarak yang berlokasi di Kabupaten Solok dan Tanah Datar. Hingga Triwulan III 2024, telah dilaksanakan pendataan yang disertai dengan supervisi enumerator pendataan ikan bilih. Adapun lokasi pendataan yang ditetapkan antara lain Nagari Sumpur, Muara Pingai dan X Koto Singkarak sedangkan jenis alat tangkap yang digunakan antara lain jala (sungai dan danau), jaring dan bagan. Pendataan dilaksanakan dari bulan Januari hingga Desember 2024 selama 8 hari pendataan per bulan.



Gambar 52. Dokumentasi Supervisi Pendataan Ikan Bilih di Danau Singkarak

## 8. Arwana

Pendataan arwana direncanakan di tiga provinsi, yaitu Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan. Hingga Triwulan III 2024, BPSPL Padang telah melaksanakan survei potensi dan pendataan arwana di Kabupaten Sarolangun, Jambi, Kabupaten Ogan Ilir dan Muara Enim, Sumatra Selatan, dan Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

### a. Survei Potensi Arwana di Kabupaten Sarolangun, Jambi

Survei potensi arwana di Kabupaten Sarolangun, Jambi dilaksanakan pada 20 s.d. 22 Maret 2024 untuk mengumpulkan informasi awal keberadaan arwana di Kawasan Konservasi Ikan Arwana Sarolangun yang berada dalam pengawasan Pokmaswas Siluk Kutur. Kawasan Konservasi Ikan Arwana Sarolangun merupakan habitat alami ikan arwana silver jambi/green/pino (*Scleropages formosus*). Arwana silver jambi tersebut terakhir kali tertangkap pada tahun 2022 dengan alat tangkap tajur. Arwana tersebut sempat ditangkap di kolam milik Kepala Desa namun akhirnya mati karena kekurangan oksigen. Kondisi perairan di sekitar Kawasan Konservasi Ikan Arwana Sarolangun saat ini keruh. Hal ini disebabkan maraknya penambangan emas tanpa izin (PETI) di hulu sungai yang berdampak pada kekeruhan di sepanjang aliran sungai. Selain karena itu, pengambilan ikan arwana di alam oleh masyarakat luar desa secara berlebihan sejak 2010 juga menyebabkan semakin sulit ditemukannya arwana di Kawasan Konservasi tersebut.



Gambar 53. Dokumentasi Survei Potensi Pendataan Arwana di Kab. Sarolangun

### b. Survei Pendataan Arwana di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatra Selatan

Survei pendataan arwana di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan dilaksanakan pada 3 Mei 2024 dengan metode wawancara kepada nelayan yang pernah mendapatkan ikan arwana maupun yang pernah melihat ikan arwana di sungai tempat nelayan tersebut memancing ikan. Berdasarkan hasil survei di lapangan melalui wawancara kepada dua orang nelayan di Desa Burai mengenai ikan Arwana, didapatkan informasi bahwa ikan Arwana sudah tidak pernah terlihat lagi sejak tahun 2008. Pada tahun tersebut pun hanya terlihat 1 ikan Arwana Hijau pada bulan September yang berukuran lumayan besar dengan berat sekitar 4 kg yang ditangkap menggunakan waring pada waktu siang hari di Sungai Kelekar. Ikan Arwana tersebut diambil dan direncanakan akan dijual di Kota Palembang dengan harga 5 juta untuk 1 ekor ikan Arwana dengan berat 4 kg. Calon pembeli memang sudah ada dan merupakan penjual ikan Arwana sebagai ikan hias. Namun saat akan diambil oleh penjual, ikan Arwana tersebut mati. Nelayan juga pernah melihat anakan Arwana pada tahun 2000an tapi saat itu tidak ditangkap namun langsung dilepas. Nelayan yang ke-dua juga menyampaikan pernah melihat Arwana pada tahun 2000-an namun tidak ditangkap. Berdasarkan informasi nelayan setempat, dari dulu di lokasi survei tidak pernah ada nelayan yang secara khusus menangkap ikan Arwana. Nelayan juga menginformasikan bahwa lokasi sungai ditemukannya ikan Arwana adalah sungai kosong yang tidak terdapat pohon maupun semak-semak dengan dasar perairan lumpur dan air sungai yang jernih, dan juga sungai jernih yang terdapat batang-batang besar dengan dasar perairan tanah. Nelayan

mengungkapkan menurunnya populasi ikan Arwana dimungkinkan karena rusaknya habitat dikarenakan limbah yang berasal dari pabrik, maupun penggunaan alat setrum yang merusak lingkungan. Selanjutnya, dilakukan pengukuran kualitas perairan tempat pernah ditemukannya ikan Arwana. Pengukuran yang dilakukan antara lain pH, suhu, dan kecerahan.



Gambar 54. Dokumentasi Survei Pendataan Arwana di Kab. Ogan Ilir

**c. Survei Pendataan Arwana di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan**

Survei pendataan arwana di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan dilaksanakan pada 13 s.d. 15 Mei 2024. Berdasarkan hasil wawancara kepada Nelayan di Sungai Kelekar, Desa Segayam diketahui bahwa arwana yang lebih dikenal dengan nama lokal tangkeleso ukuran dewasa terakhir kali tertangkap nelayan sekitar tahun 1999 s.d. 2000 menggunakan alat tangkap serundut di habitat sungai yang berarus sedang dan masih terdapat anakan arwana yang ditemukan pada perairan dangkal dengan dasar tanah. Terdapat ancaman terhadap habitat arwana berupa Jumlah Indukan yang sedikit, kerusakan habitat akibat adanya pencemaran yang bersumber dari limbah pabrik dari hulu sungai yang berdampak pada sepanjang aliran sungai, serta penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan berupa setrum. Lebih lanjut, berdasarkan informasi dari nelayan di Desa Sungai Rotan ikan arwana pernah tertangkap di aliran anak Sungai Lematang dengan menggunakan jaring namun saat ini sudah ditemukan lagi ikan arwana. Tim kemudian melakukan pengambilan titik koordinat lokasi tertangkapnya arwana, pengukuran kualitas air dan aktivitas antropogenik dengan menyusuri sungai menggunakan kapal.

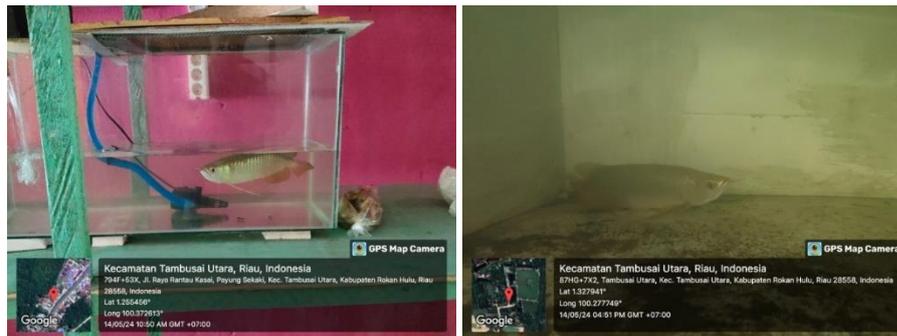


Gambar 55. Dokumentasi Survei Potensi Pendataan Arwana di Kab. Muara Enim

**d. Survei Pendataan Arwana di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau**

Survei pendataan arwana di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dilaksanakan pada 13 s.d. 17 Mei 2024. Berdasarkan hasil penelusuran, diperoleh informasi bahwa habitat arwana berlokasi di Desa Mahato dan Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara. Di samping itu, terdapat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 169 tahun 2009 tentang Penunjukkan Hutan Produksi Terbatas Mahato Kanan (Rawa Seribu) seluas 3.700 ha sebagai Kawasan Konservasi Ikan Arwana, namun belum efektif karena belum dapat menekan alih fungsi lahan dan masifnya pembukaan lahan sawit. Kawasan konservasi arwana tersebut dikelola oleh HKM Gapoktan Tambusai Utara. Gapoktan ini mendapatkan indukan arwana dengan cara membeli dari masyarakat yang melaksanakan penangkapan, kemudian

indukan tersebut dikembangkan di dalam kolam penangkaran milik kelompok. Saat ini kelompok memiliki 10 ekor indukan dan anakan yang berjumlah 17 ekor.



Gambar 56. Dokumentasi Survei Potensi Pendataan Arwana di Kab. Rokan Hulu

### 9. Respon Cepat Penanganan Jenis Ikan Dilindungi

Hingga triwulan III 2024, tercatat 21 kejadian mamalia/jenis ikan terdampar di wilayah kerja BPSPL Padang. Tabel berikut menyajikan kejadian yang ditangani langsung oleh BPSPL Padang.

Tabel 31. Rekapitulasi Respon Cepat Penanganan Jenis Ikan Dilindungi

No	Lokasi	Tanggal	Jenis	Kode	Penanganan
1	Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	5 Januari 2024	Pesut ( <i>Orcaella brevirostris</i> )	4	Dikubur
2	Pantai Sungai Nipah, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat	30 Januari 2024	Lumba-lumba pemintal ( <i>Stenella longirostris</i> )	3	Dikubur
3	Pantai Sungai Nipah, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat	12 Februari 2024	Penyu Hijau ( <i>Chelonia mydas</i> )	1	Dirawat lalu dikubur
4	Pantai Keramat, Kota Sabang, Provinsi Aceh	17 Februari 2024	Paus Pilot ( <i>Globicephala macrorhynchus</i> )	2	Dikubur
5	Pantai Lagoi Bay, Kelurahan Sebong Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	19 Februari 2024	Paus Sperma Kerdil ( <i>Kogia breviceps</i> )	1	Dirawat lalu dikubur
6	Pantai Mo'ale, Kecamatan O'ou, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatra Utara	3 Maret 2024	Paus Balin	4	Dibakar
7	Pantai Sungai Nipah, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat	14 Juli 2024	Penyu Lekang ( <i>Lepidochelys olivacea</i> )	4	Dikubur
8	Pantai Jati, Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatra Barat	19 Juli 2024	Penyu Hijau ( <i>Chelonia mydas</i> )	1	Dikubur
9	Pantai Teluk Buo, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat	14 Agustus 2024	Penyu Hijau ( <i>Chelonia mydas</i> )	3	Dikubur
10	Pantai Green Salido Park, Kampuang Balai Lamo, Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat	12 September 2024	Hiu Paus ( <i>Rhincodon typus</i> )	1	Dilepasliarkan dan dikubur
11	Pantai Samudra, Nagari Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat	15 September 2024	Hiu Paus ( <i>Rhincodon typus</i> )	1	Dikubur

- Kode kondisi keterdamparan
- Kode 1: Terdampar hidup
- Kode 2: Terdampar, baru mati
- Kode 3: Mulai membusuk
- Kode 4: Pembusukan tingkat lanjut
- Kode 5: Kerangka atau mumi



Gambar 57. Dokumentasi Penanganan Jenis Ikan Terdampar

### 10. Sosialisasi Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Terancam Punah

Sosialisasi jenis ikan dilindungi dan/atau biota terancam punah telah dilaksanakan di Desa Muaro Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi pada 25 April 2024. Pada kesempatan tersebut, disampaikan informasi jenis-jenis ikan dilindungi, terutama di perairan sungai.



Gambar 58. Dokumentasi Sosialisasi Jenis Ikan Dilindungi di Kab. Muaro Jambi

Sosialisasi jenis ikan dilindungi juga dilaksanakan di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada tanggal 25 April 2024. Selain menyampaikan informasi terkait jenis ikan dilindungi, tim juga melaksanakan pengumpulan informasi mengenai biota dilindungi dan/atau terancam punah yang ada di Kabupaten Ogan Ilir dari peserta yang hadir dimana diketahui jenis ikan Arwana sumatra, Arwana jawa, dan ikan balashark yang masih relatif mudah ditemui.



Gambar 59. Dokumentasi Sosialisasi Jenis Ikan Dilindungi di Kab. Ogan Ilir

Lebih lanjut, sosialisasi perlindungan penyu dilaksanakan di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada 30 Juli 2024. Pada kesempatan ini, disampaikan regulasi perlindungan penyu beserta isu konservasinya. Dalam hal ini, BPSPL Padang juga menghadirkan narasumber dari Yayasan Penyu Indonesia yang menyampaikan program Kerja Sama Konservasi Penyu antara BPSPL Padang dan Yayasan Penyu Indonesia.



Gambar 60. Dokumentasi Sosialisasi Perlindungan Penyu di Kab. Bintan

#### F. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU 8 didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2362.REB] Konservasi Jenis/Spesies dengan Rincian Output (RO) [2362.REB.001] Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 32. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 8

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2362.REB.001.051] Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah	649.215.000,00	425.846.037,00	65,59
2	[2362.REB.001.052] Rehabilitasi Populasi Habitat Kritis Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah	132.802.000,00	76.569.580,00	57,66
3	[2362.REB.001.053] Respon Cepat Penanganan Biota Dilindungi/Terancam Punah	60.323.000,00	40.388.831,00	66,95
4	[2362.REB.001.054] Sosialisasi Biota Dilindungi/Terancam Punah	57.660.000,00	54.389.015,00	94,33
<b>Total</b>		<b>900.000.000,00</b>	<b>597.193.463,00</b>	<b>66,35</b>

**Realisasi anggaran rincian output [2362.REB.001] secara keseluruhan adalah 66,35%.** Adapun anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan penyediaan data jenis sidat, terubuk, penyu, terumbu karang, teripang, belida, ikan bilih, arwana serta penanganan biota dilindungi terdampar. Rincian output ini bersumber dari rupiah murni senilai Rp625.000.000,00 dan bersumber dari PNPB senilai Rp275.000.000,00.

#### IKU. 9. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)

Jenis ikan yang dimaksud pada IKU ini adalah jenis yang dilakukan upaya fasilitasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendix CITES dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk appendix CITES, dan/atau *look alike species* dan survei potensi pemanfaatan. Adapun tata cara pemanfaatan jenis ikan mengacu pada Permen KP Nomor

44/PERMEN-KP/2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang terancam dalam appendix CITES. Target Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan Pemanfaatan adalah Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Kuda Laut, Napoleon, dan Sidat di wilayah kerja BPSPL Padang.

**A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan**

Rincian target IKU 9 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 33. Perbandingan Target dan Capaian IKU 9

IKU. 9 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)				
Realisasi	Triwulan III 2024			
Triwulan III 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	-	-	-	-

IKU ini tidak diukur pada triwulan III karena memiliki frekuensi pengukuran tahunan.

**B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya**

Tidak terdapat perbandingan capaian pada triwulan III 2023 – triwulan III 2024 karena IKU ini tidak memiliki frekuensi pengukuran triwulanan.

**C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan**

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan III 2024 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Tidak terdapat indikator kinerja pada Rencana Strategis DJPRL yang dapat dibandingkan langsung dengan indikator ini. Indikator pada Rencana Strategis DJPRL memiliki rincian yang sama dengan Rincian Target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dijadikan acuan pada perbandingan dengan standar nasional.

Tabel 34. Rincian Target dalam RPJMN yang Berkaitan dengan IKU 9 BPSPL Padang

Program	Indikator	Indikasi Target					Lokasi
		2020	2021	2022	2023	2024	
Keanekaragaman hayati perairan terancam punah yang dilindungi dan/atau dilestarikan	Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dan/atau dilestarikan	6	10	14	18	20	Pusat

Dalam hal ini, indikator kinerja Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang merupakan indikator pendukung dalam pencapaian target Renstra DJPRL dan RPJMN 2020-2024 karena memiliki nomenklatur dan satuan berbeda. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dan standar nasional, indikator kinerja ini memiliki sifat kontributif yang tidak dapat dibandingkan capaiannya.

**D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Upaya pencapaian IKU 9 tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Dalam pendataan hiu, pari, dan kuda laut, tim BPSPL Padang dibantu oleh enumerator sehingga diperoleh pendataan *time series*. Dalam hal ini, supervisi terhadap enumerator dapat menunjang keberhasilan kegiatan dengan tujuan untuk mengumpulkan data

yang sesuai untuk dianalisis lebih lanjut. Sementara itu, dalam lingkup pelayanan, koordinasi dan verifikasi jarak jauh juga dapat mendukung keberlanjutan kegiatan.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada perekrutan tenaga enumerator yang kompeten dan mudah diarahkan melalui koordinasi jarak jauh. Selain itu, penggunaan aplikasi e-SAJI dan e-Sultan's juga mendukung kegiatan pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan secara sistematis.

#### E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan//kegagalan pencapaian IKU 9 dapat ditunjang oleh kegiatan supervisi yang perlu dilakukan secara rutin dan menyeluruh kepada tenaga enumerator. Hal tersebut penting untuk dilakukan agar kualitas data yang dikumpulkan tetap terjaga.

##### a. Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan

Kegiatan pelayanan perizinan jenis ikan yang dimanfaatkan dilaksanakan di tujuh provinsi wilayah kerja BPSPL Padang, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Sepanjang triwulan III 2024, BPSPL Padang telah melayani peredaran jenis hiu, pari, teripang, arwana, napoleon, dan karang hias melalui penerbitan 296 Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri (DN) dan 402 Rekomendasi.

Berikut adalah rekapitulasi pelayanan berdasarkan dari penerbitan SAJI dan rekomendasi.

Tabel 35. Rekapitulasi Pelayanan Jenis Triwulan III 2024

Jenis Dokumen	Jumlah Dokumen yang Terbit	Nilai PNBP (Rp)
Rekomendasi	402	297.441.973,00
SAJI Dalam Negeri	296	395.723.268,00
<b>Total</b>	<b>698</b>	<b>693.165.241,00</b>

Untuk menunjang pelayanan prima di lingkup BPSPL Padang, pada tanggal 2 Februari 2023 BPSPL Padang telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu (SMM) Registration No: QAIC/ID/11112-A dengan ruang lingkup pelayanan administrasi dalam lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES). Kemudian, pada tanggal 5 April 2024, BPSPL Padang memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Registration No: QAIC/ID/11112-E dengan ruang lingkup yang sama. Dalam hal ini, produk layanan BPSPL Padang berupa SAJI Dalam Negeri dan Rekomendasi juga telah terdaftar dalam sertifikasi ini (Lampiran 2).

##### b. Pendataan Potensi Jenis yang Dimanfaatkan

###### - Hiu Appendiks dan Pari Appendiks

Pendataan pendaratan hiu dan pari dilaksanakan di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Riau. Pendataan di Aceh dilakukan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo di Banda Aceh, Pelabuhan Labuhan Haji di Aceh Selatan, dan Ujong Serangga di Aceh Barat Daya. Sementara itu, pendataan di Sumatra Utara dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga. Di Riau, pendataan dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Pendataan dilaksanakan dengan dibantu oleh tenaga enumerator selama 12 bulan dengan jumlah hari 25 hari/bulan.



Gambar 61. Dokumentasi Supervisi Pendataan Hiu dan Pari di PPS Lampulo, Kota Banda Aceh



Gambar 62. Dokumentasi Supervisi Pendataan Hiu dan Pari di Pelabuhan Labuhan Haji, Aceh Selatan



Gambar 63. Dokumentasi Supervisi Pendataan Hiu dan Pari di Pelabuhan Ujong Serangga, Aceh Barat Daya



Gambar 64. Dokumentasi Supervisi Pendataan Hiu dan Pari di PPN Sibolga



Gambar 65. Dokumentasi Pendataan Hiu dan Pari di Kabupaten Bengkalis



Gambar 66. Dokumentasi Pendataan Hiu dan Pari di Kabupaten Kepulauan Meranti

- **Kuda Laut**

Pendataan kuda laut di Batam menggunakan pendataan hasil tangkapan kuda laut nelayan yang dikumpulkan oleh enumerator selama musim tangkap kuda laut, yaitu bulan Januari sampai Mei. Data tersebut kemudian dianalisis untuk diperoleh nilai *Catch per Unit Effort* (CPUE).



Gambar 67. Dokumentasi Pendataan Kuda Laut

- **Napoleon**

Pendataan napoleon di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau telah dilaksanakan pada 23 s.d. 27 April 2024. Pendataan dilakukan dengan wawancara dan survei lapangan. Pada pendataan tersebut, dilakukan pencatatan nelayan yang aktif dalam pembesaran, pengepul, dan pengumpul bibit ikan napoleon. Selain itu, tim BPSPL Padang juga melaksanakan sosialisasi lalu lintas jenis ikan *look alike species*.



Gambar 68. Dokumentasi Pendataan Napoleon di Natuna

- **Sidat**

Pendataan sidat dilaksanakan di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat. Pendataan berlangsung selama satu tahun dengan dibantu oleh tenaga enumerator.



Gambar 69. Dokumentasi Pendataan Pemanfaatan Sidat di Kabupaten Agam

**F. Realisasi Anggaran**

Pencapaian IKU 9 didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.REB] Konservasi Jenis/Spesies dengan Rincian Output (RO) [2362.REB.002] Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dikelola Pemanfaatannya secara Berkelanjutan. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 36. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 9

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2362.REB.002.051] Penyediaan Data Potensi dan Status Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	362.350.000,00	159.746.864,00	44,09
2	[2362.REB.002.052] Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan Appendiks CITES	864.850.000,00	604.219.588,00	69,86
<b>Total</b>		<b>1.227.200.000,00</b>	<b>763.966.452,00</b>	<b>62,25</b>

**Realisasi anggaran rincian output [2362.REB.002] adalah 62,25%.** Adapun anggaran tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan pendataan jenis (hiu, pari, kuda laut) dan pelayanan peredaran pemanfaatan jenis ikan berupa SAJI, SIPJI, dan rekomendasi. Rincian output ini bersumber dari rupiah murni senilai Rp285.000.000,00 dan bersumber dari PNPB senilai Rp1.115.000.000,00. Adapun rincian output ini juga berdampak blokir senilai Rp172.800.000,00.

## IKU. 10. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)

Pemanfaatan air laut selain energi adalah Pemanfaatan air laut selain energi yang menghasilkan produk/ekstraksi termasuk yang berasal dari Laut Dalam dengan skala lebih besar dari 50 liter/detik dan/atau berada pada kawasan konservasi serta ditujukan untuk kepentingan komersial skala luas yang memanfaatkan ruang laut secara menetap minimal 30 hari). Sementara itu, identifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah inventarisasi/pengumpulan data dan informasi yang menghasilkan produk dan/atau jasa, yang akan didorong proses perizinannya. Verifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah pemeriksaan untuk memastikan atas kebenaran dokumen dan data pengurusan perizinan air laut selain energi. Verifikasi ini dilakukan apabila terdapat permohonan di OSS. Capaian IKU ini diperoleh dengan menginventarisasi dan menghitung jumlah dokumen identifikasi dan/atau verifikasi perizinan pemanfaatan air laut selain energi.

### A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Rincian target IKU 10 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 37. Perbandingan Target dan Capaian IKU 10

IKU 10. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)				
Realisasi	Triwulan III 2024			
Triwulan III 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	-	-	-	-

Pada periode triwulan III 2024, belum terdapat capaian terhadap IKU ini. IKU ini merupakan indikator kinerja yang ditargetkan dengan periode tahunan.

### B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya

IKU ini tidak terdapat pada tahun 2023 sehingga tidak terdapat perbandingan capaian antara triwulan III 2023 dan triwulan III 2024.

### C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan III 2024 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Dalam hal ini, indikator Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang tidak terdapat pada Rencana Strategis DJPRL tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan.

Ditinjau dari standar nasional, Indikator kinerja Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang juga tidak termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024. Maka dari itu, tidak terdapat capaian kinerja yang dapat dibandingkan dengan standar nasional.

### D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKU ini didukung dengan identifikasi dan sosialisasi pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE). Hingga saat ini, belum terdapat Petunjuk Teknis terkait identifikasi pemanfaatan ALSE. Dalam hal ini, Direktorat Jasa Kelautan telah menyelenggarakan sosialisasi dan menyusun panduan izin pemanfaatan ALSE. Ke depannya, koordinasi lanjutan dengan Direktorat Jasa Kelautan dapat dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada penggunaan aplikasi Zoom yang dapat digunakan tim pelaksana untuk mengikuti sosialisasi pemanfaatan ALSE secara daring. Dengan adanya aplikasi Zoom, sosialisasi tersebut dapat menjangkau dan meningkatkan pemahaman seluruh anggota tim pelaksana tanpa membutuhkan biaya yang banyak untuk menghadirkan seluruh tim secara luring.

## E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya pencapaian IKU ini didukung oleh sosialisasi dan identifikasi pelaku usaha pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE).

### 1. Sosialisasi dan Identifikasi Pelaku Usaha Pemanfaatan ALSE di Kota Dumai, Riau

Kegiatan Sosialisasi dan Identifikasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan terutama bagi pelaku usaha pemegang izin dasar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang sudah terbit dengan Skala lebih dari 50 (lima puluh) liter/detik dan/atau berada pada Kawasan Strategi Nasional, Kawasan Startegi Nasional Tertentu, Kawasan Konservasi serta ditujukan untuk kepentingan komersial skala luas yang memanfaatkan ruang laut secara menetap minimal 30 (tiga puluh) hari. Berdasarkan PP 85 Tahun 2021 terdapat dua kategori untuk perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) yang Menghasilkan Produk 2,5% per tahun dari Nilai Produksi (ekstraksi) dan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) Non Produk (Pelayanan) yaitu Rp 0,25 /m<sup>3</sup> per tahun.

Identifikasi di Kota Dumai dilaksanakan pada 28 s.d. 29 Maret 2024 dengan melakukan beberapa pengecekan indikator seperti Jumlah Pipa, *Intake* Air Bahang, Jumlah Pompa *Intake* Air Bahang, Kapasitas *Intake* Air Bahang (m<sup>3</sup>), Jumlah Pipa *Intake* RO (*Reverse Osmosis*), Jumlah Pompa *Intake* RO, Kapasitas *Intake* RO (m<sup>3</sup>), Jumlah *Outfall* Air Bahang, Jumlah *Outfall* RO, Jumlah *Flowmeter*, Jumlah Tangki Hasil RO, Kapasitas Tangki Hasil RO dan Koordinat lokasi keberadaan pemanfaatan Air laut selain energi. Berdasarkan pemantauan tersebut, teridentifikasi tujuh pelaku usaha yang memanfaatkan ALSE dan menghasilkan produk. Adapun kendala yang ditemukan adalah terdapat perusahaan yang masih dalam pengurusan izin dasar PKKPRL sehingga belum dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha pemanfaatan ALSE. Hal-hal tersebut akan dikonsultasikan kembali pada saat Sosialisasi Pemanfaatan ALSE.



Gambar 70. Dokumentasi Sosialisasi dan Identifikasi Pelaku Usaha Pemanfaatan ALSE di Kota Dumai

### 2. Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE)

Sosialisasi perizinan pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) dilaksanakan pada Selasa, 21 Mei 2024 di Hotel The Zuri, Kota Dumai, Provinsi Riau. Kegiatan ini dihadiri oleh 45 peserta luring dan 106 orang peserta daring. Narasumber pada pertemuan ini meliputi:

- a. Zulmasri, S.T., M.Si selaku Subkoordinator Tata Ruang Laut dan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, yang menyampaikan materi terkait Materi Teknis Pengaturan Perairan Pesisir/Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Riau dalam RTRW Provinsi Riau 2023-2043;
- b. Iqbal Suhaimi Gultom, S.I.K., selaku Ketua Tim Kerja Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Kelautan, Direktorat Jasa Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang menyampaikan materi terkait Perizinan Berusaha Jasa Kelautan;
- c. Endang Setia Budi, S.Sos., selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, Direktorat Pelayanan Perizinan Non Industri Kedeputan Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM, yang menyampaikan materi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Sistem *Online Single Submission* (OSS).



Gambar 71. Dokumentasi Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

#### F. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung oleh alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2363.PBW] Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan Rincian Output kegiatan tersebut.

Tabel 38. Realisasi Rincian Output Pendukung IKU 10

No	Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2363.PBW.002] Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut	100.000.000,00	86.801.033,00	86,80
<b>Total</b>		<b>100.000.000,00</b>	<b>86.801.033,00</b>	<b>86,80</b>

**Realisasi anggaran pada KRO [2362.PEC] adalah 86,80%.** Keseluruhan rincian output ini bersumber dari PNBP.

### IKU. 11. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kawasan)

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di wilayah kerja BPSPL Padang adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan upaya penanggulangan pencemaran di wilayah kerja BPSPL Padang melalui Gerakan Bulan Cinta Laut (BCL) yang terdiri dari sosialisasi BCL dan Gerakan Bersih Pantai dan Laut. Bulan Cinta Laut merupakan salah satu program prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pengelolaan sampah plastik di Laut. Bulan Cinta Laut ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengendalian sampah plastik yang masuk laut dan mengenalkan upaya-upaya penanggulangan dan pengendalian sampah plastik untuk nantinya dapat diadopsi oleh masyarakat. Capaian IKU ini dihitung dari inventarisasi dan penjumlahan Kabupaten/Kota yang dilakukan penanggulangan pencemaran di wilayah kerja BPSPL Padang.

**A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan**

Rincian target IKU 11 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 39. Perbandingan Target dan Capaian IKU 11

IKU. 11 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kawasan)				
Realisasi	Triwulan III 2024			
Triwulan III 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	-	-	-	-

Hingga berakhirnya periode triwulan III 2024, belum terdapat perolehan capaian terhadap IKU 11. IKU 11 merupakan indikator kinerja yang ditargetkan dengan periode tahunan. Adapun lokasi yang menjadi target dalam pencapaian IKU ini meliputi Kota Padang, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Deli Serdang.

**B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya**

Tidak terdapat perbandingan capaian pada triwulan III 2023-2024. Pada tahun 2023, IKU ini tidak digunakan dalam pengukuran kinerja karena anggaran pendukungnya terdampak blokir hingga akhir tahun.

**C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan**

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan III 2024 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Tidak terdapat indikator kinerja pada Rencana Strategis DJPRL yang dapat dibandingkan dengan indikator ini. Sementara itu, pada perbandingan dengan standar nasional, terdapat Rincian Target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang berkaitan dengan indikator ini.

Tabel 40. Rincian Target dalam RPJMN yang Berkaitan dengan IKU 11 BPSPL Padang

Program	Indikator	Indikasi Target					Lokasi
		2020	2021	2022	2023	2024	
Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran	8	6	6	5	5	27 Lokasi

Dalam hal ini, indikator kinerja Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Padang merupakan indikator pendukung dalam pencapaian target Renstra DJPRL dan RPJMN 2020-2024 karena memiliki nomenklatur dan satuan berbeda. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dan standar nasional, indikator kinerja ini memiliki sifat kontributif yang tidak dapat dibandingkan capaiannya.

**D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Pencapaian IKU 11 didukung oleh partisipasi aktif dari nelayan dalam kegiatan Bulan Cinta Laut. Dalam hal ini, BPSPL Padang akan melaksanakan sosialisasi dan supervisi kepada nelayan untuk mendorong partisipasi dan meningkatkan pemahaman mereka dalam pemilahan sampah.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada pelibatan tim dari wilayah kerja terdekat selama pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut. Selain itu, efisiensi sumber daya juga terdapat pada pelibatan mitra stakeholder terkait selama penyelenggaraan kegiatan.

## E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya pencapaian IKU 11 didukung oleh pelaksanaan kegiatan berikut:

### 1. Identifikasi Calon Lokasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut

Dalam rangka mendukung penanggulangan pencemaran pesisir, BPSPL Padang melaksanakan identifikasi di lokasi-lokasi yang potensial untuk menjadi lokasi pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut. Identifikasi tersebut dilaksanakan di Kabupaten Aceh Besar, Kota Batam, Kota Padang, Kota Duri, Kota Dumai, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Deli Serdang. Kemudian, berdasarkan hasil identifikasi yang mempertimbangkan keaktifan nelayan, ketersediaan mitra, dan profil timbulan sampah, disepakati bahwa lokasi pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang adalah Kota Batam, Kota Padang, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Deli Serdang.

### 2. Verifikasi dan Validasi Data Nelayan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut

Berikut adalah rincian jumlah nelayan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di masing-masing lokasi.

Tabel 41. Rincian Nelayan Gernas Bulan Cinta Laut yang Terverifikasi dan Tervalidasi

No	Lokasi	Jumlah Nelayan yang Tervalidasi (Orang)
1	Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	93
2	Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat	87
3	Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	75
4	Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara	70
<b>Total</b>		<b>325</b>

### 3. Rekapitulasi Sampah

Berikut adalah rekapitulasi sampah yang terkumpul pada kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut.

Gambar 72. Rekapitulasi Sampah pada Gernas Bulan Cinta Laut di Wilker BPSPL Padang

No	Lokasi	Sampah Terkumpul (kg)	Sampah Bernilai Ekonomis (kg)	Nilai Ekonomis Sampah Terkumpul	Keterlibatan Masyarakat
1	Kota Padang, Sumatra Barat	109.914,82	97.795,84	51.676.146	87
2	Kota Batam, Kepulauan Riau	33.514	345,9	1.091.800	93
3	Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau	5.345,25	3.794,1	6.475.917	73
4	Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara	11.007,8	11.007,8	21.419.580	70



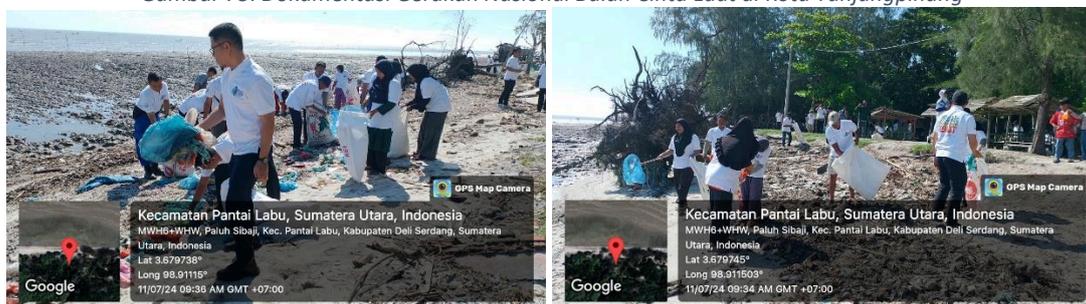
Gambar 73. Dokumentasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Padang



Gambar 74. Dokumentasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Batam



Gambar 75. Dokumentasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Tanjungpinang



Gambar 76. Dokumentasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kab. Deli Serdang

## F. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU 11 didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [4346.QDD] Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat dengan Rincian Output (RO) [4346.QDD.001] Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 42. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 11

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[4346.QDD.001.051] Aksi Penanggulangan Dampak Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	800.000.000,00	655.929,037,00	81,99
<b>Total</b>		<b>800.000.000,00</b>	<b>655.929,037,00</b>	<b>81,99</b>

Realisasi anggaran komponen [4346.QDD.001.051] adalah 81,99%.

## IKM. 12. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Padang (Nilai)

Indikator ini ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi atas pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Kategori capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

1. sangat baik, apabila nilai IKPA  $\geq 95$ ;
2. baik, apabila  $89 \leq$  nilai IKPA  $< 95$ ;
3. cukup, apabila  $70 \leq$  nilai IKPA  $< 89$ ; atau
4. kurang, apabila nilai IKPA  $> 70$ .

### A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Rincian target IKM 12 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 43. Perbandingan Target dan Capaian IKM 12

IKM. 12. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Padang (Nilai)				
Realisasi	Triwulan III 2024			
Triwulan III 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	-	-	-	-

Nilai IKPA tidak diukur pada triwulan III sehingga tidak terdapat realisasi capaian.

### B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya

Tidak terdapat perbandingan capaian pada triwulan III 2023 – triwulan III 2024 karena IKU ini tidak memiliki frekuensi pengukuran triwulanan.

### C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan III 2024 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Sementara itu, untuk perbandingan dengan standar nasional, digunakan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai acuan. Pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, capaian nilai IKPA memiliki target 90 pada tahun 2024.

Tabel 44. Indikator Kinerja KKP Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 12 BPSPL Padang

Program Dukungan Manajemen						
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai IKPA (nilai)	88	89	89	90	90

**D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Upaya pencapaian IKM 12 didukung dengan pelaksanaan anggaran yang selaras dengan indikator penilaian. Dalam hal ini, kedisiplinan, konsistensi, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam unsur-unsur pelaksanaan anggaran sangat penting dalam pencapaian nilai IKPA yang baik. Dalam pelaksanaan anggaran, acapkali ditemukan permasalahan-permasalahan yang dapat menyebabkan penurunan nilai IKPA. Untuk mengatasi hal tersebut, tim pengelola keuangan dapat melakukan monitoring secara berkala, khususnya dalam hal menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan. Dengan adanya sistem monitoring tersebut, permasalahan yang ditemukan dapat diatasi dan dimonitor perkembangan tindak lanjutnya.

Dalam pelaksanaannya, terdapat efisiensi dalam upaya pencapaian IKM 12 berupa penggunaan teknologi informasi dalam monitoring pengelolaan keuangan menggunakan form *excel* dan *whatsapp group*. Adanya ruang khusus tersebut dapat membantu staf pengelola keuangan untuk memantau perkembangan pelaporan keuangan, mengidentifikasi masalah, dan menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan. Selain itu, terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) melalui <https://sakti.kemenkeu.go.id/> untuk penyampaian usulan revisi DIPA dan Hal III DIPA dan aplikasi <https://espm.kemenkeu.go.id/> untuk pengajuan SPM. Sebelum terdapat aplikasi, kegiatan tersebut dilakukan secara luring ke KPPN dan Kantor Wilayah Perbendaharaan yang lebih memakan waktu dan tenaga.

**E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Keberhasilan pencapaian IKM 12 dapat ditunjang dengan metode pengawasan yang berjenjang. Dalam hal pelaksanaan anggaran, tim pengelola keuangan BPSPL Padang menerapkan sistem monitoring yang berguna untuk memantau perkembangan catatan-catatan yang ditemukan dalam pelaksanaan anggaran. Adanya sistem tersebut dapat mempermudah tim untuk mengidentifikasi masalah dan menindaklanjuti solusi yang dirumuskan.

**F. Realisasi Anggaran**

Tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk pencapaian IKM 12.

**IKM. 13. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Padang (Nilai)**

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Adapun cakupan evaluasi kinerja meliputi aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks. Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan Satuan Kerja BPSPL Padang ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu ([monev.anggaran.kemenkeu.go.id](http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id)) dengan indikator perhitungan meliputi capaian keluaran kegiatan, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.

**A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan**

Rincian target IKM 13 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 45. Perbandingan Target dan Capaian IKM 13

IKM. 13. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Padang (Nilai)				
Realisasi	Triwulan III 2024			
Triwulan III 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	-	-	-	-

Hingga triwulan III 2024 berakhir, belum terdapat realisasi capaian IKM 13 karena pencapaian IKM ini dijadwalkan dalam periode tahunan.

**B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya**

Tidak terdapat perbandingan capaian pada triwulan III 2023-2024 karena IKM ini memiliki frekuensi pengukuran tahunan.

**C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Target Tahunan**

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan III 2024 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024, capaian Nilai Kinerja Anggaran memiliki target 89 pada tahun 2024. Dalam hal ini, belum terdapat capaian Nilai Kinerja Anggaran pada triwulan III 2024 sehingga belum dapat dibandingkan.

Tabel 46. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 13 BPSPL Padang

Program Dukungan Manajemen						
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Nilai NKA (nilai)	85	86	87	98	89

Pada perbandingan dengan standar nasional, dilakukan perbandingan dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 sebagai acuan. Dalam hal ini, Nilai Kinerja Anggaran tidak termasuk dalam indikator kinerja KKP tahun 2020-2024, melainkan diturunkan ke unit kerja eselon 1 di bawahnya. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian indikator ini dengan standar nasional.

**D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Pencapaian IKM 13 juga didukung dengan pelaksanaan anggaran yang selaras dengan aspek penilaian Nilai Kinerja Anggaran. Pada tahun 2024, penyajian data pada aplikasi SMART DJA telah terkoneksi dengan pengisian rincian output ke aplikasi SAKTI. Dalam hal ini, BPSPL Padang senantiasa melakukan koordinasi dengan pengelola aplikasi terkait hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka kesesuaian penyajian rincian output.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi dalam upaya pencapaian IKM 13 berupa penggunaan aplikasi SMART DJA yang telah terintegrasi dengan aplikasi penunjang keuangan lainnya sehingga operator SMART DJA tidak perlu menginput realisasi keuangan dan hanya perlu melengkapi capaian rincian output setiap bulannya. Selain itu, perhitungan NKA yang berbasis aplikasi tidak perlu melakukan perhitungan manual.

**E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Pencapaian IKM 13 didukung oleh pemahaman terhadap Pengukuran nilai kinerja anggaran lebih lengkapnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Selain itu, pencapaian IKM 13 juga didukung dengan ketaatan dalam penginputan capaian output setiap bulannya.

**F. Realisasi Anggaran**

Tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk pencapaian IKM 13.

**IKM. 14. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Nilai)**

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Predikat tersebut diberikan berdasarkan hasil penilaian yang mengacu PermenPAN RB Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Secara teknis, unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan penetapan unit kerja berpredikat menuju WBK:

- a. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
- b. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua pengungkit;
- c. Memiliki nilai komponen hasil “Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel” minimal 18,25 dengan nilai subkomponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal 15,75 dan subkomponen “Kinerja Lebih Baik” minimal 52,5;
- d. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 14 (Survei 3,20).

Adapun pencapaian IKM ini diperoleh dari perhitungan penilaian WBK oleh Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri Kelautan dan Perikanan dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan.

**A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan**

Rincian target IKM 14 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

*Tabel 47. Perbandingan Target dan Capaian IKM 14*

IKM. 14. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Nilai)				
Realisasi		Triwulan III 2024		
Triwulan III 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	-	-	-	-

Hingga triwulan III 2023 berakhir, belum terdapat realisasi capaian IKM 14 karena pencapaian IKM ini dijadwalkan dalam periode tahunan. Dalam perkembangannya, telah dilaksanakan pemantauan pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM oleh Inspektorat V KKP pada tanggal 20 s.d. 24 Februari. Hingga saat ini, pemantauan tersebut masih berproses dan menghasilkan nilai sementara 88,63. Kemudian, berdasarkan hasil pemantauan keberlanjutan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM oleh Tim Penilai Internal, BPSPL Padang merupakan salah satu unit kerja yang diusulkan penilaian WBK Nasional dengan nilai 90,40.

**B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya**

Tidak terdapat perbandingan capaian pada triwulan III 2023-2024 karena IKU ini tidak memiliki frekuensi pengukuran triwulanan.

**C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan**

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan III 2024 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Tidak terdapat indikator kinerja pada Rencana Strategis DJPRL yang dapat dibandingkan secara langsung dengan indikator ini.

Tabel 48. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 14 BPSPL Padang

Program Dukungan Manajemen		Target				
Sasaran Program	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
		Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (kumulatif) (unit)	6	7	8

Dalam hal ini, Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Padang merupakan indikator pendukung dalam pencapaian target Renstra DJPRL 2020-2024 karena memiliki nomenklatur dan satuan berbeda. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah, indikator kinerja ini memiliki sifat kontributif yang tidak dapat dibandingkan capaiannya.

Pada perbandingan dengan standar nasional, dilakukan perbandingan dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 sebagai acuan. Dalam hal ini, Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK tidak termasuk dalam indikator kinerja KKP tahun 2020-2024, melainkan diturunkan ke unit kerja eselon 1 di bawahnya. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian indikator ini dengan standar nasional.

**D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Sebagai upaya pencapaian nilai WBK yang maksimal, BPSPL Padang melaksanakan monitoring pembangunan zona integritas secara berkala untuk memantau perkembangan dan pemenuhan masing-masing area pembangunan. Pemantauan berkala ini juga dapat menyelaraskan pemahaman dalam pemenuhan dokumen sehingga dokumen tersebut dapat disusun sesuai dengan kriteria Petunjuk Teknis.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi dalam upaya pencapaian IKM 14 dengan adanya pemantauan oleh Inspektorat Jenderal secara daring. Dalam upaya kontrol secara internal, BPSPL Padang juga menerapkan rapat daring yang dapat diikuti oleh seluruh tim yang tersebar di wilayah kerja BPSPL Padang.

**E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Dalam upaya pencapaian IKM 14, BPSPL Padang menerapkan sistem monitoring secara berkala. Pada kegiatan ini, Ketua Pembangunan Zona Integritas BPSPL Padang memimpin sesi pembahasan yang mencakup evaluasi mandiri, pengecekan dokumen secara menyeluruh, hingga monitoring dari tindak lanjutnya. Adanya kegiatan ini dapat mendukung kedisiplinan tim dalam membangun area pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya.

**a. Pembentukan Tim**

Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2024 di lingkup BPSPL Padang ditetapkan melalui Surat Tugas Kepala BPSPL Padang Nomor B.277/BPSPL.1/KP.440/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 dan kemudian diperbaharui melalui Surat Tugas Kepala BPSPL Padang Nomor B.756/BPSPL.1/Tu.110/III/2024 tanggal 25 Maret 2024.

**b. Penilaian Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di BPSPL Padang oleh Inspektorat V KKP**

Penilaian pembangunan zona integritas di BPSPL Padang dilaksanakan pada 20 s.d. 24 Februari 2024. Penilaian ini menghasilkan nilai sementara 88,63 bagi BPSPL Padang. Adapun tindak lanjut dari rekomendasi perbaikan dapat dipenuhi secara bertahap.

Tabel 49. Hasil Penilaian Pemantauan Pembangunan Zona Integritas pada BPSPL Padang

PENILAIAN			BOBOT	NILAI	%
<b>A.</b>	<b>PENGUNGKIT</b>		<b>60,00</b>	<b>52,55</b>	
	<b>I.</b>	<b>PEMENUHAN</b>	<b>30,00</b>	<b>25,08</b>	<b>83,61</b>
	1.	Manajemen Perubahan	4,00	3,05	76,16
	2.	Penataan Tatalaksana	3,50	2,92	83,33
	3.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00	4,28	85,58
	4.	Penguatan Akuntabilitas	5,00	3,58	71,60
	5.	Penguatan Pengawasan	7,50	6,44	85,87
	6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	4,82	96,40
	<b>II.</b>	<b>REFORM</b>	<b>30,00</b>	<b>27,46</b>	<b>91,54</b>
	1.	Manajemen Perubahan	4,00	3,42	85,50
	2.	Penataan Tatalaksana	3,50	2,92	83,38
	3.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00	4,25	85
	4.	Penguatan Akuntabilitas	5,00	5,00	100,00
	5.	Penguatan Pengawasan	7,50	6,88	91,67
	6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	5,00	100,00
<b>TOTAL PENGUNGKIT</b>				<b>52,55</b>	<b>87,58</b>
<b>B.</b>	<b>HASIL</b>		<b>40,00</b>	<b>36,08</b>	
	<b>I.</b>	<b>BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL</b>	<b>22,50</b>	<b>20,07</b>	<b>89,19</b>
	a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Anti Korupsi/IPAK)	17,50	16,32	93,25
	b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00	3,75	75,00
	<b>II.</b>	<b>PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA</b>	<b>17,50</b>	<b>16,01</b>	<b>91,50</b>
		Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik/IPKP)	17,50	16,01	91,50
<b>TOTAL HASIL</b>					<b>90,20</b>
<b>NILAI PEMANTAUAN PEMBANGUNAN ZI</b>					<b>88,63</b>

**c. Monitoring Pembangunan ZI**

Monitoring pembangunan zona integritas di BPSPL Padang dilaksanakan triwulanan untuk memantau kelemahan-kelemahan dan merumuskan rekomendasi tindak lanjutnya. Pemantauan ini berguna untuk memastikan komponen-komponen yang harus dipenuhi.

**d. Pengusulan Penilaian WBK Nasional**

Berdasarkan Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1456/MEN-KP/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 perihal Usulan Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), BPSPL Padang merupakan salah satu unit kerja yang diusulkan penilaian WBK Nasional dengan 90,40. Hal tersebut diperkuat dengan surat Inspektur Jenderal KKP Nomor B.291/ITJ/KP.730/IX/2024 pada 18 September 2024 perihal Hasil Seleksi Pemantauan Keberlanjutan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KKP Tahun 2024.

## F. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM 14 didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2367.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan Rincian Output (RO) [2367.EBA.958] Layanan Kehumasan. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 50. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKM 14

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2367.EBA.958.052] Pelayanan Publik	17.500.000,00	14.476.125,00	82,72
<b>Total</b>		<b>17.500.000,00</b>	<b>14.476.125,00</b>	<b>82,72</b>

Hingga triwulan III 2024, komponen [2367.EBA.958.052] telah terealisasi 82,72%.

## IKM. 15. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Padang (Indeks)

Indeks profesionalitas (IP) ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Adapun bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:

- Kualifikasi, yang diukur dari indikator Riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, memiliki bobot 25%,
- Kompetensi, yang diukur dari indikator Riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan, memiliki bobot 40%,
- Kinerja, yang diukur dari indikator penilaian prestasi kerja, memiliki bobot 30%,
- Disiplin, yang diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin, memiliki bobot 5%.

Penjumlahan dari nilai masing-masing dimensi akan menghasilkan Indeks Profesionalitas ASN dengan kategori penilaian sebagai berikut:

- 91-100: Sangat Profesional/Sangat Tinggi,
- 81-90: Cenderung Profesional/Tinggi,
- 71-80: Rentan Tidak Profesional/Sedang,
- 61-70: Cenderung Tidak Profesional/Rendah,
- ≤60: Sangat Tidak Profesional/Sangat Rendah.

### A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Rincian target IKM 15 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 51. Perbandingan Target dan Capaian IKM 15

IKM. 15. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Padang (Indeks)				
Realisasi	Triwulan III 2024			
Triwulan III 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	-	-	-	-

Indeks Profesionalitas ASN tidak diukur pada triwulan III sehingga tidak terdapat realisasi capaian.

**B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya**

Tidak terdapat perbandingan capaian pada triwulan III 2023 – triwulan III 2024 karena IKU ini tidak memiliki frekuensi pengukuran triwulanan.

**C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan**

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan III 2024 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024, capaian Indeks Profesionalitas ASN memiliki target 76 pada tahun 2024.

Tabel 52. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 15 BPSPL Padang

Program Dukungan Manajemen		Target				
Sasaran Program	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (indeks)	72	73	74	75	76

Pada perbandingan dengan standar nasional, dilakukan perbandingan dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 sebagai acuan. Dalam hal ini, Indeks Profesionalitas ASN tidak termasuk dalam indikator kinerja KKP tahun 2020-2024, melainkan diturunkan ke unit kerja eselon 1 di bawahnya. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian indikator ini dengan standar nasional.

**D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Pencapaian IKM 15 didukung dengan adanya kegiatan pengembangan kompetensi yang dapat diikuti pegawai. Setiap pegawai dapat memenuhi diklat 20 JP-nya melalui kegiatan pengembangan diri yang tersedia secara luring dan daring untuk mendongkrak perolehan Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Padang. Namun demikian, pencapaian IP ASN BPSPL Padang tidak meningkat secara signifikan karena tidak ada tambahan pegawai yang meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Maka dari itu, alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan IP ASN BPSPL Padang adalah mendorong pegawai yang telah selesai izin dan tugas belajar untuk segera menyelesaikan tahapan administrasi akhirnya agar gelarnya dapat segera diakui.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi dalam keikutsertaan pegawai BPSPL Padang dalam pengembangan kompetensi berbasis daring. Adanya kegiatan pengembangan kompetensi secara daring ini dapat memperluas kesempatan bagi seluruh pegawai tanpa dibatasi oleh ketersediaan anggaran.

**E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Pencapaian IKM 15 didukung oleh keaktifan pegawai dalam mengikuti pengembangan kompetensi workshop/diklat yang diinput ke dalam SIASN. Untuk itu, BPSPL Padang senantiasa melakukan monitor pencapaian IP ASN masing-masing pegawai. Monitoring tersebut dilakukan dengan pengunggahan bukti dukung nilai IP ASN masing-masing pegawai ke laman google drive untuk memudahkan pemantauan.

## F. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM 15 didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2367.EBC] Layanan Manajemen SDM Internal dengan Rincian Output (RO) [2367.EBC.954] Layanan Manajemen SDM. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 53. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKM 15

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2367.EBC.954.051] Layanan Manajemen SDM	325.367.000,00	301.888.332,00	92,78
<b>Total</b>		<b>325.367.000,00</b>	<b>301.888.332,00</b>	<b>92,78</b>

**Realisasi anggaran rincian output [2367.EBC.954] adalah 92,78%.**

## IKM. 16. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Padang

Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Padang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat empat aspek penilaian di dalam evaluasi tersebut, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%).

Adapun kategori nilai PM SAKIP antara lain sebagai berikut:

1. predikat AA dengan nilai >90-100 dengan kategori Sangat Memuaskan;
2. predikat A dengan nilai >80-90 dengan kategori Memuaskan;
3. predikat BB dengan nilai >70-80 dengan kategori Sangat Baik;
4. predikat B dengan nilai >60-70 dengan kategori Baik;
5. predikat CC dengan nilai >50-60 dengan kategori Cukup;
6. predikat C dengan nilai >30-50 dengan kategori Kurang;
7. predikat D dengan nilai 0-30 dengan kategori Sangat Kurang.

### A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Rincian target IKM 16 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 54. Perbandingan Target dan Capaian IKM 16

IKM. 16. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Padang				
Realisasi	Triwulan III 2024			
	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	-	-	-	-

Hingga triwulan III 2024 berakhir, belum terdapat realisasi capaian IKM 16 karena pencapaian IKM ini dijadwalkan dalam periode tahunan.

### B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya

Tidak terdapat perbandingan capaian pada triwulan III 2023 – triwulan III 2024 karena IKU ini memiliki frekuensi pengukuran tahunan.

### C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan III 2024 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja

dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024, capaian Nilai PM SAKIP memiliki target 83,75 pada tahun 2024. Dalam hal ini, belum terdapat capaian Nilai PM SAKIP pada triwulan III 2024 sehingga belum dapat dibandingkan.

Tabel 55. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 16 BPSPL Padang

Program Dukungan Manajemen						
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (nilai)	83	83,15	83,25	83,5	83,75

Pada perbandingan dengan standar nasional, dilakukan perbandingan dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 sebagai acuan. Dalam hal ini, Nilai PM SAKIP tidak termasuk dalam indikator kinerja KKP tahun 2020-2024, melainkan diturunkan ke unit kerja eselon 1 di bawahnya. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian indikator ini dengan standar nasional.

#### D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian IKM 16 dapat didukung oleh adanya harmonisasi antara tim pengelola kinerja, dari sub-tim perencanaan, pengukuran, evaluasi, hingga pelaporan. Selain itu, pemahaman tim pengelola kinerja mengenai aspek-aspek evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga diperlukan agar pencapaian nilai dapat maksimal.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi dalam upaya pencapaian IKM 16 berupa pemanfaatan teknologi dalam media penyimpanan dokumen dan aplikasi untuk pertemuan virtual. Di samping itu, dokumen pendukung SAKIP juga telah tertata dalam media penyimpanan *google drive* sehingga tidak tercecer dan terkumpul dengan baik.

#### E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya pencapaian IKM 16 dapat ditunjang dengan adanya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup BPSPL Padang secara konsisten dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, verifikasi, hingga evaluasi kinerja. Selain itu, kepatuhan pelaporan dan pendokumentasian data dukung kinerja juga dapat mendukung perolehan nilai SAKIP.

Evaluasi AKIP tahun 2024 di lingkungan DJPKRL telah dilaksanakan pada 24 s.d. 27 Juni 2024, dilanjutkan dengan Pleno pembahasannya pada 11 s.d. 13 September 2024. Perolehan nilai Evaluasi AKIP BPSPL Padang tahun 2024 adalah 89,85

Tabel 56. Nilai AKIP BPSPL Padang 2024

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot (%)	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
<b>1</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>30,00</b>	<b>27,60</b>	<b>90%</b>
1.a	Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	6,00	6,00	100%
1.b	Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan ( <i>cascading</i> ) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain ( <i>crosscutting</i> )	9,00	8,10	90%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	13,50	90%
<b>2</b>	<b>PENGUKURAN KINERJA</b>	<b>30,00</b>	<b>27,60</b>	<b>90%</b>

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot (%)	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	6,00	100%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	8,10	90%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	13,50	90%
<b>3</b>	<b>PELAPORAN KINERJA</b>	<b>15,00</b>	<b>12,90</b>	<b>90%</b>
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan kinerja	3,00	3,00	100%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,15	70%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,75	90%
<b>4</b>	<b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</b>	<b>25,00</b>	<b>21,75</b>	<b>90%</b>
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	5	100%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,75	90%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi kinerja	12,50	10	80%

#### F. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM 16 dapat didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2367.EBD] Layanan Manajemen Kinerja Internal dan Rincian Output (RO) [2367.EBD.952] Layanan Perencanaan dan Penganggaran dan [2367.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 57. Realisasi Anggaran Rincian Output Pendukung IKM 16

No	Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2367.EBD.952] Layanan Perencanaan dan Penganggaran	154.500.000,00	94.725.559,00	61,31
2	[2367.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi	88.000.000,00	57.487.431,00	65,33
<b>Total</b>		<b>242.500.000,00</b>	<b>152.212.990,00</b>	<b>62,77</b>

### IKM. 17. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Padang (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Di lingkup KKP, penyelenggaraan SPIP diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara itu, Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPRL yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024.

#### A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Rincian target IKM 17 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 58. Perbandingan Target dan Capaian IKM 17

IKM. 17 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Padang (Dokumen)				
Realisasi	Triwulan III 2024			
Triwulan III 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
3	3	3	100	-

Capaian IKM 17 pada triwulan III 2024 telah sesuai target 3 dokumen, yaitu Laporan SPIP BPSPL Padang Triwulan IV 2023, Triwulan I 2024, dan Triwulan II 2024.

Dokumen pendukung:

<https://drive.google.com/file/d/1gSwPkuLYonIGSnAcS6X1AjbKzrto2IZf/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/13fsTbrqIWatP5mO3eXu88Y8rY5UVGeBR/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1gRs0TwwJHirTUZHnVzKKjtJUEI5QvUqW/view?usp=sharing>

#### B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya

Realisasi IKM 17 pada triwulan III 2023 dan triwulan III 2024 adalah sama, yaitu dua dokumen. Maka dari itu, tidak terdapat persentase kenaikan capaian IKM 17 pada triwulan III 2024.

#### C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan

Capaian IKM 17 pada triwulan III 2024 telah mencapai 75% dari target tahunan, yaitu dengan tercapainya dua dokumen dari target tahunan empat dokumen.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Tidak terdapat indikator kinerja pada Rencana Strategis DJPRL yang dapat dibandingkan secara langsung dengan indikator ini.

Tabel 59. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 17 BPSPL Padang

Program Dukungan Manajemen		Target				
Sasaran Program	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
		Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (level)	3	3	3

Dalam hal ini, Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Padang merupakan indikator pendukung dalam pencapaian target Renstra DJPRL 2020-2024 karena memiliki nomenklatur dan satuan berbeda. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah, indikator kinerja ini memiliki sifat kontributif yang tidak dapat dibandingkan capaiannya.

Pada perbandingan dengan standar nasional, dilakukan perbandingan dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 sebagai acuan. Dalam hal ini, Nilai Maturitas SPIP tidak termasuk dalam indikator kinerja KKP tahun 2020-2024, melainkan diturunkan ke unit kerja eselon 1 di bawahnya. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian indikator ini dengan standar nasional.

#### D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM 17 didukung dengan adanya kegiatan FGD Manajemen Risiko untuk memetakan faktor-faktor risiko yang kemungkinan terjadi. Pengendalian Risiko Kegiatan BPSPL Padang dibuat berdasarkan hasil masukan dari pelaksana kegiatan kemudian hasilnya dikoordinasikan untuk diantisipasi dan dijadikan bahan masukan dalam persiapan kegiatan.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada kegiatan monitoring upaya pengendalian di BPSPL Padang yang secara umum memanfaatkan teknologi komunikasi dan media penyimpanan

data berbasis daring. Selain itu, dalam pelaksanaannya pun tim didukung dengan aplikasi-aplikasi penunjang pelaksanaan anggaran, pelayanan peredaran jenis, pemungutan PNBPN, hingga pelaporan berkala.

**E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Pencapaian IKM ini didukung dengan implementasi manajemen risiko dalam pelaksanaan kegiatan dengan menyertakan data dukung pengendalian risiko yang dilaporkan secara berkala. Lebih lanjut, BPSPL Padang juga menerapkan implementasi pemantauan risiko secara berkala dan menyeluruh.

**F. Realisasi Anggaran**

Tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk pencapaian IKM 17.

**IKM. 18. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Padang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)**

Sistem Manajemen Pengetahuan (MP) adalah suatu rangkaian yang telah memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Dalam pencapaian IKM ini, digunakan system informasi manajemen pengetahuan melalui portal *Collaboration Office*.

Penghitungan capaian berdasarkan poin keaktifan Kepala UPT melakukan posting berbagi pengetahuan dengan target 3 poin dan nilai maksimal yang dapat diterima adalah 4 poin per triwulan. Penghitungan poin berasal dari pilihan kategori dan pembobotan poin sebagai berikut:

- Unggah dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dilengkapi foto dan notulensi serta narasi memenuhi kriteria 5W1H (what, where, when, who, why, and how) mempunyai bobot poin 0,5. Dalam hal unggah kegiatan Apel Pagi tidak mendapatkan nilai.
- Berbagi informasi berupa karya tulis, jurnal atau hasil penelitian sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai bobot poin 1.
- Berbagi informasi berupa video atau campaign dengan tema Kelautan dan Perikanan sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai bobot poin 3.

Target 3 poin per triwulan dapat berasal dari 1 kategori penilaian maupun kombinasi dari ketiga kategori tersebut dengan penghitungan sesuai rumus:

$$\text{Keaktifan} = \frac{\text{Jumlah Poin Keaktifan Pejabat}}{\text{Jumlah Target Poin Keaktifan Pejabat}} \times 100\%$$

**A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan**

Rincian target IKM 18 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 60. Perbandingan Target dan Capaian IKM 18

IKM. 18. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Padang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)				
Realisasi	Triwulan III 2024			
Triwulan III 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
133,33	94	133,33	141,84 atau 120 (aplikasi Kinerja)	-

Capaian IKM 18 pada triwulan III 2024 adalah 133,33%. Capaian tersebut menghasilkan persentase capaian 141,84% atau 120% berdasarkan persentase maksimal perhitungan aplikasi Kinerja.

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1naG-YFpc5DNswAp5vm6NJvdN0kJK7OpP>

**B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya**

Pada triwulan III 2023, capaian IKM 18 adalah 133,33%. Maka dari itu, tidak terdapat kenaikan capaian pada triwulan III 2024 karena memiliki realisasi capaian yang sama.

**C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan**

Capaian IKM ini pada triwulan III 2024 telah melampaui target tahunan dengan persentase capaian 141,84% atau 120% mengacu pada persentase maksimal aplikasi Kinerja.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024, capaian Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar memiliki target 90 pada tahun 2024. Dalam hal ini, persentase capaian BPSPL Padang pada triwulan III 2024 telah mencapai 148,14% dari target Renstra DJPRL tahun 2024.

Tabel 61. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 18 BPSPL Padang

Program Dukungan Manajemen		Target				
Sasaran Program	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
		Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)	82	84	86

Pada perbandingan dengan standar nasional, dilakukan perbandingan dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 sebagai acuan. Dalam hal ini, Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar tidak termasuk dalam indikator kinerja KKP tahun 2020-2024, melainkan diturunkan ke unit kerja eselon 1 di bawahnya. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian indikator ini dengan standar nasional.

**D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Pencapaian IKM ini didukung oleh keaktifan Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dalam membagikan informasi kegiatan dan infografis menggunakan portal *Collaboration Office*. Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKM 18 terdapat pada pemanfaatan sarana teknologi dan informasi untuk lebih proaktif dalam input data di portal.kkp.go.id sehingga terjadi peningkatan capaian kinerja BPSPL Padang dalam menyampaikan informasi kegiatan setiap triwulannya.

**E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian IKM ini adalah diluncurkannya portal *Collaboration Office* yang telah dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Portal ini telah menyediakan layanan pengetahuan yang dapat digunakan untuk membagikan informasi kegiatan berupa berita, infografis, hingga video.

**F. Realisasi Anggaran**

Tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk pencapaian IKM 18.

### IKM. 19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Padang yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

IKM ini menilai rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada BPSPL Padang berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang telah ditindaklanjuti, baik berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BPSPL Padang yang menjadi objek pengawasan. Capaian IKM ini dihitung dari persentase jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang terbit pada periode triwulan IV tahun 2023 s.d triwulan III tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas.

#### A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Rincian target IKM 19 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

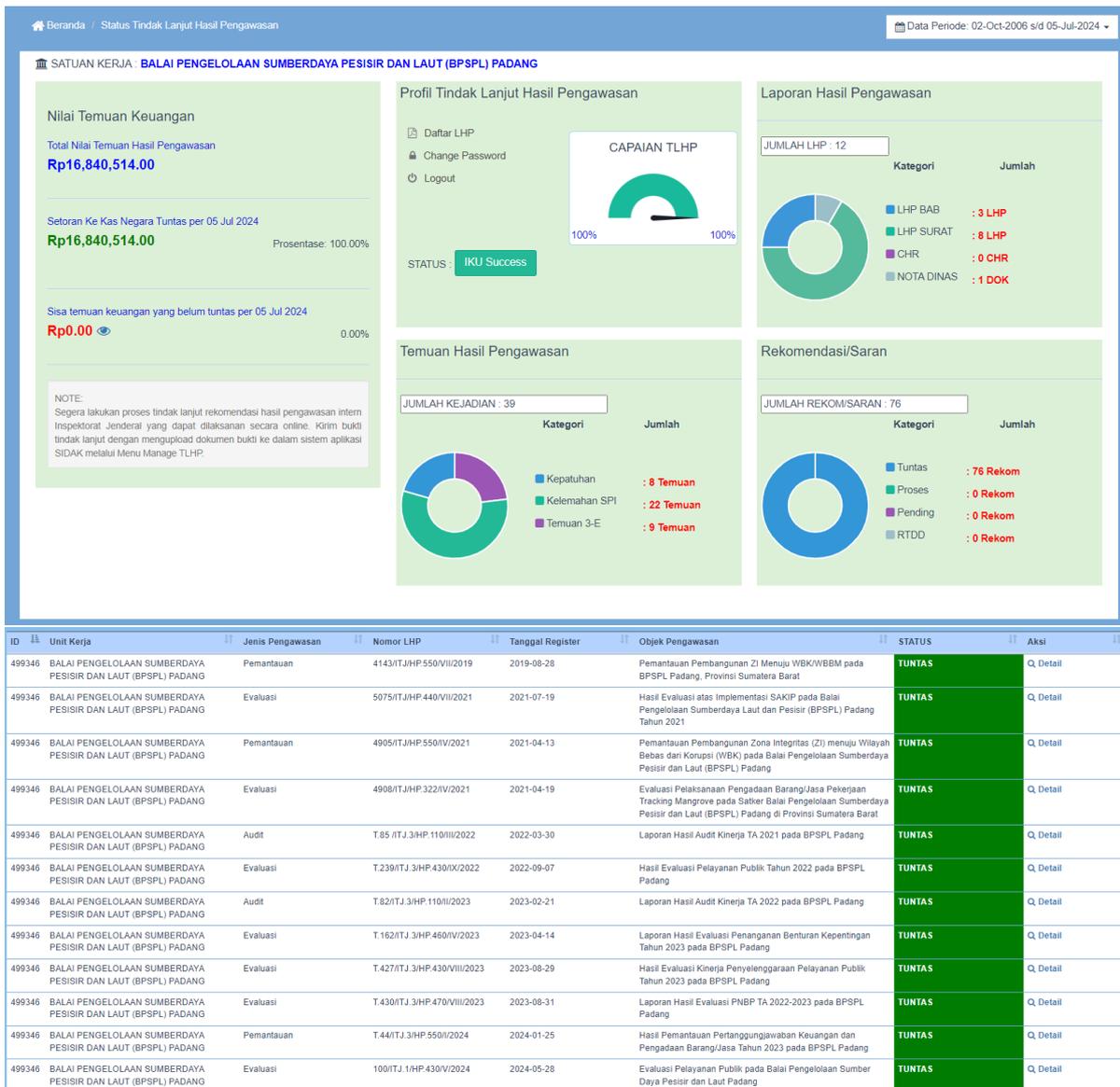
Tabel 62. Perbandingan Target dan Capaian IKM 19

IKM. 19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Padang yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)				
Realisasi Triwulan III 2023	Triwulan III 2024			
	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
100	80	100	125 atau 120 (aplikasi Kinerjaku)	-

Capaian IKM 19 pada triwulan III 2024 adalah 100%. Capaian tersebut menghasilkan persentase capaian 125% atau 120% berdasarkan persentase maksimal perhitungan aplikasi Kinerjaku. Adapun dalam perkembangannya, hingga triwulan III 2024 BPSPL Padang telah menindaklanjuti dengan tuntas rekomendasi-rekomendasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagaimana terlampir.

Tabel 63. Status Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Hingga Triwulan III 2024

No	Jenis Pengawasan	Nomor LHP	Objek Pengawasan	Jumlah Rekomendasi	Status
1	Pemantauan	T.44/ITJ.3/HP.550/I/2024	Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023 pada BPSPL Padang	6	Tuntas
2	Evaluasi	100/ITJ.1/HP.430/V/2024	Evaluasi Pelayanan Publik pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang	4	Tuntas



Gambar 77. Status Tindak Lanjut Hasil Pemantauan terhadap BPSPL Padang  
 (Sumber: Aplikasi SIDAK, Oktober 2024)

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NCUC-5uwn-gOx-TSu2Gub4z-bGsLvxg>

**B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya**

Pada triwulan III 2023, capaian IKM ini adalah 100%. Maka dari itu, tidak terdapat kenaikan capaian pada triwulan III 2023 dan triwulan III 2024.

**C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan**

Capaian IKM ini pada triwulan III 2024 telah melampaui target tahunan dengan persentase capaian 125% atau 120% mengacu pada persentase maksimal aplikasi Kinerjaaku. Capaian ini dapat dipertahankan jika BPSPL Padang dapat senantiasa menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi selama tahun 2024 ini.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan

Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024, capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja memiliki target 80 pada tahun 2024. Dalam hal ini, persentase capaian BPSPL Padang pada triwulan III 2024 telah mencapai 125% dari target Renstra DJPRL dan tahun 2024.

Tabel 64. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 19 BPSPL Padang

Program Dukungan Manajemen						
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)	60	65	70	75	80

Pada perbandingan dengan standar nasional, dilakukan perbandingan dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 sebagai acuan. Dalam hal ini, Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja tidak termasuk dalam indikator kinerja KKP tahun 2020-2024, melainkan diturunkan ke unit kerja eselon 1 di bawahnya. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian indikator ini dengan standar nasional.

#### D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKM 19 didukung oleh adanya monitoring menyeluruh terhadap rekomendasi Inspektorat Jenderal terhadap BPSPL Padang. Dalam tindak lanjutnya, tim BPSPL Padang dimudahkan dengan adanya aplikasi SIDAK <https://sidak.kkp.go.id/> yang dapat menampilkan data temuan beserta status tindak lanjutnya. Dalam hal ini, penanggung jawab temuan harus menindaklanjuti catatan dari Inspektorat Jenderal sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada pencapaian IKM 14 melalui penggunaan aplikasi SIDAK <https://sidak.kkp.go.id/> yang memudahkan BPSPL Padang dan tim Inspektorat Jenderal untuk memantau proses tindak lanjut hasil pengawasan. Aplikasi SIDAK juga telah mengakomodir penyampaian dokumen tindak lanjut tersebut sehingga dokumentasi menjadi lebih terarsip dengan rapi.

#### E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian IKM 19 dapat ditunjang oleh adanya upaya pendampingan oleh APIP terhadap kegiatan di BPSPL Padang. Dengan adanya pendampingan tersebut, ke depannya BPSPL Padang dapat meminimalisir jumlah temuan pada kegiatan serupa.

#### F. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk pencapaian IKM 19.

### IKM. 20. Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Padang (%)

Temuan LHP BPK BPSPL Padang yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK BPSPL Padang Tahun 2023. Capaian IKM ini dihitung dari persentase perbandingan jumlah temuan LHP yang diselesaikan dengan Jumlah temuan, sebagaimana rumus berikut.

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK BPSPL Padang yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK BPSPL Padang}} \times 100\%$$

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.

**A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan**

Rincian target IKM 20 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 65. Perbandingan Target dan Capaian IKM 20

IKM. 20. Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Padang (%)				
Realisasi Triwulan III 2023	Triwulan III 2024			
	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	-	-	-	-

Pada periode triwulan III 2023, capaian IKM 20 belum diperoleh karena IKM ini dijadwalkan tahunan.

**B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya**

Tidak terdapat perbandingan capaian pada triwulan III 2023 – triwulan III 2024 karena IKU ini memiliki frekuensi pengukuran tahunan.

**C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan**

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan III 2024 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Tidak terdapat indikator kinerja pada Rencana Strategis DJPRL yang dapat dibandingkan secara langsung dengan indikator ini.

Tabel 66. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 20 BPSPL Padang

Program Dukungan Manajemen						
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1

Dalam hal ini, Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Padang merupakan indikator pendukung dalam pencapaian target Renstra DJPRL 2020-2024 karena memiliki nomenklatur dan satuan berbeda. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah, indikator kinerja ini memiliki sifat kontributif yang tidak dapat dibandingkan capaiannya.

Pada perbandingan dengan standar nasional, dilakukan perbandingan dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 sebagai acuan. Dalam hal ini, Persentase Penyelesaian Temuan tidak termasuk dalam indikator kinerja KKP tahun 2020-2024, melainkan diturunkan ke unit kerja eselon 1 di bawahnya. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian indikator ini dengan standar nasional.

**D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Perlu dilakukan pengawasan secara berjenjang dalam penggunaan anggaran oleh Kepala BPSPL Padang. Setiap pertanggungjawaban keuangan harus mencantumkan bukti otentik dan konfirmasi langsung kepada pengguna anggaran. Sebagai antisipasi, BPSPL Padang perlu senantiasa menjalankan tugas dan fungsinya dengan disertai penerapan nilai-nilai akuntabilitas untuk meminimalisir temuan.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan anggaran, terdapat efisiensi pada penggunaan Pemegang Uang Muka Kegiatan sebagai upaya mencegah penggunaan anggaran yang melebihi pagu. Selain itu, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan juga telah dilaksanakan secara berjenjang.

#### E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian IKM 20 dapat ditunjang dengan adanya evaluasi kinerja dan anggaran yang dilaksanakan setiap triwulannya. Pada kesempatan tersebut, dibahas secara tuntas perkembangan isu yang terdapat di BPSPL Padang, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil pengawasan. Dalam hal ini, BPSPL Padang memperhatikan aspek kinerja dan referensi keuangan yang sesuai.

#### F. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk pencapaian IKM 20.

### IKM. 21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Padang (%)

Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis adalah suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain:

- a. memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
- b. memiliki anggaran besar;
- c. mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
- d. mendukung pencapaian prioritas nasional;
- e. merupakan arahan direktif presiden; dan/atau
- f. pertimbangan lainnya.

Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan prioritas atau bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan fokus pengukuran pemanfaatannya yaitu bantuan konservasi. Nilai efektivitas pada Unit Kerja menggunakan nilai yang telah disepakati pada pleno hasil penilaian evaluasi efektivitas pemanfaatan bantuan pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Adapun nilai efektivitas diperoleh dari rumus perhitungan **Efektivitas = 80% Pencapaian Tujuan + 10% Integrasi + 10% AT**.

Keterangan:

PT = Pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya atau beroperasinya bantuan pemerintah sesuai target

IG = Integrasi yang diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan atau penerima memahami hak dan kewajibannya setelah menerima bantuan pemerintah

AT = Adaptasi yang diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan atau kemampuan penerima bantuan pemerintah untuk mengembangkan usahanya atau kegiatan kelautan dan perikanan

Nilai efektivitas tersebut terbagi ke dalam kategori sebagai berikut:

1. predikat AA dengan nilai >90-100 dengan kategori Memuaskan;
2. predikat A dengan nilai >80-90 dengan kategori Efektif;
3. predikat B dengan nilai >60-80 dengan kategori Cukup Efektif;

4. predikat C dengan nilai >40-60 dengan kategori Kurang Efektif;
5. predikat D dengan nilai 0-40 dengan kategori Tidak Efektif.

**A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan**

Rincian target IKM 21 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

*Tabel 67. Perbandingan Target dan Capaian IKM 21*

IKM. 21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Padang (%)				
Realisasi	Triwulan III 2024			
Triwulan III 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	-	-	-	-

Pada periode triwulan III 2023, capaian IKM 21 belum diperoleh karena dijadwalkan tahunan. Capaian IKM ini diperoleh dari hasil evaluasi terhadap penerima bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) tahun anggaran 2023, yaitu Kelompok Poseidon Diver Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Banyu Biru di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kelompok Masyarakat Pengawas Hiu Macan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

**B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya**

Tidak terdapat perbandingan capaian pada triwulan III 2023 – triwulan III 2024 karena IKU ini memiliki frekuensi pengukuran tahunan.

**C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan**

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan III 2024 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Dalam hal ini, indikator Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah tidak terdapat pada Rencana Strategis DJPRL 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan.

Ditinjau dari standar nasional, Indikator kinerja Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah juga tidak termuat dalam Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024. Maka dari itu, tidak terdapat capaian kinerja yang dapat dibandingkan dengan standar nasional.

**D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Pencapaian IKM 21 didukung oleh pemahaman menyeluruh terkait aspek-aspek pengukuran efektivitas bantuan pemerintah. Selain itu, kooperasi dari kelompok penerima bantuan dalam menyampaikan data dukung, informasi, dan keterangan yang benar juga dapat menunjang pengukuran yang menyeluruh dan akuntabel. Dalam hal ini, BPSPL Padang telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kelompok sebelum melakukan peninjauan langsung di lapangan untuk mempersiapkan kelompok. Di samping itu, pelibatan dinas sebagai mitra juga dapat mendukung upaya pembekalan kepada kelompok lebih menyeluruh.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, Efisiensi terdapat pada kegiatan pra-monev yang dilakukan secara daring. Pada kesempatan tersebut, verifikator BPSPL Padang melakukan diskusi dan wawancara dengan perwakilan kelompok dengan mengacu pada Kertas Kerja Evaluasi yang menjadi acuan

penilaian. Dalam hal ini, pra-monev dapat membantu identifikasi masalah lebih awal sehingga pelaksanaan pemantauan langsung dapat berjalan lebih efisien.

#### E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya pencapaian IKM 21 dapat didukung oleh hal berikut.

##### a. Pra-Monev terhadap Kelompok Penerima Bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) Tahun Anggaran 2023

Pra-monev pengelolaan bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) bertujuan untuk memperoleh gambaran konkret terkait perkembangan pemanfaatan bantuan. Dengan dilaksanakan pra-monev terlebih dahulu, identifikasi permasalahan dapat dilaksanakan lebih cepat sehingga pelaksanaan monev secara langsung dapat efektif fokus pada pendampingan penyelesaian masalah.

##### b. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Bantuan KOMPAK

Monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan KOMPAK ditargetkan pada tiga kelompok penerima bantuan tahun anggaran 2023, yaitu Poseidon Diver Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kelompok Banyu Biru di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Pokmaswas Hiu Macan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hasil pemantauan tersebut akan dituangkan ke dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Efektivitas Bantuan Pemerintah.



Gambar 78. Dokumentasi Pemantauan terhadap Kelompok Banyu Biru



Gambar 79. Dokumentasi Pemantauan terhadap Pokmaswas Hiu Macan



Gambar 80. Dokumentasi Pemantauan terhadap Kelompok Poseidon Diver Mentawai

## F. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM 21 didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2362.QEH] Bantuan Kelompok Masyarakat dengan Rincian Output (RO) [2362.QEH.001] Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 68. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKM 21

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2362.QEH.001.053] Pendampingan dan Pembinaan KOMPAK	37.800.000,00	24.501.450,00	64,82
<b>Total</b>		<b>37.800.000,00</b>	<b>24.501.450,00</b>	<b>64,82</b>

Realisasi anggaran pada komponen [2362.QEH.001.053] adalah 64,82%.

## IKM. 22. Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Padang (Nilai)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal
 

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

  - a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
  - b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana
2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif
 

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.
3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal
 

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Padang merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari aspek pengelolaan arsip dinamis dan aspek sumberdaya kearsipan. Adapun nilai dan kategori atas hasil pengawasan kearsipan memiliki kriteria sebagai berikut.

Tabel 69. Kriteria Nilai Pengawasan Kearsipan Internal

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

**A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan**

Rincian target IKM 22 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

IKM. 22. Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Padang (Nilai)				
Realisasi	Triwulan III 2024			
Triwulan III 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	-	-	-	-

Pada periode triwulan III 2024, belum terdapat capaian terhadap IKU ini. IKU ini merupakan indikator kinerja yang ditargetkan dengan periode tahunan.

**B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya**

IKM ini tidak terdapat pada tahun 2023 sehingga tidak terdapat perbandingan capaian antara triwulan III 2023 dan triwulan III 2024.

**C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan**

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan III 2024 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Dalam hal ini, indikator Nilai Pengawasan Internal Kearsipan tidak terdapat pada Rencana Strategis DJPRL 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan.

Ditinjau dari standar nasional, Indikator kinerja Nilai Pengawasan Internal Kearsipan juga tidak termuat dalam Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024. Maka dari itu, tidak terdapat capaian kinerja yang dapat dibandingkan dengan standar nasional.

**D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Pencapaian IKM ini didukung oleh pengelolaan arsip yang memenuhi kriteria penilaian. Dalam hal ini, pengelolaan arsip yang selaras didukung oleh sumber daya manusia dan sarana yang menunjang pengelolaan arsip. Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada penggunaan fitur Korespondensi pada laman portal.kkp.go.id yang membantu proses persuratan secara sistematis.



**E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Pengelolaan arsip didukung dengan kecakapan dan keterampilan arsiparis dalam pengelolaan arsip. Selain itu, pemahaman pegawai BPSPL Padang dalam menggunakan fitur Korespondensi pada aplikasi *Portal Collaboration Office* dalam persuratan juga dapat mendukung pengelolaan arsip lingkup BPSPL Padang.

**F. Realisasi Anggaran**

Tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk pencapaian IKM 22.

### 3. 2. Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Sejenis

Perbandingan capaian kinerja BPSPL Padang dengan sampling unit kerja sejenis lainnya pada triwulan III 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 70. Perbandingan Capaian BPSPL Padang dengan Unit Kerja Sejenis

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Makassar	
	Target TW III 2024	Capaian TW III 2024	Target TW III 2024	Capaian TW III 2024
1 Nilai PNBP (Rp.000)	-	-	-	-
2 Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Orang)	-	-	-	-
3 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun (Dokumen)	-	-	-	-
4 Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (Daerah)	-	-	-	-
5 Kerjasama Konservasi yang diinisiasi (Kesepakatan)	-	-	-	-
6 Bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) yang diserahkan (Kelompok)	2	3	2	3
7 Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencarian Baru (Kelompok)	-	-	-	-
8 Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi (Jenis)	-	-	-	-
9 Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (Jenis)	-	-	-	-
10 Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang diidentifikasi di wilayah kerja (Dokumen)	-	-	-	-
11 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)	-	-	-	-
12 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) (nilai)	-	-	-	-
13 Nilai Kinerja Anggaran (nilai)	-	-	-	-
14 Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK (Nilai)	-	-	-	-
15 Indeks profesionalitas ASN (indeks)	-	-	-	-
16 Nilai PM SAKIP (Nilai)	-	-	-	-
17 Laporan SPIP yang Disusun (Dokumen)	3	3	3	3
18 Persentase unit kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94	133,33	94	133,33
19 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80	100	80	100

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Makassar	
	Target TW III 2024	Capaian TW III 2024	Target TW III 2024	Capaian TW III 2024
20	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK (%)	-	-	-
21	Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah (%)	-	-	-
22	Nilai pengawasan internal kearsipan (nilai)	-	-	-

Berdasarkan perbandingan terhadap unit kerja sejenis lainnya, dalam hal ini BPSPL Makassar, kedua unit kerja memiliki empat indikator yang diukur capaiannya pada triwulan III 2024.

**a. Bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) yang diserahkan (Kelompok)**

Pada triwulan III 2024, BPSPL Padang dan BPSPL Makassar telah menyalurkan bantuan konservasi kepada tiga kelompok masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing. Dalam hal ini, kedua Unit Kerja memiliki realisasi capaian yang sama.

**b. Laporan SPIP yang Disusun (Dokumen)**

Pada triwulan III 2024, BPSPL Padang dan BPSPL Makassar telah menyampaikan tiga dokumen Laporan SPIP. Capaian tersebut menandakan bahwa kedua unit kerja memiliki realisasi capaian yang sama pada indikator kinerja ini.

**c. Persentase unit kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)**

Pada triwulan III 2024, BPSPL Padang dan BPSPL Makassar memperoleh persentase penerapan manajemen pengetahuan terstandar secara maksimal, yaitu 133,33%. Realisasi capaian yang sama juga terdapat pada indikator kinerja ini.

**d. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)**

Pada triwulan III 2024, BPSPL Padang dan BPSPL Makassar memperoleh persentase maksimal, yaitu 100%. Dalam hal ini, Realisasi capaian yang sama juga terdapat pada indikator kinerja ini.

### 3.3. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2024 ini BPSPL Padang didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP-DIPA 032.07.2.499346/2024 sebesar **Rp16.904.860.000,00** (Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Dari total anggaran tersebut, 87,64% bersumber dari Rupiah Murni sementara 12,36% bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). **Hingga triwulan III 2024, realisasi anggaran mencapai Rp12.932.031.783,00** (Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) **dengan persentase 76,50%**. Adapun realisasi anggaran BPSPL Padang secara rinci disajikan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 71. Realisasi Anggaran BPSPL Padang Hingga Triwulan III 2024



Kode	Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persentase (%)
<b>Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang</b>		<b>16.904.860.000,00</b>	<b>12.932.031.783,00</b>	<b>76,50</b>
<b>2362 Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut</b>				
2362.PBW.001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	50.000.000,00	34.832.469,00	69,66
2362.PEC.001	Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	70.000.000,00	17.645.000,00	25,21
2362.QEH.001	Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	400.000.000,00	384.794.282,00	96,20
2362.RAL.001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	172.800.000,00	162.355.260,00	93,96
2362.REB.001	Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan	900.000.000,00	597.193.463,00	66,35
2362.REB.002	Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dikelola Pemanfaatannya secara Berkelanjutan	1.227.200.000,00	763.966.452,00	62,25
2362.SCC.002	Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya	200.000.000,00	0	0
2362.UBA.001	Pemerintah Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	150.000.000,00	35.759.292,00	23,84
<b>2363 Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan</b>				
2363.PBW.002	Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut	100.000.000,00	86.801.033,00	86,80
<b>4346 Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>				
4346.QDD.001	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran	800.000.000,00	655.929.037,00	81,99
<b>2366 Perencanaan Ruang Laut</b>				
2366.PBT.009	Rekomendasi Kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	1.100.000.000,00	729.224.901,00	66,29
<b>2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut</b>				
2367.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Informasi	287.000.000,00	286.225.650,00	99,73
2367.EBA.956	Layanan BMN	62.500.000,00	60.407.331,00	96,65
2367.EBA.957	Layanan Hukum	210.000.000,00	176.703.055,00	84,14
2367.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	44.233.000,00	37.672.883,00	85,17
2367.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	209.600.000,00	199.899.927,00	95,37



Kode	Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2367.EBA.994	Layanan Perkantoran	10.274.860.000,00	8.175.398.599,00	79,57
2367.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	325.367.000,00	301.888.332,00	92,78
2367.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	154.500.000,00	94.725.559,00	61,31
2367.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	88.000.000,00	57.487.431,00	65,33
2367.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	78.800.000,00	73.493.326,00	93,27

## IV. Penutup

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan pengukuran kinerja hingga periode Triwulan III 2024, terdapat 22 Indikator Kinerja (IK) di lingkup BPSPL Padang dengan jangka waktu target bersifat triwulanan, semesteran, dan tahunan yang juga disampaikan perkembangan kegiatannya. Adapun hasil pengukuran kinerja menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://kinerjaku.kkp.go.id/> menunjukkan **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh BPSPL Padang pada triwulan III 2024 adalah 117,50 (kategori istimewa)**.

Berikut disampaikan capaian masing-masing indikator kinerja BPSPL Padang pada triwulan III 2024:

1. Nilai PNBP BPSPL Padang dengan target Rp650.000,000 belum diukur capaiannya karena memiliki periode pengukuran tahunan,
2. Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 320 Orang belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
3. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 3 Dokumen belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
4. Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 3 Daerah belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
5. Kerja Sama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 1 Kesepakatan belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
6. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target tahunan 3 Kelompok dan target pada triwulan III 2 Kelompok; telah tercapai 3 Kelompok pada triwulan III.
7. Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Padang yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru dengan target 1 Kelompok belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
8. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 8 jenis tidak dilakukan pengukuran pada triwulan III karena memiliki periode pengukuran tahunan.
9. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 5 jenis tidak dilakukan pengukuran pada triwulan III karena memiliki periode pengukuran tahunan.
10. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 1 Dokumen belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
11. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 4 Kawasan belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
12. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Padang dengan target tahunan 93,76 tidak diukur capaiannya pada triwulan III.
13. Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Padang dengan target 86 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
14. Nilai Unit Kerja Berpredikat menuju WBK di BPSPL Padang dengan target 75 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
15. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPSPL Padang dengan target tahunan 88 tidak diukur capaiannya pada triwulan III.

16. Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Padang dengan target 81 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
17. Laporan SPIP yang Disusun lingkup BPSPL Padang telah mencapai 3 dokumen dari target tahunan 4 dokumen; capaian sesuai dengan target triwulannya.
18. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Padang yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar telah mencapai 133,33% dari target 94%.
19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Padang yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan telah mencapai 100% dari target 80%.
20. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Padang dengan target 100% belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Padang dengan target 80 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
22. Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Padang dengan target 65 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.

Berdasarkan uraian capaian tersebut, BPSPL Padang telah mencapai seluruh indikator kinerja yang dijadwalkan pada triwulan III 2024 dengan persentase  $\geq 100\%$ . Pencapaian tersebut juga didukung dengan adanya alokasi **pagu anggaran sejumlah Rp16.904.860.000,00** (Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Dari total anggaran tersebut, 87,64% bersumber dari Rupiah Murni sementara 12,36% bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam perkembangannya, seluruh pagu anggaran yang sempat terdampak blokir telah dibuka pada tanggal 20 Juni 2024. **Hingga triwulan III 2024, realisasi anggaran mencapai Rp12.932.031.783,00** (Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) **dengan persentase 76,50%**. Adapun efisiensi terhadap penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target tersebut belum menunjukkan nilai akhir karena periode pengukurannya yang berlangsung tahunan.

Dalam perkembangannya, tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian target triwulan III 2024. Namun demikian, terdapat hal yang perlu didorong pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian target kinerja tahun 2024, yaitu melaksanakan pendampingan pengusulan penetapan Kawasan Konservasi di Provinsi Aceh.

## 4.2. Rekomendasi

### A. Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan II 2024

Rekomendasi pada triwulan II 2024 adalah melaksanakan revidi Rencana Aksi. Dalam upaya tindak lanjutnya, BPSPL Padang telah melaksanakan revidi Rencana Aksi yang telah disesuaikan dengan dinamika perkembangan kegiatan.

### B. Rekomendasi Triwulan IV 2024

Untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2024, langkah yang dapat dilakukan adalah melaksanakan pendampingan pengusulan penetapan Kawasan Konservasi di Provinsi Aceh.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BPSPL Padang Tahun 2024



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**  
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357  
LAMARAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [sespridirenprl@kkp.go.id](mailto:sespridirenprl@kkp.go.id)

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)**  
**PADANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

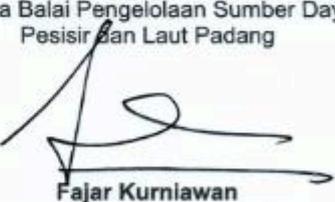
Nama : **Fajar Kurniawan**  
Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**  
Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Januari 2024

<p>Pihak Kedua Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut</p>  <p><b>Victor Gustaaf Manoppo</b></p>	<p>Pihak Pertama Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang</p>  <p><b>Fajar Kurniawan</b></p>
---	--

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
 BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)  
 PADANG**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Padang	1.	Nilai PNBP BPSPL Padang (Rp.000)	650.000
2.	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang	2.	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang (Orang)	320
3.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang	3.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	3
4.	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Padang	4.	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Daerah)	3
5.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Padang	5.	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)	1
6.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang	6.	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kelompok)	3
		7.	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Padang yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)	1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Padang	8.	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	8
8.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang	9.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	5
9.	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Padang	10.	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	1
10.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran	11.	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Padang (Kawasan)	4
11.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPSPL Padang	12.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Padang (Nilai)	93,76
		13.	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Padang (Nilai)	86
		14.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Padang (Nilai)	75
		15.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Padang (Indeks)	88
		16.	Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Padang (Nilai)	81
		17.	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Padang (Dokumen)	4
		18.	Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Padang yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94

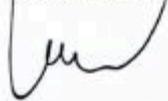
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Padang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
	20. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Padang (%)	100
	21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Padang (%)	80
	22. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Padang (nilai)	65

### Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	1.100.000.000
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	3.170.000.000
3.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	800.000.000
4.	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	100.000.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	11.734.860.000
<b>Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Tahun 2024</b>		<b>16.904.860.000</b>

Jakarta, 25 Januari 2024

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal  
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



Victor Guetaaf Manoppo

Pihak Pertama  
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya  
Pesisir dan Laut Padang



Fajar Kurniawan



Lampiran 2. Sertifikat BPSPL Padang

**Certificate of Registration**



**Registration No. : QAIC / ID / 11112 - A**  
Q.A. Indonesia Certification  
Hereby grants to:

**BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PADANG**

*(hereinafter called the Registered Institution) the right to be listed in the Directory of Registered Institution in respect of the services listed below. These services shall be offered by the Registered Institution at or from only the address given below in accordance with the Quality Management System in compliance with ISO 9001:2015.*

Address to which this Certificate refers :

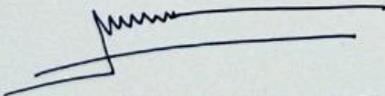
**Jl. Raya Pertanian, Sei Duo - Sungai Lareh, Lubuk Minturun,  
Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat**

Approved Scope to which this Certificate refers:

**Provision of Public Administration in Monitoring Trading Traffic of Endangered  
and Protected Fish**

(Further clarification regarding the Scope of this Certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirement may be obtained by consulting the organization)

For and on behalf of QA Indonesia

  
Ir. Joko Nursapto, MEng.Sc-RLA

**Certificate Issue Date : 02 February 2023 - Re-assessment Date : 02 February 2024**  
**Date of Initial Registration : 02 February 2023 - Certificate Expiry Date : 02 February 2026**  
This Certificate of Registration is granted subject to the Regulations approved by the Governing Board.

QA INDONESIA CERTIFICATION  
Address: Jl. Surabaya No.11, Menteng, Jakarta 10310  
Telp: 021 - 21230866  
Email: admin@qai.co.id  
Website: www.qai.co.id







**Registration No :** QAIC / ID / 11112 – A

**BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PADANG**

**Location**

Jl. Raya Pertanian, Sei Duo - Sungai Lareh, Lubuk Minturun, Kec. Koto Tengah, Kota Padang,  
Sumatera Barat

**Registered Activities :**

1. Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri
2. Surat Rekomendasi

Certificate Issue Date : 02 February 2023 - Re-assessment Date : 02 February 2024  
Date of Initial Registration : 02 February 2023 - Certificate Expiry Date : 02 February 2026

This Certificate of Registration is granted subject to the Regulations approved by The Governing Board

**QA INDONESIA CERTIFICATION**

Address: Surabaya St No.11, Menteng, Jakarta 10310  
Telp: 021 - 21230866  
Email: admin@qai.co.id  
Website: www.qai.co.id







Lampiran 3. Penghargaan BPSPL Padang



